



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Balikpapan tahun 2022 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa diamanatkan LPPD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian

tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai sarana laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka paling tidak ada 4 (empat) substansi pokok capaian kinerja disajikan, yaitu: (1) capaian kinerja penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), (2) capaian realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2022, (3) capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan, dan (4) capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Penyusunan LPPD Kota Balikpapan Tahun 2022 mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor 100.02.2.7/9136/OTDA Tanggal 19 desember 2023 perihal Penyampaian pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Tahun 2022. Dengan demikian penyajiannya secara maksimal telah memenuhi semua aspek, fokus dan indikator yang ditetapkan dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Balikpapan di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang

nggi untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni, dan semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2022 ini memberi manfaat serta dapat dijadikan landasan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang strategis untuk kepentingan rakyat dan demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

“Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela, Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman, dan Kubela dengan Doa”

Balikpapan, Maret 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN

H. RAHMAD MAS'UD, S.E, M.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 PENJELASAN UMUM	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
B. Data Geografis Wilayah.....	3
C. Jumlah Penduduk	7
D. Jumlah Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan.....	9
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah	11
F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	13
1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14
A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.....	14
B. Visi Dan Misi Kepala Daerah	25
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	37
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	53
1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	74
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	92
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	92
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	92
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Luaran.....	92
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	93
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	123
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	129

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	314
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL....	315
4.1 Urusan Pendidikan.....	315
4.2 Urusan Kesehatan.....	327
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	347
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	352
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	359
4.6 Urusan Sosial.....	369
BAB V PENUTUP.....	379
LAMPIRAN	380

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan	5
Tabel 1.2	Luas Wilayah Dirinci Menurut Topografi Ketinggian.....	6
Tabel 1.3	Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelereng.....	7
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Lahir Dan Datang Serta Persentasenya Terhadap Total Penduduk Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021	8
Tabel 1.5	Kecamatan Dan Kelurahan Kota Balikpapan	9
Tabel 1.6	Jumlah Perangkat Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Balikpapan	11
Tabel 1.7	Realisasi Belanja APBD Tahun 2022.....	13
Tabel 1.8	Indeks Pembangunan Manusia	16
Tabel 1.9	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dan Target RPJMD	37
Tabel 1.10	Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan	41
Tabel 1.11	Program Dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan	42
Tabel 1.12	Kegiatan Dan Anggaran Di Pemerintah Kota Balikpapan	53
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan	92
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Balikpapan Tahun 2022	93
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	123
Table 2.4	Skala Nilai Peringkat Kerja.....	129
Tabel 2.5	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan	129
Tabel 2.6	Pengukuran Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2022.....	134
Table 2.7	Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	137
Table 2.8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.....	148

Table 2.9	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional Tahun 2022.....	152
Table 2.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja	157
Table 2.11	Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Tercapainya Target Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022	167
Table 2.12	Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan.....	261
Table 2.13	Angka Kemiskinan Di Kota Balikpapan Tahun 2018-2022.....	277
Table 2.14	Nama Dan Bentuk Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022	293
Table 2.15	Beberapa Dokumentasi Penerimaan Penghargaan.....	300
Tabel 4.1	Target Pencapaian SPM Kabupaten/Kota Urusan Pendidikan.....	315
Table 4.2	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022.....	317
Table 4.3	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2022	320
Tabel 4.4	Tabel Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022	325
Tabel 4.5	Permasalahan Dan Solusi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022	326
Tabel 4.6	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.....	327
Tabel 4.7	Target Capaian SPM Bidang Kesehatan	328
Tabel 4.8	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan	330
Tabel 4.9	Anggaran Pembiayaan Program/Kegiatan SPM Kesehatan Tahun 2022	343
Table 4.10	Dukungan Personil SPM Urusan Kesehatan	346
Table 4.11	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	348
Table 4.12	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022	349
Table 4.13	Alokasi Anggaran SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	350
Table 4.14	Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum	352

Tabel 4.15	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	354
Tabel 4.16	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2022	355
Table 4.17	Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022	356
Table 4.18	Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat	358
Table 4.19	Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Oleh Daerah.....	359
Table 4.20	Realisasi Pelayanan SPM Ketentraman Dan Ketertiban Umum	360
Table 4.21	Realisasi Pelayanan SPM Urusan Kebencanaan Kota Balikpapan Tahun 2022	361
Table 4.22	Realisasi Pelayanan SPM Sub Urusan Damkar Kota Balikpapan Tahun 2022	362
Table 4.23	Alokasi Anggaran Pelayanan SPM Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kota Balikpapan Tahun 2022	363
Table 4.24	Dukungan Personil Untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebencanaan Dan Damkar	368
Table 4.25	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Oleh Daerah.....	370
Table 4. 26	Realisasi Pelayanan SPM Bidang Sosial Kota Balikpapan Tahun 2022	370
Table 4.27	Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2022.....	376
Table 4.28	Dukungan Personil SPM Urusan Sosial	377

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.5	Luas, Batas Wilayah, Letak Dan Kondisi Geografis	3
Gambar1.6	Peta Wilayah Kota Balikpapan Perkecamatan Dan Lelurahan.....	4
Gambar1.7	Jumlah Dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Dikota Balikpapan Tahaun 2022	8
Gambar1.8	Persentase Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2022	9
Gambar1.5	Indeks Kepuasan Infracstruktur Dasar (IKLI)Tahun 2016-2020	18
Gambar1.6	Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	26
Gambar1.7	Tahap Tema Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.....	29
Gambar1.8	9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022-2026.....	30
Gambar1.9	4 Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2022.....	33
Gambar1.10	Kawasan DAS Prioritas Dan Rencana Keterpaduan Program DAS Ampal	34
Gambar1.11	Ketersediaan Air Baku Serta Kebutuhannya Pada Tahun 2018-2021 Dan Proyeksinya Pada Tahun 2022-2026.....	35
Gambar1.12	Konsep Penerapan Pelibatan Aktor ABCGM	35
Gambar 1.13	Sub Sektor Prioritas Ekonomi Di Kota Balikpapan.....	36
Gambar 1.14	Potensi Ruang Kreatif Berdasarkan Potensi Wilayah	36



BAB I

PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;

Pembentukan suatu wilayah tidak bisa lepas dari sejarah pembentukannya sebagai perjalanan sejarah dari masa ke masa. Secara historis yuridis, dasar pembentukan Kota Balikpapan sejak awal pendiriannya setelah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 55/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penyempurnaan dan Penegasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 2 Februari 1969 Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 384 Tahun 1990 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 140/SK.149/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Penetapan Pemecahan Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 146/SK.144/1996 tanggal 17 Mei 1996 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Administratif Tarakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan dan Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penetapan 7 (Tujuh) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan 5 (Lima) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda menjadi Kelurahan Definitif;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8).

b. Data Geografis Wilayah;

b.1. Luas, Batas Wilayah, Letak dan Kondisi Geografis

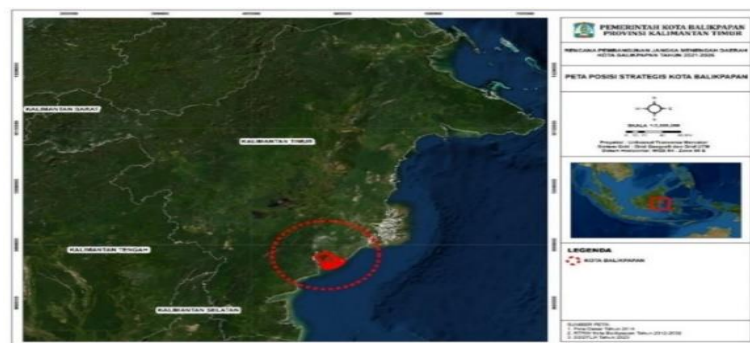
Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 51.101,24 Ha. Secara geografis, Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Posisi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadi nilai lebih tersendiri kaitannya dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kota Balikpapan sendiri disiapkan sebagai *Buffer Zone* (Zona Penyangga) bagi IKN baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara karena berbatasan secara langsung.

Gambar 1.1

Luas, Batas Wilayah, Letak dan Kondisi Geografis

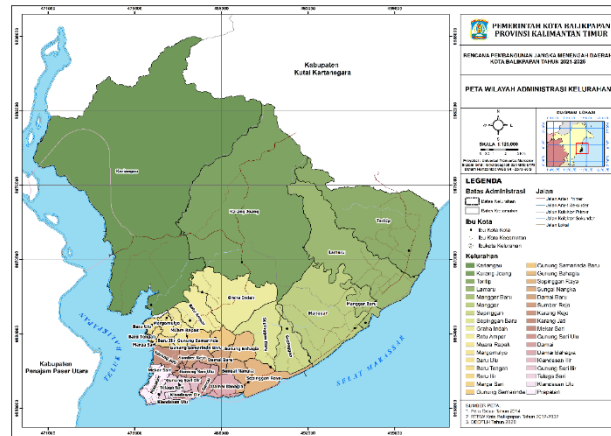


Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun sejak dikeluarkannya Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan yaitu sebagai berikut;

Gambar 1.2

Peta Wilayah Kota Balikpapan Perkecamatan dan Kelurahan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

b.2. Iklim.

b.2.1 Curah Hujan Kota Balikpapan.

Curah hujan tahunan Kota Balikpapan historikal 1991-2020 memiliki rentang dari 2200 mm hingga 2400 mm yang ditunjukkan dengan sebaran warna kuning hingga merah. Pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan sebaran warna kuning berada pada daerah pesisir dan sebaran warna jingga hingga merah berada di daerah perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara). Curah hujan Kota Balikpapan diproyeksikan mengalami peningkatan secara merata dimasa depan dalam rentang 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap.

Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada dikisaran 750–450 mm. Curah hujan tertinggi historikal tahun 1991- 2020 terdapat pada bulan MAM (Maret, April dan Mei) yang ditunjukkan dengan warna yang lebih biru dibandingkan dengan bulannya lainnya.

Curah hujan musiman pada bulan SON (September, Oktober, dan November) lebih rendah dibandingkan dengan bulan lainnya ditunjukkan dengan warna yang semakin merah. Hal ini menunjukkan puncak musim hujan Kota Balikpapan berada pada musim MAM dan puncak musim kemarau pada musim SON.

b.2.2 Suhu Kota Balikpapan.

Sebaran suhu Kota Balikpapan berada dikisaran 27°C hingga 29°C, warna semakin merah menunjukkan suhu yang semakin tinggi, sedangkan warna kuning menunjukkan suhu yang semakin rendah. Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Sebaran suhu udara dengan model CSIRO (*Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*) menunjukkan pada tahun 2021-2050 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991- 2020. Sedangkan, sebaran suhu udara model MIROC (*Model for Interdisciplinary Research on Climate*) tahun 2021-2050 tidak terdapat perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991-2020.

b.2.3 Hidrologi.

Balikpapan termasuk dalam WS strategis nasional Mahakam mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk dalam klasifikasi cukup baik. Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan kota. Adanya keterbatasan penyediaan air bersih PDAM meyebabkan banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut dibawah ini DAS di Kota Balikpapan sebagai berikut.

Tabel 1.1

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

No.	Nama DAS	Grand Total	No.	Nama DAS	Grand Total
1	Gunungdubbs	42.05	17	Teluk Waru	479.71
2	Klandasan Besar/Ampal	4894.65	18	Tempadung	6571.97
3	Klandasan Kecil	1328.52	19	Tengah	657.52
4	Pandansari	1795.77	20	Wain	25349.31
5	Saluran I	245.83	21	Ajiraden	2806.05
6	Telagasari	210.75	22	Batakan	1866.75

No.	Nama DAS	Grand Total
7	Baru	221.12
8	Beranga	2064.17
9	Beruang	634.21
10	Getah	887.38
11	Kemantis	641.42
12	Keminting	2171.84
13	Sanrumukti	160.81
14	Seluk Pudak	374.54
15	Somber	8619.13
16	Tanjungbatu	236.02

No.	Nama DAS	Grand Total
23	Batakan Kecil	623.73
24	Lamaru	1075.14
25	Manggar Besar	19752.86
26	Manggar Kecil	3998.02
27	Selok Api	3209.32
28	Sepinggan	3801.39
29	Teritip	3649.82
30	Teritip Tengah	1061.29
31	Saluran II	251.97
32	Sepinggan Kecil	494.57

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2022.

b.2.4 Topografi.

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 26.090,57 ha atau 51,06 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 18.030,67 ha atau 35,28 % dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13,66 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

Tabel 1.2

Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian).

No	Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1.	0-10	6.980,00	13,66
2.	>10-20	18.030,67	35,28
3.	>20-100	26.090,57	51,06
Jumlah		51.101,24	100

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2022

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 41,69% dari luas wilayah keseluruhan. Berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

Tabel 1.3

Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
	(%)	(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	13,80
2	> 2-15	3.325,00	6,51
3	> 15-40	21.305,57	41,69
4	> 40	19.420,67	38
Jumlah		51.101,24	100

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2022

c. Jumlah Penduduk.

Secara umum, jumlah penduduk di Kota Balikpapan di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah penduduk ditahun 2021. Hasil sensus penduduk pada tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk kota Balikpapan sebanyak 272.665 jiwa. Sedangkan ditahun 2021 sebanyak 710.293 jiwa mengalami pertumbuhan penduduk sebanyak 2.45% dari tahun 2021.

Jika ditelusuri lebih lanjut, jumlah penduduk di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh banyaknya penduduk migrasi ke Balikpapan, bahkan proporsi penduduk yang datang lebih banyak ketimbang penduduk yang lahir. Berdasarkan data, pada tahun 2022 sebanyak 18.926 orang merupakan penduduk pendatang, sedangkan penduduk lahir sebanyak 10.281 orang. Tingginya migrasi ke Kota Balikpapan perlu dilakukan antisipasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan, apalagi adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk ke Balikpapan secara signifikan. Antisipasi tersebut meliputi berbagai faktor, baik faktor sosial, lingkungan, maupun infrastruktur.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Lahir dan Datang serta Persentasenya Terhadap Total Penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2017-2022

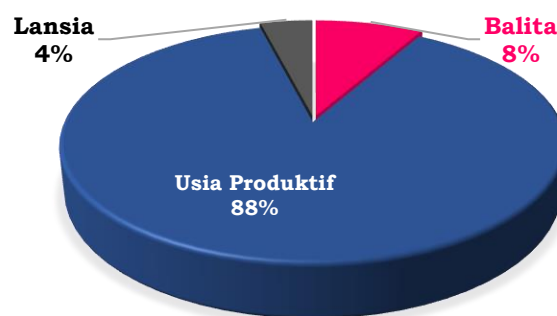
Tahun	Lahir	Datang	%Kelahiran Terhadap Total Penduduk	%Pendatang Terhadap Total Penduduk
2017	19.211	18.142	3,03%	2,87%
2018	20.095	13.499	3,09%	2,08%
2019	19.044	12.218	2,84%	1,82%
2020	10.366	13.165	1,49%	1,89%
2021	10.466	17.743	1,47%	2,50%
2022	10.281	18.926	1,41%	2,60%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

Kelompok usia penduduk yang dominan berada di Kota Balikpapan adalah usia produktif, yaitu sebesar 88% dari total penduduk pada tahun 2022 (635.956 orang). Sedangkan, untuk kelompok usia balita hanya 8% (60.223 orang) dan 4% (31.486 orang) untuk lansia.

Gambar 1.3

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Di Kota Balikpapan Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51% (371.777 orang) dan perempuan sebanyak 49% (355.888 orang). Banyaknya jumlah penduduk

perempuan tersebut perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Balikpapan terutama dalam hal pembangunan berbasis gender, sehingga kaum perempuan lebih berdaya dan derajat kesejahteraannya semakin meningkat.

Gambar 1.4

Persentase Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2022(Sumber: Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

d. Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan.

Secara administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Pada tahun 2012 terdapat pemekaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah, Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, sehingga kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan berubah menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tigapuluh empat) Kelurahan, sebagai berikut:

Tabel 1.5

Kecamatan Dan Kelurahan kota Balikpapan

No	Kelurahan
Kecamatan Balikpapan Selatan	
1	Damai Baru
2	Damai Bahagia
3	Sepinggan Baru
4	Sungai Nangka

No	Kelurahan
5	Sepinggán Raya
6	Gunung Bahagia
7	Sepinggán
Kecamatan Balikpapan Kota	
1	Prapatan
2	Telaga Sari
3	Klandasan Ulu
4	Klandasan Ilir
5	Damai
Kecamatan Balikpapan Timur	
1	Manggar
2	Manggar Baru
3	Lamaru
4	Teritip
Kecamatan Balikpapan Tengah	
1	Gunung Sari Ilir
2	Gunung Sari Ulu
3	Mekar Sari
4	Karang Rejo
5	Sumber Rejo
6	Karang Jati
Kecamatan Balikpapan Barat	
1	Baru Ilir
2	Margo Mulyo
3	Marga Sari
4	Baru Tengah
5	Baru Ulu
6	Kariangau
Kecamatan Balikpapan Utara	
1	Gunung Samarinda
2	Muara Rapak
3	Batu Ampar
4	Karang Joang
5	Gunung Samarinda Baru
6	Graha Indah

- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah.

Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan menganut prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini terdiri dari pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan serta kecamatan. Untuk Kelurahan yang dulunya adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini berubah menjadi Perangkat Kecamatan (bukan SKPD mandiri).

Berikut jumlah Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022.

Tabel 1.6

Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			jumlah Tenaga Bantuan		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sekretariat Daerah	79	59	138	75	32	107
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17	14	31	29	23	52
3	Inspektorat	17	26	43	3	2	5
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20	24	44	1	3	4
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	4	17	3	3	6
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	149	15	164	126	12	138
7	Badan Pengelola Keuangan Daerah	21	28	49	141	59	200
8	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	42	22	64	19	14	33

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			jumlah Tenaga Bantuan		
		L	P	L+P	L	P	L+P
9	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16	18	34	2	5	7
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22	14	36	23	15	38
11	Dinas Kesehatan	105	502	607	140	357	497
12	Dinas Ketenagakerjaan	13	16	29	3	2	5
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	12	25	18	8	26
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	13	15	28	9	21	30
15	Dinas Lingkungan Hidup	49	24	73	932	397	1329
16	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	33	32	65	35	15	50
17	Dinas Pekerjaan Umum	42	18	60	197	20	217
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7	31	38	9	26	35
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	19	14	33	36	19	55
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	24	25	49	15	17	32
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	483	1430	1913	677	1539	2216
22	Dinas Perdagangan	38	24	62	99	41	140
23	Dinas Perhubungan	101	12	113	70	23	93
24	Dinas Perpustakaan dan Arsip	9	17	26	6	12	18
25	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	24	10	34	10	4	14
26	Dinas Perumahan dan Pemukiman	19	12	31	38	9	47
27	Dinas Sosial	10	16	26	11	9	20
28	Kecamatan Balikpapan Barat	38	17	55	27	23	50
29	Kecamatan Balikpapan Kota	29	23	52	20	20	40
30	Kecamatan Balikpapan Selatan	38	30	68	24	33	57
31	Kecamatan Balikpapan Tengah	28	26	54	25	19	44
32	Kecamatan Balikpapan Timur	31	13	44	25	28	53

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			jumlah Tenaga Bantuan		
		L	P	L+P	L	P	L+P
33	Kecamatan Balikpapan Utara	40	16	56	28	25	53
34	RSKB Sayang Ibu Tipe B	6	60	66	5	64	69
35	RSUD Balikpapan	38	109	147	88	175	263
36	Satuan Polisi Pamong Praja	155	15	170	39	17	56
TOTAL		1801	2743	4544	3008	3091	6099

Sumber data; Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan, Tahun 2022

- f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Terdiri Dari Laporan Realisasi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Urusan, Program Dan Jenis Belanja.

Pemerintah kota Balikpapan dalam melaksanakan penganggaran mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Berikut Tabel Realisasi belanja APBD Kota Balikpapan tahun 2022;

Tabel 1.7

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah
2.768.261.243.928,77	2.635.674.246.066,33

Sumber data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kota Balikpapan, 2022

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi Anggaran dan Belanja daerah Tahun 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp.785.515.293.200,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp.785.871.968.624,60 atau 100,05%;

- b. Pendapatan Transfer Tahun 2022 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 1.939.612.356.389,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp. 1.977.490.869.947,00 atau 101,95%;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp.102.271.230.000,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp.4.898.396.357,17 atau 4,79%;
- d. Belanja Operasi Tahun 2022 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp.2.248.011.443.136,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp.1.818.336.850.165,84 atau 80,89%;
- e. Belanja Modal Tahun 2022 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp.975.007.016.062,00 dengan kemampuan realisasi Sejumlah Rp.783.811.389.791,12 atau 80,39 %; dan
- f. Belanja tidak terduga Tahun 2022 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp.50.111.396.064,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp.33.526.006.109,37 atau 66,90%.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.

- a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan seiring dinamika perkembangan jaman maka secara umum Kota Balikpapan menghadapi permasalahan daerah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan;

Tujuan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) membuat setiap organisasi pemerintahan baik pusat maupun daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan

Kota Balikpapan sendiri masih belum optimal dan terus ditingkatkan beberapa permasalahan yang ada adalah nilai akuntabilitas kinerja SKPD yang dinilai cukup/baik belum tercapai, dan penggunaan teknologi informasi dalam hal pengawasan dan maupun untuk publik masih belum efektif. Selain itu, akuntabilitas kinerja juga menjadi salah satu indikator terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja menunjukkan keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Perlu upaya lebih terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan baik tingkat kota maupun OPD sehingga seluruh program prioritas pemerintah kota dapat dilaksanakan di setiap OPD dengan indikator terukur dan berkualitas.

Dari sisi akuntabilitas keuangan yang diukur dengan Opini Laporan Keuangan (OLK) menunjukkan Kota Balikpapan sudah sangat baik karena selama ini telah memperoleh predikat WTP. Perbaikan pengelolaan aset daerah akan sangat mendukung mempertahankan opini BPK ini namun demikian dari sisi akuntabilitas kinerja masih perlu dioptimalkan, karena berdasarkan Hasil Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan nilai 69,28 (B). Namun demikian, angka ini tidak mencapai target IKU tahun 2021 sebesar 75,00 (BB) yang juga merupakan target akhir RPJMD. Menurut KemenPAN RB hal-hal yang masih memerlukan perbaikan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Kinerja sebagian PD belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (*outcome*), dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup. Kejelasan dan kerukunan kinerja adalah hal yang sangat penting dalam penerapan manajemen kinerja;
- b. *Cascading* kinerja sudah dilakukan sampai ke level organisasi terkecil, namun penjabarannya di tingkat PD belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi atau hasil yang akan dicapai setiap level jabatan;

- c. Pemetaan *crosscutting* lintas PD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah telah dilakukan, namun belum menyeluruh dan menyentuh aspek implementasi yang efektif dan efisien;
 - d. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level PD dan sebagian besar sudah mengungkapkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Namun, analisis Capaian kerja tersebut belum diungkapkan secara mendalam sehingga laporan kinerja tersebut belum bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum sepenuhnya dapat diandalkan;
 - e. Kualitas evaluasi program yang dilakukan oleh penanggung jawab program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program terutama untuk program antar PD;
 - f. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi internal ini masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan simpulan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD.
2. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;

Pembangunan manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang secara umum memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas dan daya saing. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli.

Tabel 1.8

Indeks Pembangunan Manusia

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UHH saat lahir	tahun	73.96	73.97	74.18	74.41	74.49	74.76
HLS	tahun	13.59	13.75	14.12	14.13	14.14	14.22
RLS	tahun	10.54	10.55	10.65	10.67	10.68	10.91

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran per kapita disesuaikan	ribu rupiah	13.883	14.254	14.557	14.791	14.549	14.862
IPM		78.57	79.01	79.81	80.11	80.01	80.71
Selisih IPM		0.39	0.44	0.8	0.3	-0.1	0.7

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka, 2021.

Capaian IPM Kota Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan kondisi tahun 2021 sebesar 80,71 poin, meningkat sebesar 0,7 poin dibandingkan kondisi tahun 2020. Angka IPM Kota Balikpapan secara konsisten melampaui IPM secara nasional, hingga tahun 2021 terdapat selisih sebesar 8,42 poin.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan meskipun menunjukkan peningkatan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir namun selama periode 2010-2021, Balikpapan menempati peringkat 3 besar dari 10 Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, Balikpapan menempati peringkat 2 di Kalimantan Timur sedangkan IPM Kota Samarinda dan Kota Bontang secara berturut-turut menempati peringkat 1 dan peringkat 3 se-Kalimantan Timur. Belum optimalnya angka IPM Kota Balikpapan terutama dipengaruhi rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah. RLS merupakan indikator kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal, sedangkan HLS menjadi indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Dengan nilai RLS dan HLS lebih rendah dibandingkan dengan kota di Kalimantan Timur maka kualitas penduduk dalam memperoleh pendidikan formal harus dioptimalkan dan dilakukan perbaikan pembangunan sistem pendidikan.

Angka IPM yang dicapai saat ini perlu terus ditingkatkan mengingat komponen pembentuk IPM merupakan indikator kinerja strategis pembangunan suatu daerah, yang meliputi Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (indikator pengungkit dimensi pendidikan), Angka Harapan Hidup (indikator pengungkit dimensi kesehatan), dan Pengeluaran per Kapita (indikator pengungkit dimensi ekonomi). Selain itu,

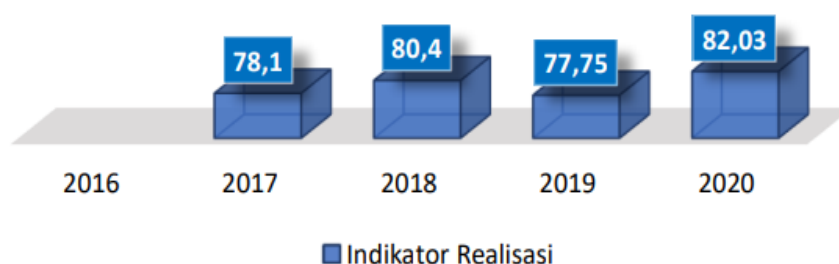
optimalisasi pencapaian IPM perlu dilakukan guna mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pencapaian tujuan ke-3 “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”, dan tujuan ke-4 “Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua”. Sejalan dengan hal tersebut, arahan RPJMN 2020-2024 pada wilayah untuk pulau Kalimantan menetapkan bahwa IPM wilayah Kalimantan yaitu sebesar 71,22-79,25 di tahun 2024.

3. Belum Optimalnya Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Memadai

Kinerja layanan infrastruktur perkotaan dapat dilihat dari hasil Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI). Dari Hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) dapat diketahui bagaimana layanan infrastruktur di Kota Balikpapan telah memadai dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Berikut hasil Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI) tahun 2017 sampai 2020 kota Balikpapan dari pendapat warga Kota Balikpapan tentang kepuasan layanan infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan.

Gambar 1.5

Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI) tahun 2016 – 2020



Sumber : Bappeda Litbang, 2021

Berdasarkan hasil IKLI dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4.28% dari 2019. Berdasarkan capaian IKLI tersebut menunjukkan adanya

kepuasan dari sejumlah responden yang disurvei berkaitan layanan infrastruktur yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat Kota Balikpapan. Terkait dengan kepuasan responden terhadap layanan infrastruktur, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan infrastruktur dinilai cukup baik. Namun hasil IKLI mengalami peningkatan, Pemerintah Kota Balikpapan masih terus meningkatkan kualitas layanan infrastruktur seiring adanya pembangunan IKN di Kalimantan Timur nantinya.

Secara umum terdapat ketidakpuasan layanan infrastruktur berdasarkan hasil IKLI di Kota Balikpapan terjadi karena masyarakat Kota Balikpapan belum dapat mengakses seutuhnya sarana sanitasi yang baik. Bahkan, di beberapa daerah di Kota Balikpapan muncul hunian kumuh yang rawan terhadap permasalahan sosial. Selain itu, terbatasnya akses hunian menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk menjangkau pelayanan tersebut. Permasalahan lain di bidang ini adalah terkait dengan perhubungan atau konektivitas Kota Balikpapan dengan daerah lain. Luas wilayah Kota Balikpapan juga belum sepenuhnya didukung dengan ketersediaan jumlah transportasi umum massal dan sarana jalan untuk menunjang lalu lintas arus barang manusia. Jalan yang sudah dibangun di beberapa daerah juga belum sepenuhnya memperoleh dukungan pemeliharaan yang memadai.

Banjir masih menjadi masalah utama selama 5 (lima) tahun terakhir. Terjadi peningkatan jumlah titik banjir dari 35 titik pada tahun 2016 menjadi 88 titik pada tahun 2020. Penyebab banjir sangat kompleks terutama disebabkan pengupasan lahan akibat alih fungsi lahan sehingga meningkatkan sedimentasi pada saluran drainase. Selain itu, tumpukan sampah di drainase juga mengurangi daya tampung drainase sehingga menyebabkan genangan di beberapa titik di Kota Balikpapan. Para pengembangan yang kurang bertanggungjawab dalam pemenuhan sarana penahan air juga menjadi penyumbang meningkatnya titik banjir.

4. Belum Optimalnya Pembangunan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan;

Konsepsi *liveable city* atau kota layak huni merupakan representasi dari *sustainable city*. Untuk mencapai tersebut pemerintah Kota

Balikpapan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan. Untuk mencapai *liveable city*, Kota Balikpapan perlu meningkatkan keamanan, ketertiban dan lebih peduli atau ramah terhadap lingkungan. Keamanan pada Kota Balikpapan masih kurang salah satunya disebabkan masih belum optimalnya dalam menurunkan angka kriminalitas. Hal ini disebabkan fungsi perlindungan masyarakat yang kurang, seperti jumlah poskamling yang masih kurang, rasio petugas linmas yang masih kurang. Ketertiban di Kota Balikpapan sendiri masih mengalami kendala dan perlu ditingkatkan baik regulasi maupun kesadaran masyarakat. Terakhir, terkait ramah lingkungan Kota Balikpapan cukup baik dibuktikan pada rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode 2016 – 2020 yang masuk pada kualifikasi cukup baik. IKLH didapatkan dari 3 parameter yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH). Permasalahan yang masih menjadi kendala adalah 1) untuk kualitas air disebabkan pencemaran air di Kota Balikpapan didominasi oleh pencemaran akibat air limbah domestik dan non domestik, serta limpasan air hujan yang membawa kikisan tanah. Selain itu meningkatnya pencemaran air, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlokasi di tengah kota, yaitu DAS Klandasan Besar dan DAS Klandasan Kecil, disebabkan pula oleh semakin padatnya penduduk dan tingginya pertumbuhan kegiatan komersil di sekitarnya. Meskipun berada di tengah Kota, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih sangat kurang. 2) untuk kualitas udara dipengaruhi pencemaran udara dari sektor industri, efek rumah kaca akibat bertambahnya penduduk, dan gas emisi dengan penyumbang terbesar adalah bidang manufaktur. 3) untuk Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH) adalah belum optimalnya penanganan pengupasan lahan yang menyebabkan perubahan iklim. Hal ini dikarenakan pelaku usaha dan masyarakat perseorangan yang tidak mempertimbangkan aspek pembangunan atau aturan yang sesuai.

5. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Belum Optimal;

UMKM memiliki peran dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi di Kota Balikpapan. Pertumbuhan UMKM di Balikpapan terus meningkat

dimana dari 2019 sebanyak 1.447 UMKM menjadi 4.689 UMKM. Pertumbuhan UMKM sejalan dengan penyerapan tenaga kerja, dimana pada tahun 2019 UMKM telah menyerap 2.840 orang. Meskipun jumlah unit usaha mengalami trend kenaikan. UMKM masih mengalami beberapa permasalahan dalam segi permodalan, promosi dengan kerjasama dengan toko swalayan.

Bertambahnya penduduk juga tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mengingat jumlah penduduk Kota Balikpapan didominasi oleh penduduk usia produktif, maka ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator yang penting, di samping mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat usia produktif.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan masing cukup tinggi hingga mencapai 7,29 persen di tahun 2019 dan di tahun 2020 sebesar 9 persen, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu sebesar 4,55 persen. Gap pencapaian ini diperkirakan akan semakin melebar di tahun 2021 dikarenakan adanya kasus pandemi Covid-19. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Balikpapan antara lain:

- a. Faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi disertai tingkat urbanisasi yang tinggi yang tidak diimbangi dengan luasnya lapangan kerja yang tersedia;
- b. Belum optimalnya program magang untuk calon tenaga kerja;
- c. Masih ketatnya peraturan terkait ketenagakerjaan seperti kenaikan UMK setiap tahun atau pemberian pesangon membuat pelaku usaha lebih berorientasi melakukan investasi padat modal dibandingkan dengan padat karya.

Sama halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Timur pada Bulan Februari tahun 2020 yang mencapai angka 6,88 persen atau sekitar 137.189 orang. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 6,66 persen atau 126.529 orang. Rincian jumlah TPT untuk Pendidikan SMP ke bawah sebanyak 7,43 persen atau 72.322 orang, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 6,40 persen atau

58.515 orang, sedangkan TPT untuk Pendidikan sekolah menengah ke atas yaitu SMA sebesar 7,40 persen atau 55.452 orang, relatif sama dengan TPT tahun sebelumnya yang sebesar 7,38 persen atau 55.446 orang.

Dari data tersebut terungkap jika diukur berdasarkan jenjang pendidikan, tingkat pengangguran terbanyak berasal dari kalangan masyarakat yang berpendidikan terakhir di jenjang SMA. Jumlah pengangguran tersebut bisa mengalami lonjakan yang semakin tinggi seiring kondisi ekonomi global yang kelimpungan akibat pandemi Covid-19. Bahkan, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, jumlah pekerja yang terpaksa harus kehilangan mata pencahariannya imbas Covid-19 mencapai 9.475 orang. Sementara itu, merujuk publikasi BPS Kalimantan Timur Agustus 2020, pengangguran karena terdampak Covid-19 berjumlah 30,99 ribu orang, tidak bekerja karena Covid-19 berjumlah 21,20 ribu orang, dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 berjumlah 344,85 ribu orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebesar 9% dan menempati urutan tertinggi kedua setelah Kota Bontang. Menjadi tantangan berat untuk menurunkan TPT, namun dengan adanya kegiatan RDMP dan isu IKN diharapkan akan berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan. Pemerintah Kota harus mengoptimalkan kualitas tenaga kerja sehingga kesempatan kerja meningkat.

Berdasarkan kondisi ini, tingkat pengangguran terbuka kota Balikpapan perlu ditangani secara optimal. Hal ini sejalan dengan pencapaian TPB/SDGs terutama pencapaian pada tujuan 8 sasaran 3 “menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan” dan pencapaian tujuan 8 sasaran 5 yaitu “mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan”. Adapun target TPT yang dicantumkan dalam RPJMN yaitu 3,6-4,3 persen pada tahun 2024.

Selain Pengangguran, angka Kemiskinan di Kota Balikpapan juga mempengaruhi pembangunan dan pemerataan ekonomi. Angka kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memang mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun 2015 terdapat 2,91 persen atau sebanyak 17,89 ribu jiwa penduduk miskin, dan hingga tahun 2018 menjadi 17.008 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,64 persen. Kemudian pada puncaknya di tahun 2019 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 15,78 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,42 persen.

Sejalan adanya pandemi Covid-19 yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan menyebabkan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mendorong meningkatnya persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan yang menyebabkan angka kemiskinan di Kota Balikpapan meningkat 2,57 persen yaitu 17,02 ribu jiwa. Kondisi ini berpengaruh pada IPM Kota Balikpapan khususnya pada komponen pengeluaran perkapita penduduk (Rp. 14.549) yang lebih rendah dibandingkan Kota Bontang (Rp.16.278). Masih terdapat 17,02 ribu jiwa yang harus diupayakan untuk bisa keluar dari kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, meliputi:

- a. Angka migrasi penduduk ke Kota Balikpapan pada tahun 2019 sebanyak 19.044 orang, dan diperkirakan di tahun mendatang akan semakin meningkat dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini jika tidak diantisipasi secara seksama akan menimbulkan meningkatnya persoalan sosial, diantaranya kemiskinan;
- b. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Balikpapan yang tidak sekolah/tidak tamat SD sebesar 15,57%, tamat SD/SLTP sebesar 69,66%, dan tamat SLTA ke atas sebesar 14,77%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk miskin Kota Balikpapan hanya tamat SD/SLTP;
- c. Permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Keluarga Harapan (PKH);

- d. Pemberdayaan masyarakat miskin belum dilakukan secara tuntas, misalnya terjadi pada program pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat miskin;
- e. Penanganan kemiskinan belum dilakukan secara terintegrasi;
- f. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pihak terkait terhadap bantuan yang telah disalurkan.

Penanggulangan kemiskinan secara optimal perlu terus dilakukan, karena angka kemiskinan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan hal ini perlu dilakukan guna mendukung tercapainya TPB/SDGs terutama pencapaian tujuan ke-1 “Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun”, dan pencapaian tujuan ke-2 “Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan”. Selain itu, terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) maka Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN perlu melakukan antisipasi munculnya kantong-kantong kemiskinan baru di Balikpapan seiring meningkatnya jumlah penduduk di daerah ini.

6. Belum Optimalnya Peningkatan di Sektor Ekonomi yang Kreatif;

PDRB Kota Balikpapan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir meningkat dengan struktur perekonomian masih didominasi sektor industri pengolahan yaitu sebesar 47,28%. Sektor ini didominasi oleh industri pengolahan migas. Secara perlahan, Pemerintah Kota Balikpapan terus mengembangkan upaya peningkatan daya dukung sektor non migas selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi dalam transformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam fosil. Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang dalam struktur perekonomian dicerminkan peran sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Diharapkan terjadi peningkatan kontribusi dua sektor tersebut dalam struktur PDRB Kota Balikpapan. Sektor ini menjadi hal yang serius untuk dikembangkan karena untuk mencapai visi pembangunan kepariwisataan daerah dan telah ditetapkan melalui Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kota Balikpapan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 7 Tahun 2016. Sektor ini sudah

berkembang namun masih perlu dioptimalkan. Masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya sarana promosi dan informasi promosi yang belum optimal, kualitas sarana dan prasarana di pariwisata juga masih belum optimal, dan terakhir belum adanya kebijakan pengembangan ekonomi kreatif. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tentu memiliki dampak yang signifikan pada sektor ini dengan menurunnya jumlah wisatawan. Agenda event pariwisata dan budaya Kota Balikpapan juga masih belum konsisten. Selain itu perhatian untuk pertumbuhan ekonomi juga bisa dilakukan melalui berbagai sektor dan bidang seperti investasi, perdagangan, dan juga investasi.

b. visi dan misi kepala daerah;

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut;

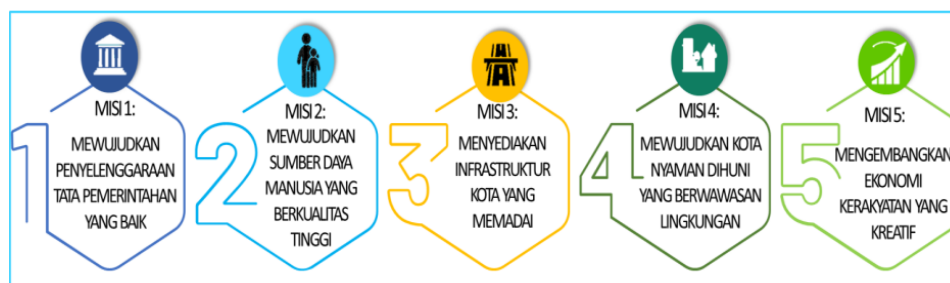
- a. Kota Balikpapan sebagai **Kota Terkemuka** dapat diartikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Balikpapan diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global dengan ditunjang oleh fasilitas penunjang perkotaan yang memadai. Kondisi kota juga semakin berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, dan udara). Rencana pengembangan pusat perekonomian baru dalam kawasan *Coastal Area*, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah, pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat,

pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan dan pengembangan infrastruktur strategis lainnya, ditunjang dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru diharapkan secara langsung berdampak pada perkembangan perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur;

- b. Kota Balikpapan Sebagai **Kota yang Nyaman Dihuni**, Kota Balikpapan akan terus memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan agar Kota Balikpapan semakin nyaman dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat beraktifitas bagi warganya;
- c. Kota Balikpapan sebagai Kota yang **Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman** adalah memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 serta dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.6
Misi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026



Sumber : Bappeda Litbang, diolah 2021

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;

Pada hakikatnya pemerintahan yang baik mencakup beberapa prinsip utama yakni: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, kesempatan yang sama, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi yang strategis. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan berbagai upaya dari seluruh pemangku kepentingan khususnya sektor pemerintah itu sendiri. Dalam konteks ini tidak hanya pemerintah, namun meliputi tiga domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM. Mewujudkan daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram dengan tetap memprioritaskan perbaikan yang signifikan dalam sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan berjalannya reformasi birokrasi;

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;

Pembangunan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, dimulai sejak individu berada pada usia dini sampai dengan usia produktif. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu diupayakan guna melahirkan dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mandiri, berdaya saing dan mengembangkan ekonomi lokal melalui kewirausahaan.

3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;

4. Infrastruktur adalah kelengkapan dasar fisik kota. Infrastruktur perkotaan meliputi, antara lain, sistem drainase atau pengendalian banjir, air bersih

atau air minum, persampahan, sanitasi atau limbah, jaringan jalan dan transportasi umum, listrik, gas, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan penting bagi masyarakat luas, kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur amat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari dan karenanya sangat penting bagi ekonomi perkotaan.

5. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;

Nyaman dihuni adalah kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman menandakan kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta berwawasan lingkungan.

Mewujudkan kota yang nyaman dihuni dan berwawasan lingkungan dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (*green city*) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (*zero waste*) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengolah sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Ekonomi kreatif adalah sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan jangka panjang. Industri kreatif ini dapat menjadi pilar utama dalam pembentukan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif ini sangatlah penting bagi Indonesia karena diyakini ekonomi kreatif akan memberikan dampak positif bagi kehidupan dan bernegara.

Industri kreatif perlu dikembangkan karena industri kreatif dapat memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan dan menciptakan iklim bisnis yang positif. Pengembangan ekonomi kreatif sejalan dengan tujuan dari ekonomi kerakyatan yang selama ini telah ada yaitu antara lain:

- a. Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan;
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan;
- c. Mendorong pemerataan pendapatan rakyat;
- d. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Guna memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, maka disusun agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahapan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

Gambar 1.7

Tahap Tema Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026



Sumber : Bappeda Litbang, diolah 2021

Pentahapan Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Sistem Kesehatan, Reformasi Birokrasi Dan Infrastruktur”** yang merupakan tema pembangunan yang mencakup

seluruh Pencapaian Misi Pembangunan untuk lima tahun kedepan dikarenakan di tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk Kota Balikpapan bangkit dari Pemulihan Pasca Covid-19. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada Penguatan Ke seluruh sektor Pembangunan Daerah yang terdampak Covid-19, terutama pada sistem kesehatan seperti peningkatan kualitas dan jaminan kepastian pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Balikpapan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Selain itu, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan tersebut, maka diperlukan strategi-strategi yang selanjutnya akan menjadi prioritas pembangunan Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil dari tahapan penyusunan Raperda RPJMD Kota Balikpapan yang dimulai dari konsultasi publik hingga Musrenbang RPJMD, maka dirumuskan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yakni:

Gambar 1.8

9 (Sembilan) prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022-2026



Sumber : Bappeda Litbang, diolah 2022

1. Penguatan Birokrasi Pemerintahan;

- a. Penguatan tekad birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas korupsi;
- b. Menumbuhkan "trust" yang tinggi dari masyarakat melalui:

- 1) Inspirasi "*trust*" di lingkungan Pemerintah Kota;
 - 2) Klarifikasi tentang tujuan organisasi;
 - 3) Penyelarasan sistem dan prosedur;
 - 4) Penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan:
- Bidang Kesehatan:
- a. Subsidi iuran BPJS bagi peserta PBU kelas 3;
 - b. Pembangunan Rumah Sakit di wilayah yang membutuhkan
- Bidang Pendidikan:
- a. Bantuan subsidi SPP untuk sekolah swasta SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. Peningkatan Insentif Guru dari PAUD, TK, SD dan SMP;
 - c. Pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah nyaman dihuni (baik sarprasnya, kualitas gurunya dan kualitas proses belajar mengajar);
 - d. Optimalisasi SKB (Sanggar Kegiatan Belajar).
3. Pengentasan Kemiskinan;
- a. Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). dan;
 - b. Bantuan Permodalan untuk UMKM.
4. Penyediaan Air Minum Yang Sehat Dan Merata;
- a. Akselerasi percepatan peningkatan penyediaan air baku dan mempermudah akses masyarakat dalam pemasangan air minum;
 - b. Peningkatan ketersediaan air baku yang saat ini di-supply dari waduk Manggar dan Teritip +/- 1200 liter/detik, sedangkan total kebutuhan adalah 2200 liter/detik. Kekurangan tersebut akan dipenuhi dari pembangunan embung aji raden dan supply dengan pipanisasi dari waduk Sepaku Semoi sebesar 2000 liter/detik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air baku Kota Balikpapan hingga beberapa tahun kedepan.
5. Pengendalian Banjir
- a. Percepatan penanganan DAS Sungai Ampal;
 - b. Percepatan pembangunan drainase di Balikpapan Timur;
 - c. Percepatan revitalisasi drainase di seluruh kota Balikpapan;
 - d. Percepatan pembangunan Bendali/ Bozem di lingkungan kawasan perumahan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kondisi Sosial Yang Nyaman
 - a. Mewujudkan Kota Layak Anak, Layak Difabel dan Layak Lansia;
 - b. Mewujudkan Kota Sehat, bebas Narkoba dan HIV/AIDS.;
 - c. Menghidupkan ritual keagamaan di seluruh lapisan masyarakat.
7. Pengembangan Balikpapan Sebagai Kota Mice Dan Wisata
 - a. Pembangunan pusat perdagangan dan perekonomian;
 - b. Penguatan City Branding Balikpapan;
 - c. Pusat Forum Pertemuan Wilayah, Nasional dan Internasional;
 - d. Kerjasama dengan seluruh organisasi profesi dan bisnis untuk penyelenggaraan MICE;
 - e. Pengembangan objek wisata;
 - f. Pengembangan wisata bahari di sepanjang pantai Balikpapan;
 - g. Pembangunan Kampung Budaya;
 - h. Penyediaan transportasi khusus ke daerah wisata, dan;
 - i. Peningkatan kualitas hotel dan restoran.
8. Pengembangan Balikpapan Sebagai Kota Kreatif
 - a. Penyelenggaraan Pekan Ekonomi Kreatif setiap tahun sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk kreatif;
 - b. Mendorong pemuda-pemuda Balikpapan masuk ke pengembangan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan dan aksi-aksi yang kreatif;
 - c. Membentuk Rumah Kreatif di tiap kecamatan se Kota Balikpapan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif dan UMKM;
 - d. Mengikuti event-event kreatif di luar daerah dan luar negeri.
9. Revitalisasi Perusda

Restrukturisasi organisasi dan aktivitas Perusda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.

Memperhatikan tingkat urgensi/ kepentingannya serta berdasarkan tahapan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.9
4 Prioritas Kota Balikpapan tahun 2022



Sumber : Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

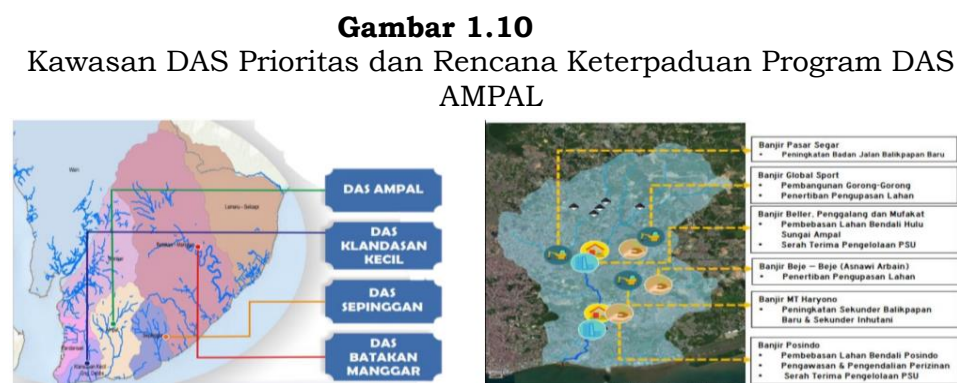
1. Penguatan Sistem Kesehatan Dan Pemerataan Akses Pendidikan
 - Penguatan Sistem Kesehatan
 - a. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui pemberian subsidi iuran BPJS bagi PBI dan Peserta Kelas III (PBU);
 - b. Pembangunan RSKB Sayang Ibu menjadi RSUD di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
 - c. Penyusunan Dokuen Rencana Pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Balikpapan Timur.
 - Pemerataan Akses Pendidikan
 - a. Pemberian subsidi uang sekolah (SPP) bagi siswa di sekolah swasta (SD dan SMP);
 - b. Pemberian subsidi uang gedung/ pangkal bagi siswa sekolah swasta kelas 1 SD dan kelas 7 SMP;
 - c. Pengadaan Perlengkapan Siswa bagi siswa sekolah negeri dan swasta (Kelas 1 SD dan Kelas 7 SMP);
 - d. Pembangunan unit sekolah baru pada lokasi/ wilayah dengan cakupan layanan pendidikan yang masih rendah serta memiliki jumlah persebara penduduk usia sekolah yang tinggi dengan menggunakan lahan yang dikuasai pemerintah kota dan fasilitas umum yang telah dihibahkan kepada pemerintah kota atau tanpa melakukan kegiatan pembebasan lahan (SD dan SMP)

Terpadu di Fasum Balikpapan Regency serta SMPN Kec. Balikpapan Barat di pemukiman atas air Margasari);

- e. Penambahan ruang kelas baru (RKB);
- f. Pengusulan kebutuhan tenaga pendidik;
- g. Peningkatan kualitas/ pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik sekolah negeri dan swasta.

2. Pengendalian Banjir

Pengendalian Banjir dilakukan dengan mengendalikan penyebab dan memberikan solusi dari permasalahan. Setelah diketahui penyebab dan permasalahan banjir, maka dapat diketahui langkah-langkah yang dapat diambil dalam menangani permasalahan tersebut. Pada Tahun 2022, Kota Balikpapan memiliki agenda untuk pembangunan Kawasan DAS Prioritas dan Rencana Keterpaduan Program DAS AMPAL, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



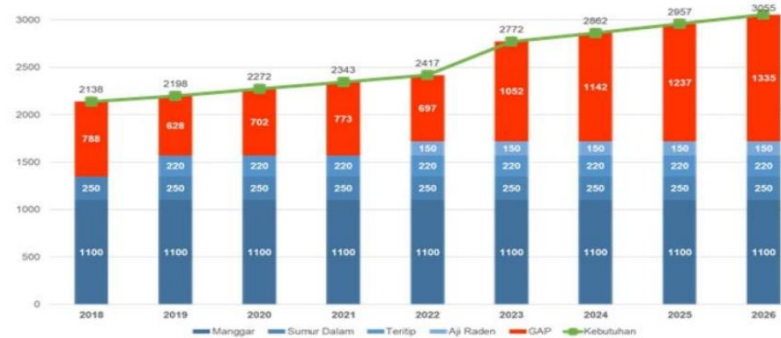
Sumber : Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

3. Pemenuhan Cakupan Layanan Air Minum

Perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kota Balikpapan, karena masih terdapat GAP antara data ketersediaan air baku dengan kebutuhan air baku oleh masyarakat Kota Balikpapan. Grafik berikut menunjukkan ketersediaan air baku serta kebutuhannya pada tahun 2018-2021 dan proyeksinya pada tahun 2022-2026.

Gambar 1.11

Ketersediaan Air Baku Serta Kebutuhannya Pada Tahun 2018-2021 Dan Proyeksinya Pada Tahun 2022-2026



Sumber : Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

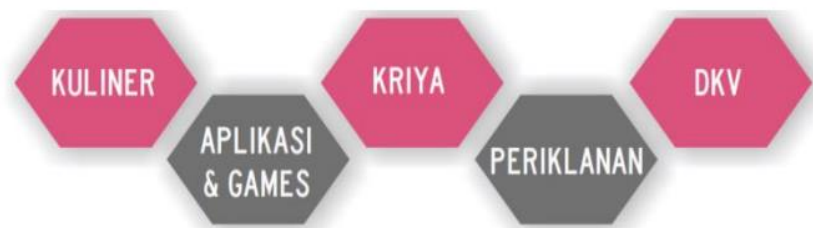
4. Balikpapan Kota Kreatif

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendorong Balikpapan menjadi Kota Kreatif antara lain:

- Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan dan Industri Kreatif;
- Melibatkan aktor ABCGM (Aktor ABCGM yang dimaksud adalah Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintahan, dan Media). Konsep integratif ini diterapkan melalui:

35 1.12

Konsep Penerapan Pelibatan Aktor ABCGM



Sumber : Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

- c. Mendorong Sub Sektor Prioritas yang mentrigger Ekonomi Berkelanjutan.

Gambar 1.13

Sub Sektor Prioritas Ekonomi di Kota Balikpapan



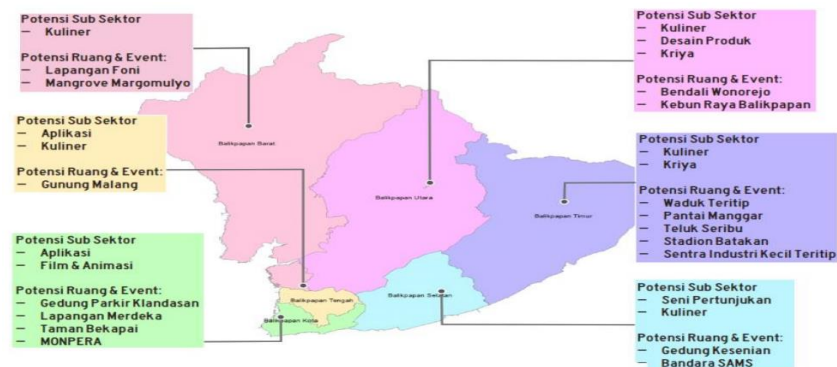
Sumber :Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

- d. Mengembangkan Potensi Ruang Kreatif

Pengembangan potensi ruang kreatif berdasarkan potensi wilayah pada masing-masing Kecamatan yang ditunjukkan pada peta berikut:

Gambar 1.14

Potensi Ruang Kreatif Berdasarkan Potensi Wilayah Per Kecamatan



Sumber : Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 memiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Kinerja yang menentukan program pembangunan daerah Kota Balikpapan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.9

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 0)	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Rpjmd
						2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	68,99	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58	75,58
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	79	80	81	82	83	83
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	24,21%	36,88%	41,42%	44,17%	44,74%	44,40%	44,40%
			Indeks SPBE	Poin	N/A	3.1	3.3	3.6	3.7	4.0	4.0
			Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
		Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,62	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84	0,84

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 0)	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Rpjmd
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	N/A	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7487	0,7500	0,7506	0,7512	0,7518	0,7524	0,7524
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8383	0,8385	0,8388	0,8391	0,8394	0,8397	0,8397
		Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5
		Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing dan Kepemudaan Keolahragaan	Poin	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,025
		Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4920	0,4960	0,4962	0,4964	0,4965	0,4975	0,4975
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	14,43%	17%	25%	35%	45%	60%	60%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 0)	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Rpjmd
						2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.	Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	77,8	78,2	78,78	79,12	79,55	80,02	80,02
			Persentase Permukiman Layak Huni	%	98,59%	99,05%	99,32%	99,55%	99,78%	100%	100%
MISI 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51	68,51
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89%	89,2%	89,4%	89,6%	89,8%	90%	90%
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	108	107	105	103	101	99	99
			Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,5601	0,8000	0,8267	0,8575	0,8675	0,8794	0,8794
MISI 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	3,09%	3,14%	3,17%	3,19%	3,33%	3,45%	3,45%
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9	9	8,46	8,22	7,98	7,74	7,74
			Tingkat Kemiskinan	%	2,57	2,42	2,39	2,38	2,37	2,36	2,36

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 0)	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Rpjmd
						2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3,018	3,330	3,530	3,780	4,080	4,440	4,440
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	87	87	88	89	90	90
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1,08	1,20	1,50	1,90	2,50	3,40	3,40
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	&	N/A	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,22%	3,22%
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-0,56%	3,50%	3,97%	4,00%	4,25%	5,00%	5,00%

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.10

Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	75.5
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	36,88%
		Indeks SPBE	3.1
		Maturitas SPIP	Level 3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	0,69
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,75
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8385
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10,5
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing dan Kepemudaan Keolahragaan	0,021
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,496
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	17%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	78,2
		Persentase Permukiman Layak Huni	99,05
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,15
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukan	89,20%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	107

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,8
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Presentase Pertumbuhan UMKM	3,14%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9
		Tingkat Kemiskinan	2,42
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,33
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,44
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	2,20%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	3,50%

Adapun program dan anggaran perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.11

Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
I	PROGRAM PRIORITAS		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33,177,715,150	Sekretariat Daerah
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	2,961,001,437	Sekretariat Daerah
3	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas I)	3,300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Prioritas I)	3,375,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	90,499,107,100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	32,358,305,800	Badan Pengelola Keuangan Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,054,684,300	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	271,900,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3,644,482,800	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	402,990,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Program Aplikasi Informatika	6,710,250,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Program Penyelenggaraan Pengawasan (Prioritas I)	611,878,250	Inspektorat
13	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Prioritas I)	443,112,912	Inspektorat
14	Program Kepegawaian Daerah (Prioritas I)	6,688,317,700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas I)	6,588,124,350	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Prioritas I)	766,721,033	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	30,594,448,150	Sekretariat DPRD
18	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	813,371,600	Kecamatan Balikpapan Barat
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5,069,130,550	Kecamatan Balikpapan Barat
20	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	269,986,200	Kecamatan Balikpapan Barat
21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	880,473,500	Kecamatan Balikpapan Selatan
22	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5,818,753,750	Kecamatan Balikpapan Selatan
23	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	350,987,800	Kecamatan Balikpapan Selatan
24	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2,021,861,900	Kecamatan Balikpapan Kota
25	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3,823,216,350	Kecamatan Balikpapan Kota

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
26	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	175,847,400	Kecamatan Balikpapan Kota
27	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	824,896,100	Kecamatan Balikpapan Timur
28	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3,883,916,650	Kecamatan Balikpapan Timur
29	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	169,865,300	Kecamatan Balikpapan Timur
30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	964,051,800	Kecamatan Balikpapan Utara
31	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5,604,648,300	Kecamatan Balikpapan Utara
32	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	361,673,400	Kecamatan Balikpapan Utara
33	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	819,255,550	Kecamatan Balikpapan Tengah
34	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4,853,656,190	Kecamatan Balikpapan Tengah
35	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	261,884,000	Kecamatan Balikpapan Tengah
36	Program Pelayanan Penanaman Modal	811,999,400	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
37	Program Pengelolaan Pendidikan (Prioritas II)	506,512,424,196	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38	Program Pengembangan Kurikulum	423,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas II)	249,611,440,892	Dinas Kesehatan, RSIA, RSUD
42	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,160,000,000	Dinas Kesehatan
43	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1,271,292,000	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
44	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5,366,090,244	Dinas Kesehatan
45	Program Pembinaan Perpustakaan	1,077,531,700	Dinas Perpustakaan dan Arsip
46	Program Pengelolaan Arsip	305,923,070	Dinas Perpustakaan dan Arsip
47	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	159,995,230	Dinas Perpustakaan dan Arsip
48	Program Perizinan Penggunaan Arsip	39,999,850	Dinas Perpustakaan dan Arsip
49	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6,324,990,000	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
50	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1,000,000,000	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
51	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	36,230,452,493	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
52	Program Pengembangan Kebudayaan	1,130,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2,250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
54	Program Pembinaan Sejarah	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
55	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1,220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	549,999,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
57	Program Perlindungan Perempuan	749,494,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
58	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
59	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	74,999,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
60	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	595,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
61	Program Perlindungan Khusus Anak	973,356,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
62	Program Administrasi Pemerintahan Desa	672,334,160	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
63	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	7,721,048,550	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
64	Program Pengendalian Penduduk	673,115,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
65	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,829,594,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
66	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3,430,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
67	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12,203,566,800	Dinas Pekerjaan Umum
68	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,749,736,000	Dinas Pekerjaan Umum
69	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Prioritas IV)	14,484,798,000	Dinas Pekerjaan Umum
70	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (Prioritas V)	1,550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
71	Program Penyelenggaraan Jalan (Prioritas V)	96,853,301,411	Dinas Pekerjaan Umum
72	Program Pengembangan Permukiman (Prioritas V)	224,884,140,780	Dinas Pekerjaan Umum
73	Program Penataan Bangunan Gedung (Prioritas V)	68,126,647,478	Dinas Pekerjaan Umum
74	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
75	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (Prioritas V)	163,447,483,060	Dinas Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
76	Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	58,835,976,150	Dinas Perhubungan
77	Program Pengelolaan Pelayaran	765,000,000	Dinas Perhubungan
78	Program Pengembangan Perumahan (Prioritas VI)	10,004,275,592	Dinas Perumahan dan Permukiman
79	Program Kawasan Permukiman (Prioritas VI)	1,544,632,273	Dinas Perumahan dan Permukiman
80	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Prioritas VI)	1,558,037,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
81	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Prioritas VI)	935,800,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
82	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	239,999,900	Dinas Sosial
83	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (Prioritas VI)	99,996,200	Dinas Lingkungan Hidup
84	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI) (Prioritas VI)	28,810,089,958	Dinas Lingkungan Hidup
85	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Prioritas VI)	119,999,700	Dinas Lingkungan Hidup
86	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Prioritas VI)	1,034,999,265	Dinas Lingkungan Hidup
87	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (Prioritas VI)	199,999,700	Dinas Lingkungan Hidup
88	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (Prioritas VI)	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
89	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (Prioritas VI)	105,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
90	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (Prioritas VI)	284,996,500	Dinas Lingkungan Hidup
91	Program Pengelolaan Persampahan (Prioritas VI)	88,296,554,996	Dinas Lingkungan Hidup
92	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4,221,312,700	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
93	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,264,562,800	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
94	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	30,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
95	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	310,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
96	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	64,700,692,290	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
97	Program Penanggulangan Bencana	1,497,265,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
98	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	7,634,862,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
99	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,703,994,500	Satuan Polisi Pamong Praja
100	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	794,996,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
101	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,708,210,142	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
102	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,806,024,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
103	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	1,017,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
104	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,925,986,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
105	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	268,125,250	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
106	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	404,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
107	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (Prioritas III)	6,506,719,600	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
108	Program Pengembangan UMKM (Prioritas III)	2,651,630,850	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
109	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	16,836,422,360	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
110	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	115,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
111	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	210,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
112	Program Perencanaan Tenaga Kerja (Prioritas III)	399,952,800	Dinas Ketenagakerjaan
113	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas III)	999,871,500	Dinas Ketenagakerjaan
114	Program Penempatan Tenaga Kerja (Prioritas III)	454,969,700	Dinas Ketenagakerjaan
115	Program Hubungan Industrial (Prioritas III)	514,995,620	Dinas Ketenagakerjaan
116	Program Pemberdayaan Sosial (Prioritas III)	1,083,199,700	Dinas Sosial
117	Program Rehabilitasi Sosial (Prioritas III)	1,521,655,895	Dinas Sosial
118	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas III)	1,449,000,000	Dinas Sosial
119	Program Penanganan Bencana (Prioritas III)	1,505,645,200	Dinas Sosial
120	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	425,761,300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
121	Program Promosi Penanaman Modal	664,995,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
122	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	713,127,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
123	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	570,484,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
124	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	474,300,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
125	Program Pengawasan Keamanan Pangan	239,050,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
126	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,195,300,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
127	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,124,376,400	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
128	Program Penyuluhan Pertanian	888,910,700	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
129	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	748,878,050	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
130	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,223,232,850	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
131	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	593,477,500	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
132	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Prioritas VII)	7,604,743,300	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
133	Program Pemasaran Pariwisata (Prioritas VI)	4,775,000,000	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
134	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Prioritas VIII)	200,000,000	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
135	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Prioritas VIII)	900,000,000	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
136	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	355,000,000	Dinas Perdagangan
137	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	12,931,131,950	Dinas Perdagangan
138	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	569,712,550	Dinas Perdagangan
139	Program Pengembangan Ekspor	60,000,000	Dinas Perdagangan
140	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	120,000,000	Dinas Perdagangan
141	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	519,191,632	Dinas Perdagangan
II	PROGRAM PENUNJANG		
142	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	355,735,233,473	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
143	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	196,198,833,487	Dinas Kesehatan, RSUD, RSIA
144	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30,990,961,000	Dinas Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
145	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	9,076,481,113	Dinas Perumahan dan Permukiman
146	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	32,497,058,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
147	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	26,638,836,996	Satuan Polisi Pamong Praja
148	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	8,388,087,650	Dinas Sosial
149	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	7,079,207,500	Dinas Ketenagakerjaan
150	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	8,923,876,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
151	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	9,991,300,200	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
152	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	17,097,187,893	Dinas Lingkungan Hidup
153	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	13,442,832,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
154	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	27,199,973,470	Dinas Perhubungan
155	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	6,045,674,300	Dinas Komunikasi dan Informatika
156	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	9,375,976,815	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
157	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	11,883,548,147	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
158	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	8,778,338,052	Dinas Perpustakaan dan Arsip
159	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	12,121,130,092	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
160	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	17,884,291,600	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
161	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	15,339,641,284	Dinas Perdagangan
162	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	13,974,919,638	Inspektorat
163	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	11,245,481,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
164	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	23,104,815,277	Badan Pengelola Keuangan Daerah
165	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	45,834,225,090	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
166	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	9,892,710,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
167	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	119,727,537,091	Sekretariat Daerah
168	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	87,118,852,321	Sekretariat DPRD
169	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	5,480,366,440	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
170	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	14,782,716,728	Kecamatan Balikpapan Barat
171	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	14,948,705,300	Kecamatan Balikpapan Kota
172	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	17,849,423,000	Kecamatan Balikpapan Selatan
173	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	12,658,549,600	Kecamatan Balikpapan Timur
174	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	15,330,938,600	Kecamatan Balikpapan Utara
175	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	15,268,849,346	Kecamatan Balikpapan Tengah
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM			3,273,129,855,262	

Sumber data : Bagian Organisasi, diolah 2022

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Kegiatan dan anggaran pendukung program kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.12

Kegiatan dan Anggaran di Pemerintah Kota Balikpapan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142,714,400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	351,877,541,873
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,741,225,600
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,003,872,000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969,879,600
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	227,208,031,388
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	229,310,966,208
8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22,288,261,600
9	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	27,705,165,000
10	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	423,500,000
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,300,000,000
12	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,000,000
13	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,000,000
14	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000
15	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	880,000,000
16	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
17	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,250,000,000
18	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	175,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
19	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100,000,000
20	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1,120,000,000
DINAS KESEHATAN		
21	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98,638,937,607
22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,614,848,000
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,183,744,540
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,593,560,000
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,950,000,000
26	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	57,468,159,093
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190,583,501,799
28	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1,139,780,000
29	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	420,000,000
30	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	275,000,000
31	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	135,000,000
32	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750,000,000
33	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	375,000,000
34	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	250,000,000
35	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	304,140,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
36	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50,000,000
37	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	50,000,000
38	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	242,152,000
39	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,195,584,000
40	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,920,506,244
41	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000
42	Peningkatan Pelayanan BLUD	87,217,743,340
43	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,212,933,000
44	Administrasi Umum Perangkat Daerah	999,998,000
DINAS PEKERJAAN UMUM		
45	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,970,000,000
46	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15,705,000,000
47	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,749,736,000
48	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	163,447,483,060
49	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	14,484,798,000
50	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12,203,566,800
51	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1,550,000,000
52	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,103,030,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
53	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	68,126,647,478
54	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	224,884,140,780
55	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	96,853,301,411
56	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	650,000,000
57	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
58	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4,221,312,700
59	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	315,844,500
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	674,673,300
61	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	274,045,000
62	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,520,409,000
63	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250,000,000
64	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,473,498,400
65	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600,000,000
66	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709,671,300
67	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437,721,500
68	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000
69	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64,700,692,290
70	Penerbitan Izin Membuka Tanah	310,000,000
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
71	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,430,811,045
72	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664,781,900
73	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295,441,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
74	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	964,966,668
75	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720,480,500
76	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1,000,000,000
77	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	150,000,000
78	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	7,633,195,392
79	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1,221,080,200
80	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	50,000,000
81	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	88,650,000
82	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1,405,982,273
83	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1,558,037,500
84	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	935,800,000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
85	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000
86	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,108,691,000
87	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,100,000,000
88	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,458,971,600
89	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,064,900,000
90	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554,996,000
91	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,199,500,000
92	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	350,000,000
93	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	665,000,000
94	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	232,265,000
95	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	250,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
96	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,853,987,000
97	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	50,000,000
98	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	281,000,000
99	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	449,875,000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23,746,665,000
101	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160,000,000
102	Administrasi Umum Perangkat Daerah	564,254,105
103	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19,854,000
104	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599,924,396
105	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,548,139,495
106	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,590,002,300
107	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	99,992,200
108	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	14,000,000
DINAS SOSIAL		
109	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,007,044,000
110	Administrasi Umum Perangkat Daerah	837,989,850
111	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,121,053,800
112	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422,000,000
113	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	443,999,750
114	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	639,199,950
115	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	661,656,861
116	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	859,999,034
117	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,449,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
118	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1,144,600,000
119	Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	361,045,200
120	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	239,999,900
DINAS KETENAGAKERJAAN		
121	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000
122	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,591,537,000
123	Administrasi Umum Perangkat Daerah	777,050,800
124	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199,170,000
125	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181,449,700
126	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315,000,000
127	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	399,952,800
128	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	949,973,000
129	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	49,898,500
130	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-
131	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	264,974,700
132	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	139,995,000
133	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
134	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
135	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000
136	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	474,995,620
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
137	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,729,661,000
138	Administrasi Umum Perangkat Daerah	733,759,900
139	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500,000,000
140	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475,455,600
141	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
142	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	349,999,700
143	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	199,999,900
144	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	325,450,000
145	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	349,044,000
146	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000
147	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600,000,000
148	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74,999,800
149	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	395,000,000
150	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000
151	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000
152	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	671,050,000
153	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102,306,000
154	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	672,334,160
155	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,721,048,550
156	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	673,115,000
157	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	354,115,000
158	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	369,960,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
159	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,418,965,600
160	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	686,553,400
161	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3,430,200,000
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
162	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,597,296,000
163	Administrasi Umum Perangkat Daerah	766,567,600
164	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,010,423,000
165	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,510,005,000
166	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	250,000,000
167	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	224,300,000
168	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	239,050,000
169	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	825,300,000
170	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	370,000,000
171	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	149,380,000
172	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	974,996,400
173	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	624,993,050
174	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	123,885,000
175	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	373,477,500
176	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
177	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	170,000,000
178	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	888,910,700
179	Pembangunan Prasarana Pertanian	1,223,232,850
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
180	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,372,410,893

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
181	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,589,000,000
182	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,500,000
183	Administrasi Umum Perangkat Daerah	804,822,000
184	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217,390,000
185	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,798,420,000
186	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,277,645,000
187	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	99,996,200
188	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	119,999,700
189	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	814,999,850
190	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	99,999,715
191	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	28,810,089,958
192	Penyimpanan Sementara Limbah B3	50,000,000
193	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105,000,000
194	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	284,996,500
195	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199,999,700
196	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	119,999,700
197	Pengelolaan Sampah	88,296,554,996
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
198	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,854,723,000
199	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,877,917,700
200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,120,467,200
201	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589,725,000
202	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	424,721,033

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
203	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	342,000,000
DINAS PERHUBUNGAN		
204	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,726,582,220
205	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200,000,000
206	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	719,995,000
207	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,210,992,500
208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,274,289,750
209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,068,114,000
210	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	44,194,157,900
211	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	150,000,000
212	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4,364,750,000
213	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3,797,993,200
214	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	800,000,000
215	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2,754,312,650
216	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,674,762,500
217	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,999,900
218	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
219	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	700,000,000
220	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	65,000,000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
221	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,001,536,000
222	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000
223	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,260,000
224	Administrasi Umum Perangkat Daerah	387,968,900
225	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,010,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
226	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255,142,000
227	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313,757,400
228	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,644,482,800
229	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,258,000,000
230	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,452,250,000
231	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	271,900,000
232	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	402,990,000
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		
233	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,513,621,815
234	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,092,355,000
235	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,090,000,000
236	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680,000,000
237	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	268,125,250
238	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	202,100,000
239	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	202,100,000
240	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	6,506,719,600
241	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2,651,630,850
242	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15,526,025,173
243	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	115,000,000
244	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	210,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
245	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,310,397,187
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU		
246	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,957,468,147
247	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,057,119,400
248	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,344,920,500
249	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524,040,100
250	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	148,310,800
251	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	277,450,500
252	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	664,995,000
253	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	811,999,400
254	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	713,127,200
255	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570,484,500
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
256	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,512,833,092
257	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,885,097,000
258	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,642,000,000
259	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,081,200,000
260	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4,824,990,000
261	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,500,000,000
262	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21,640,909,993
263	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5,700,000,000
264	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	8,889,542,500
265	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,000,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
266	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5,480,000,000
267	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	55,747,000
268	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000
269	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4,775,000,000
270	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000
271	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	900,000,000
272	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,918,996,300
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
273	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54,711,400
274	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,574,041,300
275	Administrasi Umum Perangkat Daerah	968,006,552
276	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,301,578,800
277	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880,000,000
278	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	837,203,300
279	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	240,328,400
280	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	209,924,150
281	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	49,999,220
282	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	45,999,700
283	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	39,995,480
284	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	19,999,750
285	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	50,000,000
286	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	50,000,000
287	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	39,999,850

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
DINAS PERDAGANGAN		
288	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,090,826,984
289	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,122,281,900
290	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250,000,000
291	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,947,512,400
292	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	929,020,000
293	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	185,000,000
294	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	170,000,000
295	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6,890,397,750
296	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	6,040,734,200
297	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	232,823,450
298	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	336,889,100
299	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000
300	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	519,191,632
301	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	120,000,000
SEKRETARIAT DAERAH		
302	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116,000,000
303	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,108,943,851
304	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,096,500,000
305	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37,936,329,000
306	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,153,500,000
307	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,310,000,000
308	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,865,000,000
309	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,421,601,940

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
310	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	2,100,000,000
311	Penataan Organisasi	762,288,800
312	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1,857,373,500
313	Administrasi Tata Pemerintahan	16,962,932,300
314	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11,723,329,900
315	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,806,704,050
316	Fasilitasi Kerjasama Daerah	2,684,748,900
317	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	905,018,600
318	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,128,632,837
319	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	927,350,000
SEKRETARIAT DPRD		
320	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,446,070,100
321	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	444,480,000
322	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33,030,531,496
323	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	697,200,000
324	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,956,743,725
325	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,046,000,000
326	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34,547,827,000
327	Layanan Administrasi DPRD	3,950,000,000
328	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7,350,329,750
329	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2,582,474,250
330	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2,695,408,300
331	Peningkatan Kapasitas DPRD	8,485,377,050
332	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4,049,999,800
333	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	976,914,500
334	Fasilitasi Tugas DPRD	4,453,944,500
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
335	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,064,731,000
336	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,885,750,000
337	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585,000,000
338	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710,000,000
339	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	970,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
340	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,450,000,000
341	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	880,000,000
342	Pengelolaan Barang Milik Daerah	26,588,600,000
343	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	500,000,000
344	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	450,000,000
345	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,650,000,000
346	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	775,000,000
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
347	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42,253,227,290
348	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,718,231,900
349	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109,000,000
350	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,017,255,900
351	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	736,510,000
352	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5,054,684,300
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
353	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199,997,700
354	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,270,648,377
355	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	49,999,900
356	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	275,000,000
357	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,282,198,400
358	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	928,500,000
359	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743,470,900
360	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,355,000,000
361	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3,392,238,300
362	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,984,900,000
363	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2,677,179,800
364	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	80,564,189,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
365	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1,880,600,000
366	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5,769,705,800
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
367	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,467,336,600
368	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,900,000
369	Administrasi Umum Perangkat Daerah	889,027,600
370	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164,328,000
371	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326,117,800
372	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2,541,437,750
373	Mutasi dan Promosi ASN	1,751,794,450
374	Pengembangan Kompetensi ASN	1,762,957,550
375	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	632,127,950
376	Pengembangan Kompetensi Teknis	2,273,784,700
377	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4,314,339,650
INSPEKTORAT DAERAH		
378	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,880,936,400
379	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,425,000,000
380	Administrasi Umum Perangkat Daerah	884,434,338
381	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749,548,900
382	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,035,000,000
383	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	488,150,000
384	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	123,728,250
385	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	56,225,000
386	Pendampingan dan Asistensi	386,887,912
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT		
387	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,853,685,000
388	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,383,365,100
389	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,049,290,550
390	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	741,401,000
391	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	269,986,200

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
392	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	64,987,400
393	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3,019,840,000
394	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	676,440,480
395	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68,800,000
396	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,800,426,148
397	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6,983,200
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH		
398	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,551,957,000
399	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,374,076,000
400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	225,000,000
401	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,132,775,400
402	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985,040,946
403	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	680,305,600
404	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	58,950,000
405	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	79,999,950
406	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,070,471,450
407	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3,783,184,740
408	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	261,884,000
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA		
409	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,998,000
410	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,873,389,000
411	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,676,730,900
412	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170,000,000
413	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,220,804,400

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
414	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	987,783,000
415	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,906,862,000
416	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	24,999,900
417	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90,000,000
418	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,103,262,300
419	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,719,954,050
420	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	175,847,400
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA		
421	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,706,355,350
422	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,239,783,000
423	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,474,862,100
424	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909,938,150
425	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	810,661,300
426	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	55,620,000
427	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	97,770,500
428	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,399,970,350
429	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4,204,677,950
430	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	361,673,400
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		
431	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
432	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,327,854,000
433	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77,500,000
434	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,846,233,000
435	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,000,000
436	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,359,536,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
437	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,038,300,000
438	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	766,500,000
439	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	35,988,300
440	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	77,985,200
441	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,256,313,000
442	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3,562,440,750
443	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	350,987,800
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
444	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,438,891,400
445	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,375,714,200
446	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,908,294,000
447	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935,650,000
448	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	693,948,300
449	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20,947,800
450	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	110,000,000
451	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,200,715,650
452	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,638,202,300
453	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	169,865,300
454	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44,998,700
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
455	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,661,798,000
456	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,545,000
457	Administrasi Umum Perangkat Daerah	956,438,440
458	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251,635,000
459	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596,950,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
460	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	794,996,250
461	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,708,210,142
462	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,806,024,800
463	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1,017,000,000
464	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1,925,986,100
Jumlah Anggaran Kegiatan		3,273,129,855,262

Sumber data : Bagian Organisasi, diolah 2022

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Balikpapan memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal DI kota Balikpapan telah sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri no 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal, dimana hal tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah kota Balikpapan tahun 2022.

a. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kota Balikpapan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			(lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	
			2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	
			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			menyelenggarakan pendidikan inklusif	
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			belas) tahun yang tidak bersekolah	
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar / lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			guru penggerak sebagai kepala sekolah	
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Kesetaraan Pendidikan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar / lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			guru penggerak sebagai pengawas sekolah	
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

b. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

c. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20 Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21 Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah KOTA/Kota	Dokumen
			2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			8 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari
			11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
			12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

d. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program KOTA/Kota	Dokumen
			2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program KOTA/Kota	Dokumen
			6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KOTA/Kota	Dokumen
			3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

e. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat KOTA/Kota	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Wali Kota	1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan WALIKOTA/Wali Kota	Laporan
			2 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan WALIKOTA/Wali Kota	Laporan
			3 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan WALIKOTA/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota	1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana KOTA/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana KOTA/Kota	Orang
			3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen
			6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
			7 Penanganan Pasca Bencana KOTA/Kota	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana KOTA/Kota	Orang
			9 Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
			10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang
			11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2 Respon Cepat Darurat Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana KOTA/Kota	Orang
			4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KOTA/Kota	Orang
			5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
			6 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			2 Penguatan Kelembagaan Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			3 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
			6 Penanganan Pasca Bencana KOTA/Kota	Dokumen
3Z	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah KOTA/Kota	Dokumen
			2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah KOTA/Kota	Dokumen
			3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah KOTA/Kota	Dokumen
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

f. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang



BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro.

Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Indikator Kinerja Tahun 2021	Indikator Kinerja Tahun 2022	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	80.71	81.13	0.52
2	Angka Kemiskinan	2.89	2.45	-15.225
3	Angka Pengangguran	8.94	6.9	-22.819
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.56	4.94	8.333
5	Pendapatan Perkapita	160.2	180.96	12.959
6	Ketimpangan Pendapatan	0.325	0.334	2.769

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan. Tahun 2022

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Kota Balikpapan dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk melihat capaian kinerja Kunci Luaran dapat dilihat di lampiran 1 (satu) dan untuk Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan kota Balikpapan dapat kita lihat dalam table sebagai berikut:

2.2.1 Indikator Kinerja Luaran

Rincian Capaian kinerja Kunci Luaran dapat dilihat pada lampiran 1 (satu) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	21.637	81,84%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	26.437		Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	85.509	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kota bersangkutan	85.509		Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	47.258	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	47.258		Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	4.861	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	4.861	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan		
	KESEHATAN	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	1.644	2.26%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah penduduk di kabupaten/kota	727.665		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	10	66,67%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah RS di kabupaten/kota	15		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.825	98,64%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	10.974		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	10.072	96,15%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			elayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	10.475		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	9.976	100,00%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	9.976		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	48.918	99,16%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah balita di kabupaten/kota	49.334		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	56.791	100,00%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	56.791		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	337.682	76,72%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	440.139		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	37.288	60,46%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	61.672		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	132.970	75,63%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	175.805		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	17.263	100,00%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	17.263		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	611	85,94%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	711		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	12.361	86,12%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	14.354		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	15.686	88,44%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota	17.736		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	3.246,92	47,83%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	6.788		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	458,42	3,95%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	11.618,31		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasi dan pelihara (ha)	43,38	22,25%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
				luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	195		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	142.228	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	142.228		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	19.253	9.50%	DPMPTs Kota Balikpapan
				Jumlah rumah di kabupaten/ kota	202.539		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
		6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	125	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
				Jumlah IMB yang berlaku	125		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	378,28	75.48%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	501,18		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analisis	121	58.74%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	206		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	889	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
				jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	889		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
		PERUMAHAN	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	1	100,00%	BPBD Kota Balikpapan
					jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	1		BPBD Kota Balikpapan
			2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang	1	100.00%	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni			
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	1		Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kota Balikpapan
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	12.82	49.1%	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kota Balikpapan
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	26.11		Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kota Balikpapan
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	517	0,26%	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kota Balikpapan
				Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	202.539		Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kota Balikpapan
				Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	138	100.00%	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Jumlah unit perumahan kabupaten/kota	138		Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kota Balikpapan
	TRANTIBUMLINMAS	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	3.780	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	3.780		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	48	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	48		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	24.516	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	24.516		Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.516	70.32%	Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	5000		Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	762	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	762		Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan
		6	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	46	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	46		
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	6.57 Menit	6.57 menit	Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.236	36.38%	Dinas Sosial Kota Balikpapan
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	3.397		Dinas Sosial Kota Balikpapan
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	14.793	100.09%	Dinas Sosial Kota Balikpapan
				populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	14.779		Dinas Sosial Kota Balikpapan
C.	KETENAGAKERJAAN	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	9	56,25%	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	16		Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
		2	Persentase Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	1.463	1.41%	Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	103.969		n Kota Balikpapan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	91.104	87,63%	Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2022
				Jumlah tenaga kerja	103.969		Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	92	48.68%	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
					Jumlah perusahaan		189
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	1.630	43,55%	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
					Jumlah pencari kerja yang terdaftar		3.743

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja Operasi dan Modal APBD	754.032.732.518	23.40%	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kota Balikpapan
				Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	3.223.0184.591,98		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	58	64,44%	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kota Balikpapan
				Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)	90		Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kota Balikpapan
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	74	20.80%	Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan keluarga

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			penduduk perempuan)				berencana Kota Balikpapan
				Jumlah penduduk perempuan	355.888		Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan
	PANGAN	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	35.788	59.94%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
				Jumlah kebutuhan pangan	59.703		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
	PERTANAHAN	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	2.741.627,85	100,00%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
				seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	2.741.627,85		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	31,6	22.25%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	142		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	15.291	0.59%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
				Luas izin lokasi yang diterbitkan	2.741.627,85		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	1	100.00%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
				Jumlah pemerima tanah obyek landreform	1		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	3.254.137	80,00%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
				luas izin membuka tanah yang diterbitkan	4.067.671		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	10	100,00%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	10		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
	LINGKUNGAN HIDUP	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	50	63.96%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
				Indeks Kualitas Udara	84		Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
				Indeks Tutupan Hutan	50		Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	110	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
				Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	110		Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota	186.187	99,10%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	187.875		Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
	ADMINDUKCAPIL	1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	476.159	91,63%	Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan
Jumlah penduduk wajib KTP-eletronik				519.663	Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan		
2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	137.689	66,20%	Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan	
			Jumlah anak usia 0-17 tahun	208.002		Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan	
3		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	219.297	99,58%	Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan	
			Jumlah anak usia 0-18 tahun	220.225		Dinas kependudukan dan catatan	

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
							sipil Kota Balikpapan
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	9	100.00%	Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan
			Jumlah OPD		9		Bagian Organisasi Kota Balikpapan
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1	100.00%	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
				Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	1		Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1	100.00%	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
				Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	1		Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	2,06		Dinas DP3AKB Kota Balikpapan

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	52.173	57,59%	Dinas DP3AKB Kota Balikpapan	
				Jumlah pasangan usia subur	90.589		Dinas DP3AKB Kota Balikpapan	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	27.695	30,57%	Dinas DP3AKB Kota Balikpapan	
				Jumlah Pasangan Usia Subur	90.589		Dinas DP3AKB Kota Balikpapan	
		PERHUBUNGAN	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	bobot angkutan jalan (IK1)	1	0.52%	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
					bobot angkutan sungai,danau, dan penyeberangan (IK2)	1		Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,51	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan			
KOMINFO	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	34	100,00%	Dinas Komunikasi dan informatika Kota Balikpapan		
			Jumlah OPD	34		Bagian Organisasi Kota Balikpapan		

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	14	53,85%	Dinas Komunikasi dan informatika Kota Balikpapan	
				Jumlah layanan publik	26		Dinas Komunikasi dan informatika Kota Balikpapan	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	472.982	65,00%	Dinas Komunikasi dan informatika Kota Balikpapan	
				Jumlah penduduk	727.665		Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan	
		KOPERASI DAN UKM	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	87	19,20%	dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
					Jumlah seluruh koperasi	453		dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
2	Meningkatnya Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	13.905	22,81%	dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah		

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			yang menjadi wirausaha				dan Perindustrian
				Jumlah usaha mikro keseluruhan	60.959		dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
	PENANAMAN MODAL	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	(Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2022	15.426.499.543.265	-21,27%	dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
				Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2021	19.593.504.460.000		dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	334	0,19%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	176.276		Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	1.445	8.20%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	176.276		Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	EMAS	153	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
					PERAK	178	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
					PERUNGGU	212	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	STATISTIK	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	34	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Jumlah OPD				34	bagian Organisasi Kota Balikpapan		
2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	34	100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
			Jumlah OPD	34			bagian Organisasi Kota Balikpapan
	PERSANDIAN	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	0	Belum adanya pengukuran area keamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Jumlah area penilaian				1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan		

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	BUDAYA	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	44	34,11%	dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Balikpapan
				Jumlah cagar budaya yang terdata	129		
	PERPUSTAKAAN	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	42	Berdasarkan Hasil Kajian Konsultan TGM 42,28	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	55.64	Berdasarkan Hasil Kajian sesuai Data dukung terlampir	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	KEARSIPAN	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	1	42,00%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	49.19%		Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-		Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	18.52%		Dinas Perpustakaan dan Arsip
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100%	17,00%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	-		Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	-		Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	-		Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	-		Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	-		Dinas Perpustakaan dan Arsip
D.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	4799,544	106,92%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
				Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	4.489		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
	PARIWISATA	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	(5.754)	-32,96%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
		Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021		17.458	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan		

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	316.223	22,00%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
				Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021	1.431.862		Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
		3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	732.540	31,67%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
				Jumlah kamar yang tersedia	2.312.758		Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	15.890,23 dalam harga Miliar	12.48%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan
Total PBRB harga berlaku	127.325,67 dalam harga Miliar			berdasarkan PDRB ADHB sektor Transportasi dan Pegudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata	187.671.461.274	23.133%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Total realisasi PAD	811.255.755.826.56		Kota Balikpapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
	PERTANIAN	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	246.8	391.75%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
Luas Panen				63	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan		
2		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2021	578	-41.87%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	
			Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2020	820		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	
	ESDM	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	1	Kota Balikpapan belum memiliki potensi panas bumi baik langsung dan tidak langsung berdasarkan data umum	Bagian Ekonomi Sekda Kota Balikpapan
Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi				1			

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
						potensi panas bumi dari Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
	PERDAGANGAN	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	366	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan
Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota				366	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan		
2		Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	723.280	11,60%	Dinas Perdagangan an Kota Balikpapan	
			Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	6.235.086		Dinas Perdagangan an Kota Balikpapan	

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	3.103	68,96%	DinasPerdagangan Kota Balikpapan
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	4.500		DinasPerdagangan Kota Balikpapan
	PERINDUSTRIAN	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2022- Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021)	42	4,61%	dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan
				Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021	912		
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100.00%	dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	63	6,60%	dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan
			Jumlah izin yang dikeluarkan	954			

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	Tidak ada izin yang dikeluarkan	dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan
				Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	Tidak ada izin yang dikeluarkan	dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan
				Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	48 PERUSAHAAN		dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan
				Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	0 PERUSAHAAN		
				Informasi produksi dan kapasitas produksi	9.364.136.759.333		

No	Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Informasi bahan baku dan bahan penolong	26.909.534.024		
				Informasi bahan bakar/ energy listrik (PLN)	43.376.388.683		
				Informasi bahan bakar/ energy listrikNon (PLN)	43.376.383.683		
				Informasi bahan bakar/ energy	406.617.909		
				Informasi tenaga kerja	4.393		

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kota Balikpapan Tahun 2022

Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Penunjang)	Rumus	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	338.525.459.467	12.33%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
			Jumlah APBD	2.745.398.221.161		
	2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD	811.255.755.825,56	28,28%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
			Jumlah Pe pendapatan Pada APBD	2.869.130.120.905,7		

Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Penunjang)	Rumus	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL 3		Inspektorat Kota Balikpapan
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP	LEVEL 3		Inspektorat Kota Balikpapan
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan	1.949.451.594.725,88	65.39%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
Transfer expenditures			154.173.633.086,37			
jumlah belanja APBD			2.745.398.221.161			
	6	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020	WTP		Inspektorat Kota Balikpapan
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019	WTP		Inspektorat Kota Balikpapan
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018	WTP		Inspektorat Kota Balikpapan
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017	WTP		Inspektorat Kota Balikpapan

Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Penunjang)	Rumus	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016	WTP		Inspektorat Kota Balikpapan
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015	WTP		Inspektorat Kota Balikpapan
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014	WTP		Inspektorat Kota Balikpapan
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013	WTP		Inspektorat Kota Balikpapan
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012	WTP		Inspektorat Kota Balikpapan
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011	WTP		Inspektorat Kota Balikpapan
Pengadaan	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani	0	0,00%	Bagian Administrasi Pembangunan

Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Penunjang)	Rumus	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		ditandatangani pada kuartal pertama	pada kuartal pertama tahun 2020			Setda Kota Balikpapan
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2020	17.019		
	8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	633.299.034.110	31,27%	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Balikpapan
			Jumlah keseluruhan pengadaan baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif	2.025.524.982.144		
	9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	2.569.450.737.290	79,72%	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Balikpapan
			Total belanja langsung	3.223.018.459.198		

Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Penunjang)	Rumus	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	10	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	1.124.489.985.266	1862,87%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kota Balikpapan
			Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	60.363.379.454		
Kepegawwaan	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	1.097	51,92%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Day Manusia Kota Balikpapan
			Jumlah seluruh pegawai	2.113		
	12	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	426	20,16%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Penunjang)	Rumus	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.113		Sumber Day Manusia Kota Balikpapan
	13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	253	59,39%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Day Manusia Kota Balikpapan
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	426		
Manajemen Keuangan	14	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja	2.375.021.817.795,3	8.73%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
			Total Belanja APBD	2.602.156.718.300		
	15	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi	755.062.500.914.79	11.17%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
			Total PAD dalam APBD	849.999.999.999		
	16	Assets Management	Total Assets Management			Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
			1. Apakah ada daftar asset Tetap? (Ya/Tidak)	Ya		
2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset Tetap? (Ya/Tidak)			Tidak			

Urusan	No	Indikator Kinerja Kunci (Penunjang)	Rumus	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya		
			4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya		
	17	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA Total belanja anggaran tahun sebelumnya	657.593.941.027,91 2.375.021.817.795	27,69%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
Transparansi dan Partisipasi Publik	18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	2.776.871.908	90.67%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	3.062.610.000		
	19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di wensite pemda Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12 12	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Pada sub bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja sasaran strategis instansi pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022.

2.3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengukur capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 maka dalam memberikan penilaian dilakukan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Table 2.4

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Adapun capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui bahwa perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022, telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tahun berkenaan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 serta dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2022. Target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2.5
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	75.5
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	79
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	36.88%
		Indeks SPBE	Poin	3.1
		Maturitas SPIP	Level	Level 3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.69
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82.50
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.75
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8385
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	10.5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.021
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.496
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	17%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	78.2
		Persentase Permukiman Layak Huni	%	99.05%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68.15
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89.20%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	107
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	3.14%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9
		Tingkat Kemiskinan	%	2.42

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3.33
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1.44
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2.20%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	3.50%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2022

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2.6

Pengukuran Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	75.5	69.50	92.05%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	79	76.5512*	96.90%
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	36.88%	28.93%	78.44%
		Indeks SPBE	Poin	3.1	3.05	98.39%
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.69	0.65	94.20%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82.50	85.24	103.32%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.75	0.759	101.20%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8385	0.843	100.54%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	10.5	55.64	529.90%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.021	0.064	304.76%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.496	0.464	93.55%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	17%	23.04%	135.53%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	78.2	77.63	99.27%
		Persentase Permukiman Layak Huni	%	99.05%	99.07%	100.02%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68.15	63.96	93.85%
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89.20%	89.74%	101%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	107	110	97.27%
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8	0.8	100%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	3.14%	29.55%	941.08%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9	6.9	130.43%
		Tingkat Kemiskinan	%	2.42	2.45	98.78%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3.33	15.426	463.26%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	86.1	98.97%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1.44	1.729	120.07%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2.20%	28.46%	1293.64%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	3.50%	5.29%*	151.14%

*Catatan: *angka sementara/ angka belum dirilis*

Sumber data: Bagian Organisasi, diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa dari 18 sasaran strategis yang mencakup 27 indikator kinerja, maka 26 indikator kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2022 memperoleh capaian di atas 90,01% dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Sedangkan 1 indikator kinerja yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah memperoleh capaian sebesar 78.44% dengan kriteria “Tinggi”.

Adapun secara keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 dari setiap indikator kinerja mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 215,45% dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Dengan demikian maka secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Table 2.7
Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	68.99	69.50	92.05%								
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	76.5512 *	96.90%								
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	24.21%	28.93%	78.44%								
		Indeks SPBE	Poin	N/A	3.05	98.39%								
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%								
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.62	0.65	94.20%								
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	N/A	85.24	103.32 %								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7487	0.759	101.20 %								
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8383	0.843	100.54 %								
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	55.64	529.90 %								
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.02	0.064	304.76 %								
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.492	0.464	93.55%								
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	14.43%	23.04%	135.53 %								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Pengarustamaan Gender													
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	77.8	77.63	99.27%								
		Persentase Permukiman Layak Huni	%	98.59%	99.07%	100.02%								
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68.07	63.96	93.85%								
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89%	89,74%	101%								
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	108	110	97.27%								
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.5601	0.8	100%								
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	3.09%	29.55%	941.08%								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9	6.9	130.43 %								
		Tingkat Kemiskinan	%	2.57	2.45	98.78%								
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3.018	15.426	463.26 %								
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	86.1	98.97%								
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1.08	1.729	120.07 %								
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	N/A	28.46%	1293.64 %								
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor	Persentase Pertumbuhan	%	-0.56%	5.29%*	151.14 %								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Unggulan Daerah	PDRB Sektor Perdagangan												

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis

Sumber data : Bagian Organisasi, diolah 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa penurunan atau peningkatan realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tidak dapat dijelaskan, karena indikator pada tahun 2021 berbeda dengan indikator sasaran pada tahun 2022 serta tahun ini juga merupakan tahun pertama realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, sehingga indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun beberapa realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja di atas jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan dapat diketahui bahwa 5 indikator kinerja baru diukur tahun 2022, 1 indikator kinerja tetap, 17 indikator kinerja mengalami peningkatan realisasi, sedangkan 4 indikator kinerja mengalami penurunan realisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

- a. Nilai SAKIP Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan nilai SAKIP sebesar 69,50 poin mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,51 poin jika dibandingkan dengan data awal perencanaan yang hanya memperoleh nilai sebesar 68,99 poin.
- b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 76,5512 poin, yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 96,90%. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis sehingga indikator ini tidak dilakukan pengukuran serta tidak dapat dibandingkan dengan data awal perencanaan.
- c. Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah mengalami peningkatan realisasi sebesar 4,75% jika dibandingkan dengan data awal perencanaan. Diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal daerah pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 28,93%, sedangkan data awal perencanaan mendapat nilai sebesar 24,21%.
- d. Indeks SPBE memiliki capaian kinerja sebesar 98,39% dengan realisasi kinerja sebesar 3.05 poin. Indeks SPBE merupakan indikator yang pada

tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis sehingga tidak dapat dibandingkan dengan data awal perencanaan.

- e. Maturitas SPIP dibandingkan dengan data awal perencanaan masih memiliki realisasi yang tetap tercapai 100% dengan realisasi level 3.

2. Sasaran Strategis 2 : Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel

Indeks Sistem Merit mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,03 poin dari data awal perencanaan yang memiliki nilai 0,62 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang memiliki nilai 0,65 poin.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan

Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 103,32% dengan realisasi kinerja sebesar 85,24 poin. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis sehingga tidak dapat dibandingkan dengan data awal perencanaan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis. Namun Indeks Pendidikan pada data awal perencanaan telah memiliki nilai sebesar 0,7487 poin yang jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,0103 poin menjadi 0,759 poin.

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis. Indeks Kesehatan jika dibandingkan antara data awal perencanaan dengan realisasi tahun 2022 maka diketahui bahwa Indeks Kesehatan mengalami kenaikan sebesar 0,0047 poin dari 0,8383 poin menjadi 0,843 poin.

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2022 terealisasi sebesar 55,64 poin. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk

indikator sasaran strategis sehingga indikator ini tidak dilakukan pengukuran serta tidak dapat dibandingkan dengan data awal perencanaan.

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Pemuda

Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis. Namun indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan pada data awal perencanaan telah memiliki nilai sebesar 0,02 poin yang jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,044 poin menjadi 0,064 poin.

8. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah

Indeks Warisan Budaya mengalami penurunan sebesar 0,028 poin jika dibandingkan dengan data awal perencanaan. Diketahui bahwa data awal perencanaan indeks warisan budaya memperoleh indeks sebesar 0,492 poin, sedangkan realisasi indeks warisan budaya pada tahun 2022 mendapat indeks sebesar 0,464 poin.

9. Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) jika dibandingkan antara data awal perencanaan dengan realisasi tahun 2022 maka diketahui bahwa Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) mengalami kenaikan sebesar 8,61% dari 14,43% menjadi 23,04%.

10. Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas

- a. Indeks Pembangunan Infrastruktur mengalami penurunan sebesar 0,17 poin jika dibandingkan dengan data awal perencanaan. Diketahui bahwa data awal perencanaan indeks pembangunan infrastuktur memperoleh indeks sebesar 77,8 poin, sedangkan realisasi tahun 2022 mendapat indeks sebesar 77,63 poin.
- b. Persentase Permukiman Layak Huni merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis. Namun persentase permukiman layak huni pada data awal perencanaan telah

memiliki nilai sebesar 98,59% yang jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,48% menjadi 99,07%.

11. Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan data awal perencanaan mengalami penurunan sebesar 4,11 poin dari 68,07 poin menjadi 63,96 poin.
- b. Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis. Namun Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan pada data awal perencanaan telah memiliki nilai sebesar 89% yang jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,74% menjadi 89,74%.

12. Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota

- a. Indeks Resiko Bencana mengalami penurunan sebesar 2 poin jika dibandingkan dengan data awal perencanaan. Diketahui bahwa indeks resiko bencana pada tahun 2022 memperoleh indeks sebesar 110 poin, sedangkan data awal perencanaan mendapat indeks sebesar 108 poin.
- b. Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis. Namun indeks ketentraman dan ketertiban pada data awal perencanaan sebesar 0,5601 poin yang jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,2399 poin menjadi 0,8 poin.

13. Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan

- a. Persentase Pertumbuhan UMKM merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis. Pada tahun 2022 persentase pertumbuhan UKM mencapai 29,55%, sedangkan pada data awal perencanaan diketahui hanya mencapai 3,09% dengan selisih kenaikan sebesar 26,46%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil diturunkan sebesar 2,1% pada tahun 2022. Hal ini bisa dilihat dari data awal capaian

perencanaan sebesar 9% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 6,9%.

c. Tingkat Kemiskinan dibandingkan dengan data awal perencanaan berhasil diturunkan sebesar 0,12% dari 2,57% menjadi 2,45%.

14. Sasaran Strategis 14 : Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah

Nilai Realisasi Investasi merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis. Pada data awal perencanaan diketahui bahwa nilai realisasi investasi Kota Balikpapan sebesar Rp 3.018.000.000.000,- , namun pada Tahun 2022 telah mencapai nilai sebesar Rp 15.426.499.536.500,- dengan kenaikan sebesar Rp 12.408.499.536.500,-

15. Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan mengalami penurunan sebesar 0,9 poin dari 87 poin menjadi 86,1 poin. Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis.

16. Sasaran Strategis 16 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional

Angka Kunjungan Wisatawan mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 649.400 kunjungan dari 1.729.400 kunjungan wisata dibandingkan dengan data awal perencanaan yang hanya menargetkan sebesar 1.080.000 kunjungan.

17. Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif terealisasi sebesar 28,46% dengan capaian kinerja sebesar 1.293,64%. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis sehingga indikator ini tidak dilakukan pengukuran serta tidak dapat dibandingkan dengan data awal perencanaan.

18. Sasaran Strategis 18 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan merupakan indikator yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk indikator sasaran strategis. Namun persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan terealisasi sebesar 5,29%, yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 5,85% dibandingkan dengan data awal perencanaan yang hanya memiliki nilai sebesar -0,56%.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	69.50	75.58	91.96%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	76.5512*	83	92.23%
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	28.93%	44.40%	65.16%
		Indeks SPBE	Poin	3.05	4	76.25%
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 4	75%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.65	0.84	77.38%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85.24	85.05	100.22%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.759	0.7524	100.88%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.843	0.8397	100.39%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	55.64	12.5	445.12%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.064	0.025	256.00%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.464	0.4975	93.27%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	23.04%	60%	38.40%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	77.63	80.02	97.01%
		Persentase Permukiman Layak Huni	%	99.07%	100%	99.07%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63.96	68.51	93.36%
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89,74%	90%	99.71%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	110	99	90%
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8	0.8794	90.97%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	29.55%	3.45%	856.52%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
	Daerah. Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.9	7.74	112.17%
		Tingkat Kemiskinan	%	2.45	2.36	96.33%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	15.426	4.44	347.44%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	86.1	90	95.67%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1.729	3.4	50.85%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	28.46%	3.22%	883.85%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5.29%*	5%	105.80%

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis

Sumber data: Bagian Organisasi, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dari 27 indikator kinerja yang telah memenuhi target dalam pembangunan jangka menengah adalah 10 indikator kinerja, sedangkan 17 indikator kinerja lainnya belum mencapai target jangka menengah sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun 10 indikator kinerja yang telah memenuhi target dalam pembangunan jangka menengah antara lain (1) Indeks Kepuasan Masyarakat, (2) Indeks Pendidikan, (3) Indeks Kesehatan, (4) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, (5) Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan, (6) Persentase Pertumbuhan UMKM, (7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), (8) Nilai Realisasi Investasi, (9) Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dan (10) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan. Untuk indikator kinerja yang telah memenuhi target dalam pembangunan jangka menengah tersebut, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

e. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dibandingkan dengan target standar nasional tahun 2022 dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional 2022	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	69.50	-	-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	76.5512*	-	-
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	Poin	28.93%	-	-
		Indeks SPBE	%	3.05	2.34	130.34%
		Maturitas SPIP	Poin	Level 3	-	-
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Level	0.65	-	-
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85.24	-	-
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.759	0.65	116.77%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional 2022	Capaian
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.843	0.80	105.68%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	55.64	64.48	86.29%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.06	-	-
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.464	-	-
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Poin	23.04%	-	-
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	77.63	-	-
		Persentase Permukiman Layak Huni	Poin	99.07%	-	-
11		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	63.96	72.42	88.32%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional 2022	Capaian
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	Poin	89.74%	-	-
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	%	110	134.16	121.96%
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8	-	-
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah. Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	Poin	29.55%	-	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.9	5.86	117.75%
		Tingkat Kemiskinan	%	2.45	9.57	390.61%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	%	15.426	-	-
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Triliun Rupiah	86.1	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional 2022	Capaian
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Poin	1.729	-	-
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Juta Orang	28.46%	-	-
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5.29%*	-	-

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis

Sumber data : Bagian Organisasi, diolah 2022

Berdasarkan tabel 2.9 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) indikator sasaran strategis Kota Balikpapan yang dapat disandingkan dengan indikator sasaran strategis standar nasional tahun 2022. Sedangkan 19 indikator lainnya tidak dapat disandingkan dengan indikator sasaran strategis standar nasional dikarenakan merupakan hasil perhitungan mandiri oleh badan/ dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pada tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Balikpapan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan sebesar Rp 3.273.129.855.262,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 2.676.298.783.394,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 81,77%.

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat dari efisiensi anggaran. Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. Sedangkan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i.

Dengan demikian, merujuk pada rumus di atas maka efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Balikpapan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	75.5	69.50	92.05%	Rp 173,786,734,678	Rp 152,840,906,584	87.95%	4.46%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	79	76.5512*	96.90%	Rp 145,962,228,177	Rp 84,110,316,327	57.62%	40.53%
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	36.88%	28.93%	78.44%	Rp 50,888,909,390	Rp 37,837,495,545	74.35%	5.21%
		Indeks SPBE	Poin	3.1	3.05	98.39%	Rp 17,075,297,100	Rp 15,580,760,229	91.25%	7.26%
		Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	Rp 15,029,910,800	Rp 13,376,482,603	89%	11%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.69	0.65	94.20%	Rp 23,169,152,050	Rp 18,241,432,487	78.73%	16.42%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82.50	85.24	103.32%	Rp 260,541,512,718	Rp 225,425,551,991	86.52%	16.26%
4	Meningkatnya Kualitas dan	Indeks Pendidikan	Poin	0.75	0.759	101.20%	Rp 864,171,157,669	Rp 633,020,568,014	73.25%	27.62%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
	Aksesibilitas Pendidikan									
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8385	0.843	100.54%	Rp 453,607,656,623	Rp 411,208,590,883	90.65%	9.83%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	10.5	55.64	529.90%	Rp 10,361,787,902	Rp 9,610,153,859	92.75%	82.50%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.021	0.064	304.76%	Rp 55,676,572,585	Rp 39,833,669,767	71.54%	76.52%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.496	0.464	93.55%	Rp 4,775,000,000	Rp 4,090,081,239	85.66%	8.44%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	17%	23.04%	135.53%	Rp 27,793,017,610	Rp 20,919,361,863	75.27%	44.46%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	78.2	77.63	99.27%	Rp 703,841,584,149	Rp 634,545,986,687	90.15%	9.18%
		Persentase Permukiman Layak Huni	%	99%	99.07%	100.02%	Rp 23,359,226,378	Rp 19,371,857,919	82.93%	17.09%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68.15	63.96	93.85%	Rp 136,098,824,212	Rp 127,115,870,134	93.40%	0.48%
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89%	89.74%	101%	Rp 80,517,867,990	Rp 25,638,313,301	31.84%	68.35%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	107	110	97.27%	Rp 71,972,017,096	Rp 71,505,298,365	99.35%	2.14%
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8	0.8	100%	Rp 12,732,583,732	Rp 11,759,086,513	92.35%	7.65%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	3.14%	29.55%	941.08%	Rp 36,368,074,875	Rp 30,704,433,351	84.43%	91.03%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9	6.9	130.43%	Rp 9,448,997,120	Rp 8,234,464,693	87.15%	33.19%
		Tingkat Kemiskinan	%	2.42	2.45	98.78%	Rp 13,947,588,445	Rp 11,576,205,937	83%	15.97%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3.33	15.426	463.26%	Rp 14,257,916,147	Rp 12,299,054,472	86.26%	81.38%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	86.1	98.97%	Rp 24,371,817,100	Rp 21,053,993,476	86.39%	12.71%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1.44	1.729	120.07%	Rp 12,379,743,300	Rp 11,380,296,573	91.93%	23.44%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2.20%	28.46%	1293.64%	Rp 1,100,000,000	Rp 1,053,711,413	95.79%	92.60%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	3.50%	5.29%*	151.14%	Rp 29,894,677,416	Rp 23,964,839,170	80.16%	46.96%

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis

Sumber data : Bagian Organisasi, diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) adalah perbandingan antara kinerja dengan anggaran. Merujuk pada tabel tersebut maka bisa dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran penggunaan anggaran yang berdasarkan kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

- a. Nilai SAKIP Kota Balikpapan dengan capaian kinerja sebesar 92,05% dan capaian anggaran sebesar 87,95%, menunjukkan bahwa walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,46% akan tetapi belum efektif karena belum mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut.
- b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah telah memiliki capaian kinerja sebesar 96,90% (nilai 2021) dengan capaian anggaran 57,62%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada efisiensi anggaran sebesar 40,53% akan tetapi belum efektif karena belum dapat mencapai kinerja sebagaimana ditargetkan sehingga perlu dilaksanakan berbagai upaya-upaya perbaikan.
- c. Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki capaian kinerja hanya sebesar 78,44% dengan capaian anggaran sebesar 74,35% dari anggaran yang telah tetapkan. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada efisiensi sebesar 5,21% akan tetapi belum menunjukkan kinerja yang efektif karena belum dapat mencapai kinerja yang diinginkan, sehingga diperlukan berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja tersebut.
- d. Indeks SPBE memiliki capaian kinerja sebesar 98,39% dan capaian anggaran sebesar 91,25% yang menunjukkan bahwa walaupun ada efisiensi sebesar 7,26%, akan tetapi dinilai belum efektif karena belum dapat mewujudkan capaian yang diinginkan sehingga diperlukan berbagai

upaya-upaya yang menunjang pencapaian indikator tersebut.

- e. Maturitas SPIP memiliki realisasi yang tetap tercapai 100% dengan realisasi level 3 dan capaian anggaran sebesar 89%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 11%.

2. Sasaran Strategis 2 : Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel

Indeks Sistem Merit memiliki capaian kinerja sebesar 94,20% dengan capaian anggaran sebesar 78,73% yang menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 16,42%. Walaupun telah terdapat efisiensi anggaran, namun hal ini belum efektif karena belum mampu mencapai kinerja yang diharapkan sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan

Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 103,32% dengan capaian anggaran sebesar 86,52% yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 16,26%.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Indeks Pendidikan memiliki efisiensi anggaran 27,62% dengan capaian kinerja sebesar 101,20% dan capaian anggaran sebesar 73,25%. Walaupun capaian anggaran yang diserap tidak sampai 100%, indikator ini tetap dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan memiliki capaian kinerja sebesar 100,54% dengan capaian anggaran sebesar 90,65% yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 9,83%.

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat memiliki efisiensi anggaran sebesar 85,50%. Hal ini dikarenakan tingginya capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 529,90% dengan realisasi anggaran sebesar 92,75%.

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Pemuda

Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan memiliki capaian kinerja sebesar 304,06 atau naik 3x lipat dari target yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan efisiensi memiliki nilai sebesar 82,50%.

8. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah

Indeks Warisan Budaya memiliki capaian kinerja sebesar 93,55% dan capaian anggaran sebesar 85,66% yang menunjukkan bahwa walaupun ada efisiensi sebesar 8,44%, akan tetapi dinilai belum efektif karena belum dapat mewujudkan capaian yang diinginkan sehingga diperlukan berbagai upaya-upaya yang menunjang pencapaian indikator tersebut.

9. Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) memiliki capaian kinerja sebesar 135,33% dengan capaian anggaran sebesar 75,27% yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 44,46%.

10. Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas

- a. Indeks Pembangunan Infrastruktur memiliki capaian kinerja sebesar 99,27% dengan capaian anggaran sebesar 90,15% yang menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,18%. Walaupun telah terdapat efisiensi anggaran, namun hal ini belum efektif karena belum mampu mencapai kinerja yang diharapkan sehingga perlu

adanya peningkatan upaya-upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut.

- b. Persentase Permukiman Layak Huni memiliki efisiensi anggaran 17,09% dengan capaian kinerja sebesar 100,02% dan capaian anggaran sebesar 82,93%. Walaupun capaian anggaran yang diserap tidak sampai 100%, indikator ini tetap dapat tercapai.

11. Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki capaian kinerja sebesar 93,85% dan capaian anggaran sebesar 93,40% yang menunjukkan bahwa walaupun ada efisiensi sebesar 0,48%, akan tetapi dinilai belum efektif karena belum dapat mewujudkan capaian yang diinginkan sehingga diperlukan berbagai upaya-upaya yang menunjang pencapaian indikator tersebut.
- b. Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan memiliki efisiensi anggaran 68,35% dengan capaian kinerja sebesar 101% dan capaian anggaran sebesar 31,84%. Walaupun capaian anggaran yang diserap tidak sampai 100%, indikator ini tetap dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

12. Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota

- a. Indeks Resiko Bencana dengan capaian kinerja sebesar 97,27% dan capaian anggaran sebesar 99,35%, menunjukkan bahwa walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,14% akan tetapi belum efektif karena belum mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut.
- b. Indeks Ketentraman dan Ketertiban memiliki efisiensi anggaran 7,65% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 92,35%. Walaupun capaian anggaran yang diserap tidak sampai 100%, indikator ini tetap dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

13. Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan

- a. Persentase Pertumbuhan UMKM memiliki efisiensi anggaran 91,03% dengan capaian kinerja sebesar 941,08% dan capaian anggaran sebesar 84,43%. Walaupun capaian anggaran yang diserap tidak sampai 100%, indikator ini tetap dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki efisiensi anggaran 33,19% dengan capaian kinerja sebesar 130,43% dan capaian anggaran sebesar 87,15%. Walaupun capaian anggaran yang diserap tidak sampai 100%, indikator ini tetap dapat tercapai.
- b. Tingkat Kemiskinan dengan capaian kinerja sebesar 98,78% dan capaian anggaran sebesar 83%, menunjukkan bahwa walaupun terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,97% akan tetapi belum efektif karena belum mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut.

14. Sasaran Strategis 14 : Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah

Nilai Realisasi Investasi memiliki efisiensi anggaran 81,38% dengan capaian kinerja sebesar 463,26% dan capaian anggaran sebesar 86,26%. Walaupun capaian anggaran yang diserap tidak sampai 100%, indikator ini tetap dapat tercapai jauh melebihi target yang telah ditetapkan.

15. Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan memiliki capaian kinerja sebesar 98,97% dan capaian anggaran sebesar 83,39% yang menunjukkan bahwa walaupun ada efisiensi sebesar 12,71%, akan tetapi dinilai belum efektif karena belum dapat mewujudkan capaian yang diinginkan sehingga diperlukan

berbagai upaya-upaya yang menunjang pencapaian indikator tersebut.

16. Sasaran Strategis 16 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional

Angka Kunjungan Wisatawan memiliki efisiensi anggaran 23,44% dengan capaian kinerja sebesar 120,07% dan capaian anggaran sebesar 91,93%. Walaupun capaian anggaran yang diserap tidak sampai 100%, indikator ini tetap dapat tercapai jauh melebihi target yang telah ditetapkan.

17. Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif memiliki efisiensi anggaran 92,60% dengan capaian kinerja sebesar 1.293,64% dan capaian anggaran sebesar 95,79%. Walaupun capaian anggaran yang diserap tidak sampai 100%, indikator ini tetap dapat tercapai jauh melebihi target yang telah ditetapkan.

18. Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan memiliki capaian kinerja sebesar 151,14% dan capaian anggaran sebesar 80,16% yang menunjukkan bahwa walaupun ada efisiensi sebesar 46,96%, akan tetapi dinilai belum efektif karena belum dapat mewujudkan capaian yang diinginkan sehingga diperlukan berbagai upaya-upaya yang menunjang pencapaian indikator tersebut.

g. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam mendukung pencapaian target kinerja tidak terlepas dari dilaksanakan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Tercapainya Target Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	92.05%	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	97.73%	100%	102.32%	33,177,715,150	31,146,958,544	93.88%
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administras	100%	100%	100%	2,961,001,437	2,327,084,150	78.59%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						i Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan						
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78	79.32	101.69%	119,727,537,091	104,458,566,989	87.25%
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.76	19.35	59.07%	3,300,000,000	2,830,228,657	85.76%
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	23.460	21.55	91.86%	-	-	0%
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Prioritas I)	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang	100%	100%	100%	3,375,000,000	3,236,841,723	95.91%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						ditindaklanjuti						
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.5	82.14	96%	11,245,481,000	8,841,226,521	78.62%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	96.90%*	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, PAPBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	90,499,107,100	41,355,685,142	45.70%
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	100%	100%	100%	32,358,305,800	29,362,262,189	90.74%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74.5	74.5	100%	23,104,815,277	13,392,368,995	57.96%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Daerah Kabupaten/Kota	Internal Perangkat Daerah						
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	78.44%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	780.71	939.00	120.28%	5,054,684,300	4,400,609,171	87.06%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	88.93	111.16%	45,834,225,090	33,436,886,374	72.95%
		Indeks SPBE	98.39%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	80%	95%	119%	271,900,000	249,966,297	91.93%
					Program Pengelolaan Informasi dan	Persentase masyarakat yang menjadi	80%	65%	81%	3,644,482,800	3,225,877,104	88.51%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Komunikasi Publik	sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota						
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	80%	100%	125.00%	402,990,000	395,853,000	98.23%
					Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan	80%	100%	125.00%	4,258,000,000	4,164,604,263	97.81%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						kan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;						
					Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	80%	90%	113%	2,452,250,000	2,405,047,651	98.08%
				Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.00	86.89	102.22%	6,045,674,300	5,145,478,144	85.11%
		Maturitas SPIP	100%	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	83.33	85.24	102.29%	611,878,250	479,314,254	78.33%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	85	85	100%	443,112,912	465,815,358	105.12%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	84.50	103.05%	13,974,919,638	12,431,352,991	88.95%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	94.20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	88%	74.89%	100%	1,751,794,450	901,767,411	51.48%
						Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	20%	20%	100%	-	1,741,048,814	100%
						Persentase ASN dengan	97.81%	97.81%	100%	632,127,950	342,837,165	54.24%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						kriteria kinerja baik						
						Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	3.93%	0.69%	100%	1,762,957,550	1,325,918,622	75.21%
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	17.39%	19.97%	114.84%	6,588,124,350	5,282,748,758	80.19%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	78	97.53%	9,892,710,000	8,647,111,717	87.41%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas	Indeks Kepuasan Masyarakat	103.32%	Dinas Kependudukan dan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen	88.11%	91.12%	103.41%	-	-	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	Layanan Pemerintahan			Pencatatan Sipil		pendaftaran penduduk						
					Program Pencatatan Sipil	Peresentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96.50%	95.77%	99.24%	-	-	0%
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	100%	100%	100%	766,721,033	636,433,210	83.01%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78.50	86.20	109.81%	13,442,832,900	12,295,039,085	91.46%
				Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100.00%	72.10%	72.10%	30,594,448,150	24,506,595,385	80.10%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	65.85	82.31%	87,118,852,321	75,167,040,720	86.28%
				Kecamatan Balikpapan Barat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00%	813,371,600	751,819,550	92.43%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	23.37%	183%	410,778,400	379,894,800	92.48%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Baru Ilir)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	21.78%	171%	769,055,300	763,098,267	99.23%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Baru Tengah)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	35.49%	278 %	901,343,300	538,760,276	59.77%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Baru Ulu)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	13.18%	103 %	877,847,950	853,499,007	97.23%
				Kecamatan Balikpapan Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kariangau)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	14.20%	111 %	547,646,400	541,701,306	98.91%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Margo Mulyo)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	24.94%	196 %	864,569,000	721,143,287	83.41%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Margasari)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	30.64%	240 %	697,890,200	340,633,070	48.81%
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordiansi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum di keamatan yang optimal	100%	81%	81%	-	-	0%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71	71	100 %	14,782,716,728	12,609,167,000	85.30%
					Program Penyelenggaraan	Persentase Pengaduan Pelayanan	100%	100%	100 %	880,473,500	863,178,300	98.04%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
				Kecamatan Balikpapan Selatan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administratif yang ditindaklanjuti						
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8%	19.27%	240.88%	547,451,200	524,810,000	95.86%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Damai Bahagia)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8%	19.27%	240.88%	350,987,800	331,455,800	94.44%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sepinggan Raya)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8%	19.27%	240.88%	683,988,100	682,259,144	99.75%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8%	19.27%	240.88%	642,499,650	632,547,689	98.45%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Kelurahan (Damai Baru)	masyarakat dalam membangun kelurahan						
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sepinggian Baru)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8%	19.27%	240.88%	458,250,000	434,038,808	94.72%
				Kecamatan Balikpapan Selatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Gunung Bahagia)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8%	19.27%	240.88%	905,671,350	899,230,708	99.29%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sepinggian)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8%	19.27%	240.88%	836,895,000	819,562,596	97.93%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi	8%	19.27%	240.88%	963,999,700	949,951,221	98.54%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Kelurahan (Sungai Nangka)	masyarakat dalam membangun kelurahan						
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase sinergitas perangkat kecamatan terhadap instansi vertikal maupun tokoh agama maupun tokoh masyarakat	100%	100%	100%	779,998,750	753,414,294	96.59%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71	80.22	113%	17,849,423,000	13,202,019,310	73.96%
				Kecamatan Balikpapan Kota	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	2,021,861,900	652,994,300	32.30%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	10%	13%	126.60%	774,257,750	741,306,550	95.74%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Klandasan Ulu)	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	10%	13%	126.60%	175,847,400	125,445,700	71.34%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Klandasan Ilir)	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	10%	13%	126.60%	568,999,400	568,381,640	99.89%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat	10%	13%	126.60%	770,000,000	766,921,060	99.60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Kelurahan (Damai)	dalam membangun Kelurahan						
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Prapatan)	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	10%	13%	126.60%	564,998,400	549,913,341	97.33%
				Kecamatan Balikpapan Kota	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Telagasari)	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	10%	13%	126.60%	531,964,900	529,981,814	99.63%
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal	100%	100%	100%	612,995,900	602,591,517	98.30%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	79.21	99.76%	14,948,705,300	8,949,070,883	59.87%
				Kecamatan Balikpapan Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	87.52%	88%	824,896,100	774,227,150	93.86%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35%	9.43%	57.68%	599,399,700	574,822,040	95.90%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Lamaru)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35%	13.37%	81.77%	169,865,300	140,866,500	82.93%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Manggar Baru)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35%	12.76%	78.04%	568,534,750	530,150,329	93.25%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Teritip)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35%	11.25%	68.81%	748,682,200	710,237,928	94.87%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Manggar)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35%	9.63%	58.90%	754,608,400	748,666,301	99.21%
				Kecamatan Balikpapan Timur	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum	100%	99.18%	99.18%	1,212,691,600	1,208,884,567	99.69%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						di Kecamatan yang optimal						
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	104.32	131.39%	12,658,549,600	11,101,672,767	87.70%
				Kecamatan Balikpapan Utara	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	964,051,800	730,558,900	75.78%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15%	15.27%	102%	586,217,700	471,208,150	80.38%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat	15%	15.27%	102%	550,845,700	549,413,195	99.74%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					(Gn. Smd Baru)	dalam membangun kelurahan						
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Karang Joang)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15%	15.27%	102%	821,990,400	814,386,445	99.07%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Graha Indah)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15%	15.27%	102%	896,333,900	891,643,503	99.48%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Gunung Samarinda)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15%	15.27%	102%	762,920,000	749,207,433	98.20%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Muara Rapak)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15%	15.27%	102%	1,044,942,300	1,023,143,918	97.91%
				Kecamatan Balikpapan Utara	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Batu Ampar)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15%	15.27%	102%	941,398,300	916,515,478	97.36%
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	81%	81%	361,673,400	272,123,000	75.24%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	71	81.83	115.25%	15,330,938,600	13,146,827,512	85.75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah						
				Kecamatan Balikpapan tengah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	819,255,550	770,056,850	93.99%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	23.37%	183%	631,299,400	622,711,300	98.64%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Gunung Sari Ulu)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	23.37%	183%	564,702,800	561,640,544	99.46%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	12.75%	35.49%	278%	900,487,590	883,448,180	98.11%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					(Gunung Sari Ilir)	membangun kelurahan						
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Karang Rejo)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	13.18%	103%	1,016,485,700	1,006,748,709	99.04%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Karang Jati)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	14.20%	111%	492,835,700	485,637,776	98.54%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Mekar Sari)	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	24.94%	196%	520,858,000	517,933,875	99.44%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12.75%	30.64%	240%	726,987,000	724,784,712	99.70%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Kelurahan (Sumber Rejo)	membangun kelurahan						
				Kecamatan Balikpapan tengah	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum di keamanan yang optimal	100%	100.00%	100%	261,884,000	256,970,700	98.12%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	79.44	113.49%	15,268,849,346	13,089,927,715	85.73%
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	67%	88.17%	131.60%	811,999,400	779,284,742	95.97%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	101.20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	86.93	90.81	104.46%	506,512,424,196	331,193,389,089	65.39%
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	66.67%	54.01%	81.01%	423,500,000	128,224,213	30.28%
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	95.16%	95.16%	100%	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72%
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)	98.98%	98.21%	99.22%	200,000,000	45,831,215	22.92%
					Program Penunjang Urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.18	86	100.83%	355,735,233,473	300,616,709,500	84.51%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	(IKM) Internal Perangkat Daerah						
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	100.54%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	84	105 %	249,611,440,892	216,860,569,890	86.88%
				Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	82%	82%	100 %	1,160,000,000	1,080,763,214	93.17%
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minum yang diterbitkan	100%	100%	100 %	1,271,292,000	1,024,048,073	80.55%
				Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	82%	80%	97.56%	5,366,090,244	4,816,035,078	89.75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Bidang Kesehatan	(UKBM) Aktif						
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	84	105%	196,198,833,487	187,427,174,628	95.53%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	529.90%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	4%	5%	125%	1,077,531,700	965,979,345	89.65%
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip yang dikelola	60%	60%	100%	305,923,070	288,533,448	94.32%
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	10%	7%	70%	159,995,230	154,048,260	96.28%
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase perizinan penggunaan arsip	0%	0%	0%	39,999,850	38,488,800	96.22%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78	80	102.18%	8,778,338,052	8,163,104,006	92.99%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	304.76%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pemuda yang kreatif, Inovatif dan Mandiri	2.30%	1.036%	45.04%	6,324,990,000	5,429,070,029	85.84%
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100%	100%	100%	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00%
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	25%	32.64%	130.56%	36,230,452,493	22,811,858,548	62.96%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71	82.05	115.56%	12,121,130,092	10,592,741,190	87.39%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	93.55%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	34.89%	22.90%	65.63%	1,130,000,000	631,788,941	55.91%
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	24.87%	24.87%	100%	2,250,000,000	2,212,257,271	98.32%
					Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	26.66	26.66	100%	175,000,000	145,033,900	82.88%
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	94.11	85.63	90.99%	1,220,000,000	1,101,001,127	90.25%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusta	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	135.53%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Program Pengarusutamaan Gender dan	Prosentase OPD yang telah menyusun anggaran	82.40	77.78	94.39%	549,999,600	420,395,911	76.44%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	maan Gender			n Anak dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan	yang Responsif Gender (jumlah OPD yg telah menyusun PPRG/jumlah seluruh OPD x100%)						
					Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan (Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dibagi Jumlah Perempuan dikali 100.000)	9.08	21.06	- 31.94%	749,494,000	516,504,691	68.91%
					Program Peningkatan	Cakupan Ketersediaa	71.43	83.33	116.66%	600,000,000	357,487,496	59.58%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Kualitas Keluarga	n Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat Kecamatan						
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah (jumlah OPD memiliki data terpilah dibagi Jumlah OPD dikali 100)	14.71	27.77	188.78%	74,999,800	4,123,010	5.50%
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	25.00	67.10	268.40%	595,000,000	579,286,434	97.36%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA (jumlah klien UPTD PPA yang sudah tuntas penanganannya dibagi jumlah klien yang ditangani UPTD PPA kalikan 100)	65.00	66.37	102.11%	973,356,000	834,784,987	85.76%
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	5.88	5.88	100.00%	672,334,160	233,930,413	34.79%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	83,900,000,000	85,176,853,583	101.52%	7,721,048,550	5,817,761,926	75.35%
					Program Pengendalian Penduduk	Prosentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	62.00	64.00	103.23%	673,115,000	636,923,900	94.62%
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan	13.75	30.57	222.33%	2,829,594,000	1,942,405,441	68.65%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						Usia Subur x 100%)						
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan (Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan dibagi jumlah keluarga versi DALLAP BKKBN dikalikan 100)	10.74	8.25	76.82%	3,430,200,000	1,646,962,059	48.01%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal		75	82.19	109.59%	8,923,876,500	7,928,795,595	88.85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah						
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	99.27%	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	55.88%	55.88%	100.00%	12,203,566,800	11,292,290,226	92.53%
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	96.79%	97.18%	100.40%	3,749,736,000	3,514,974,393	93.74%
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	98.49%	98.54%	100.04%	14,484,798,000	9,082,734,284	62.71%
					Program Pengembangan Sistem dan	Persentase Penyediaan Sarana	97.82%	97.82%	100%	1,550,000,000	855,438,591	55.19%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Pengelolaan Persampahan Regional	Persampahan						
				Dinas Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	85.36%	85.36%	100%	96,853,301,411	110,016,239,419	113.59%
			Program Pengembangan Permukiman		Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	81%	79%	97.53%	224,884,140,780	219,970,531,176	97.82%	
			Program Penataan Bangunan Gedung		Persentase bangunan yang memiliki ijin	99.00%	92.80%	93.74%	68,126,647,478	57,745,676,697	84.76%	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	750,000,000	588,956,920	78.53%	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang	52.63%	53.06%	100.81%	163,447,483,060	112,204,465,776	68.65%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Sistem Drainase	terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota						
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%	30,990,961,000	28,515,296,557	92.01%
				Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi	85.00%	113.64%	133.69%	58,835,976,150	55,063,907,682	93.59%
					Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	62.00%	62.00%	100.00%	765,000,000	665,201,137	86.95%
					Program Penunjang Urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	88	115.13%	27,199,973,470	25,030,273,828	92.02%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	(IKM) Internal Perangkat Daerah						
		Persentase Permukiman Layak Huni	100.02%			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	0%	0%	10,004,275,592	7,839,052,480	78.36%
				Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	103.90%	100.88%	102.91%	1,544,632,273	1,422,472,461	92.09%
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	0,01	0.03	102.91%	1,558,037,500	1,497,019,284	96.08%
					Program Peningkatan Prasarana,	Persentase peningkatan PSU pada	1.39	1.00	71.94%	935,800,000	752,472,825	80.41%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	lingkungan perumahan						
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	77.29	110.41%	9,076,481,113	7,657,913,449	84.37%
				Dinas Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	79.00%	0%	0%	239,999,900	202,927,420	84.55%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	93.85%	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	35.29	35.29	100%	99,996,200	98,134,980	98.14%
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan dikelola	5.74	5.74	100%	28,810,089,958	26,840,553,411	93.16%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan	100	152	152 %	119,999,700	98,181,785	81.82%
					Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.20	63.96	99.63%	1,034,999,265	957,276,659	92.49%
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	20.00	20.00	100 %	199,999,700	166,230,600	83.12%
				Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola	51.00	24.48	48%	50,000,000	48,367,415	96.73%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	40.00	40.36	101 %	105,000,000	99,380,030	94.65%
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	20.00	61.15	306 %	284,996,500	264,276,759	92.73%
					Program Pengelolaan Persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	81.15	81.15	100 %	88,296,554,996	83,000,860,530	94%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	B	B	100 %	17,097,187,893	15,542,607,965	90.91%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	100%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	14%	20%	143%	4,221,312,700	3,636,522,503	86.15%
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.14	0.14	100%	1,264,562,800	890,933,462	70.45%
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi	42%	55.56%	133%	30,000,000	9,924,500	33.08%
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	66%	62.96%	95%	64,700,692,290	12,659,862,358	19.57%
					Program Pengelolaan	Persentase luas tanah	88%	63.12%	72%	310,000,000	189,362,900	61.08%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Izin Membuka Tanah	yang sudah dimanfaatkan						
				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	76	95%	9,991,300,200	8,251,707,578	82.59%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	97.27%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	85%	79.64%	94%	1,497,265,000	1,459,188,896	97.46%
					Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85%	77.52%	91%	7,634,862,000	7,366,382,581	96.48%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	71.69	102.41%	32,497,058,600	32,179,987,152	99.02%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Daerah Kabupaten/Kota	Internal Perangkat Daerah						
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	100%									
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14%	14%	100%	3,703,994,500	3,481,278,000	93.99%
				Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77	77	100%	26,638,836,996	27,018,461,736	101.43%
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat terhadap 4 Konsensus Nasional	60%	100%	166.67%	794,996,250	715,239,510	89.97%
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	67%	66.67%	100%	1,708,210,142	1,572,808,614	92.07%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Melaporan pada Pemerintah Kota Balikpapan	83%	92.00%	110.84%	1,806,024,800	1,497,725,665	82.93%
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN	80%	80%	100%	1,017,000,000	989,517,793	97.30%
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Monitoring Potensi Konflik	80%	80%	100%	1,925,986,100	1,883,486,863	97.79%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	80.02	100%	5,480,366,440	5,100,308,068	93.07%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	941.08%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	5.44%	5.98%	109.94%	-	-	0%
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	20%	20.00%	100.65%	268,125,250	256,981,172	95.84%	
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase koperasi yang meningkatkan status kesehatannya	50.00%	6.53%	13.07%	-	-	0%	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase SDM Pengelola Koperasi yang	25.10%	8.59%	34.22%	404,200,000	324,293,090	80.23%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						meningkatkan kapasitasnya						
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi sehat	3.35%	2.76%	82.60%	-	-	0%
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	81.68%	70.52%	86.34%	6,506,719,600	5,903,096,844	90.72%
					Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkatkan omsetnya	5.21%	3.19%	61.23%	2,651,630,850	2,047,540,467	77.22%
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	1.10%	5.59%	506.64%	16,836,422,360	14,413,127,124	85.61%
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri	12.01%	6.96%	57.94%	115,000,000	83,714,900	72.80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						(IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	45.45%	40.68%	89.49%	210,000,000	194,604,606	92.67%
				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	67	82	122.04%	9,375,976,815	7,481,075,148	79.79%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	130.43%	Dinas Ketenagakerjaan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	3.20%	2.92%	91%	399,952,800	257,703,208	64.43%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari Kerja Yang Mendapat Palatihan yang Tersalur	54%	61%	113%	999,871,500	876,213,529	87.63%
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	23%	25%	109%	454,969,700	291,993,434	64.18%
					Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	69%	87.50%	127%	514,995,620	361,770,472	70.25%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81.5	79.475	97.52%	7,079,207,500	6,446,784,050	91.07%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		Tingkat Kemiskinan	98.78%	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapat pembinaan	80.00%	83.65%	104.56%	1,083,199,700	1,027,337,180	94.84%
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial PMKS yang terpenuhi	77.77%	43.43%	55.84%	1,521,655,895	1,409,506,932	92.63%
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	20.68%	81.46%	393.91%	1,449,000,000	1,372,323,500	94.71%
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	81%	100%	123.46%	1,505,645,200	1,118,444,300	74.28%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota						
				Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	93	132.86%	8,388,087,650	6,648,594,025	79.26%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	298.65%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal	5%	0%	0%	425,761,300	406,689,813	95.52%
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	80%	80%	100%	664,995,000	657,023,564	98.80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (debottleneck) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100%	100%	100%	713,127,200	537,316,670	75.35%
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif	84%	91.04%	108.38%	570,484,500	551,749,100	96.72%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78	78.02	100.03%	11,883,548,147	10,146,275,325	85.38%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	98.97%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung	2.40%	2.80%	117%	474,300,000	453,495,936	95.61%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						sesuai kebutuhan)						
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	88%	110%	125%	239,050,000	219,211,477	91.70%
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4200	4251	101.22%	1,195,300,000	954,058,300	79.82%
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	296	549	185.47%	1,124,376,400	928,761,971	82.60%
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	40%	41.54%	103.85%	888,910,700	871,381,644	98.03%
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Presentase Rekomendasi yang Diterbitkan	50%	0%	0%	748,878,050	648,015,134	86.53%
					Program Penyediaan dan Pengembangan	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	75%	75%	100%	1,223,232,850	1,119,162,470	91.49%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Sarana Pertanian							
				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	15%	15%	100%	748,878,050	648,015,134	86.53%
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Luas Lahan pengendalian dan penanggulangan pertanian	40%	0%	0%	-	-	0%	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	65%	61.42%	94.50%	593,477,500	503,652,415	84.86%	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	73	104.29%	17,884,291,600	15,356,254,129	85.86%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	122.15%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	3.00%	10.61%	353.67%	7,604,743,300	6,742,801,174	88.67%
					Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	17.00%	21.42%	126.00%	4,775,000,000	4,637,495,399	97.12%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	1293.64%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	12%	0%	0%	200,000,000	187,552,360	93.78%
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	8%	0%	0%	900,000,000	866,159,053	96.24%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	151.14%*	Dinas Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang telah	50%	35.06%	70.13%	355,000,000	329,005,810	92.68%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	Unggulan Daerah					diverifikasi dan memperoleh rekomendasi						
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	80%	80%	100%	12,931,131,950	9,218,476,158	71.29%
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu	5.80%	10.61%	54.67%	569,712,550	506,823,504	88.96%
					Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih non migas	1175	4029.26	342.92%	60,000,000	59,945,210	99.91%
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang meningkatkan omsetnya	60%	76.92%	128.21%	120,000,000	107,065,733	89.22%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Perangkat Daerah Pengampu	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70%	68.96%	98.51%	519,191,632	490,453,532	94.46%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76	77	101.91%	15,339,641,284	13,253,069,224	86.40%

Catatan: *angka sementara/ angka belum dirilis

Sumber data : Bagian Organisasi, diolah 2022

Adapun analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

a. Nilai SAKIP Kota Balikpapan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Indikator ini dihitung berdasarkan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pada tahun 2022, Nilai SAKIP Pemerintah Kota Balikpapan dapat terealisasi sebesar 69,50 poin dengan capaian kinerja sebesar 92,05% predikat “sangat tinggi”. Walaupun demikian, realisasi tersebut belum dapat melampaui target yang ditetapkan sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut. Upaya Pemerintah Kota Balikpapan belum berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini disebabkan karena evaluasi yang dilakukan belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja, kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada *outcome* dan indikator kinerja yang dimiliki belum SMART, keterpaduan

perencanaan serta pohon kinerja yang dimiliki dan level pemerintah daerah dan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun berdasarkan *logical framework*.

Beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui kolaborasi antara Perangkat Daerah terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dan Inspektorat Kota Balikpapan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain:

- 1) Penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 dengan memperhatikan kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja;
- 2) Pendampingan penyusunan Renstra Perangkat Daerah termasuk di dalamnya kinerja dan indikator kinerja sampai pada level subkegiatan untuk memastikan indikator yang ditetapkan berorientasi hasil;
- 3) Pendampingan penyusunan Renstra PD yang melibatkan Kepala PD guna memastikan kinerja dan indikator kinerja yang ditetapkan berorientasi hasil;
- 4) Penyusunan cascading kinerja tahun 2022-2026 dan melakukan pengendalian cascading tingkat Perangkat Daerah serta Pendampingan penyusunan SKP sesuai Permenpan 6 Tahun 2022 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja;
- 5) Melakukan koordinasi dan sinergitas antar PD untuk pemetaan crosscutting berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026;
- 6) Sosialisasi Penguatan Akuntabilitas melalui penyajian pelaporan kinerja;
- 7) Pendampingan dan desk penyusunan laporan kinerja;
- 8) Sosialisasi penyusunan Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun

2022 serta penginputan data Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022;

9) Pengembangan dan Sosialisasi aplikasi e-sakip sebagai sarana monitoring dan evaluasi pengukuran serta pelaporan kinerja;

10) Pendampingan dan desk penyusunan laporan evaluasi capaian kinerja program;

11) Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP ke Perangkat Daerah.

b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD ini ditetapkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 76,5512 poin, yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 96,90% dan mendapat predikat “sangat tinggi”.

Pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama semua stakeholder dalam pengelolaan ke keuangan di tingkat unit kerja, Perangkat Daerah hingga proses konsolidasi di tingkat Kota Balikpapan oleh BKAD Kota Balikpapan, komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara, penyusunan anggaran sesuai dengan aturan pemerintah pusat khususnya penyusunan dan penatalaksanaan, implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD) sebagai instrumen aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah serta dukungan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

c. Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah sehingga berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Variabel derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Pada tahun 2022, Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Balikpapan hanya mencapai realisasi sebesar 28.93% dari target sebesar 36.88% atau dengan kata lain memiliki capaian kinerja sebesar 78,44% berpredikat “tinggi”. Dalam hal ini realisasi derajat desentralisasi fiskal Kota Balikpapan belum mencapai target, dikarenakan masih dalam kondisi pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka untuk mendukung perbaikan dan pencapaian target Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah antara lain:

- 1) Penguatan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah termasuk penyusunan peraturan mengenai pengelolaan PAD (termasuk PDRD) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk menggali keunggulan budaya dan potensi asli daerah;

- 3) Modernisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM daerah, termasuk modernisasi proses pemungutan pajak (seperti penggunaan sistem teknologi informasi dan pembaruan data wajib pajak secara elektronik);
- 4) Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah;
- 5) Sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, BPN dan PERBANKAN.

d. Indeks SPBE

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks ini dihitung dari penjumlahan perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

Sesuai target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan untuk Indeks SPBE, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 3,1 poin. Berdasarkan hasil *assessment* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diperoleh indeks SPBE sebesar 3,05 poin dengan capaian kinerja sebesar 98,39% atau mendapat predikat “sangat tinggi”. Walaupun capaian kinerjanya sudah sangat tinggi, namun indeks SPBE belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya penambahan indikator pada Domain Manajemen SPBE, dimana Pemerintah Kota Balikpapan masih belum memiliki eviden yang lengkap terkait Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK SPBE.

Namun demikian, pencapaian indeks SPBE tersebut tidak lepas dari komitmen dan kerjasama seluruh

Perangkat Daerah dalam menerapkan SPBE dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mengisi dan mengumpulkan eviden yang berkaitan dengan penilaian/evaluasi SPBE. Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendukung perbaikan dan peningkatan capaian kinerja indeks SPBE, antara lain:

- 1) Pelaksanaan koordinasi peta rencana SPBE dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- 2) Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Perubahan SPBE;
- 3) Pembekalan Perencanaan Peningkatan Indeks SPBE Tahun 2022 dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPBE Perangkat Daerah;
- 5) Melaksanakan revisi arsitektur dan peta jalan SPBE Kota Balikpapan.

e. Maturitas SPIP

Dalam sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia, yang dianut adalah konsep SPI menurut kerangka COSO (*Comittee of Sponsoring Organization of The Treadway Commision*), yang dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Setiap pimpinan instansi diwajibkan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengaturan

terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BPKP kemudian mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Kualitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Balikpapan berada di level 3 dengan capaian kinerja sebesar 100% dan mendapat predikat “sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah memenuhi karakteristik atau dengan kata lain terdefinisi. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan SPIP seperti kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah dengan struktur pengelolaan resiko masih dalam proses penyusunan sehingga penyelenggaraan SPIP belum dapat dilaksanakan secara maksimal, pelaksanaan monitoring terkait penerapan risiko operasional dan risiko strategis yang ada di seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Balikpapan belum sepenuhnya dilaksanakan setiap triwulan dan pelaksanaan audit kinerja berbasis resiko untuk menilai aspek ekonomis, efisien dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis belum sepenuhnya dilaksanakan.

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain:

- 1) Pelatihan Manajemen Risiko (MR) bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKP RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Asistensi Implementasi Manajemen Risiko–SPIP Terintegrasi;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi SPIP secara berkala setiap semester;
- 4) Melaksanakan workshop penilaian resiko yang diikuti oleh Pejabat Administrator masing-masing Perangkat Daerah;
- 5) Peningkatan kapasitas APIP dan pembinaan SPIP kepada seluruh perangkat daerah.

2. Sasaran Strategis 2 : Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel

Menurut Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 tahun 2019 terdapat 8 (delapan) aspek penilaian untuk mengukur indeks sistem merit yaitu **ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun**, pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, pengembangan karier, pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif dan transparan, manajemen kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala, penggajian dan penghargaan, perlindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas serta ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN.

Adapun penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen ASN bertujuan menjamin terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi Pemerintah, mendorong

terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, sejahtera, dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Pada tahun 2022, Indeks Sistem Merit memiliki target sebesar 0,69 poin dan dapat terealisasi sebesar 0,65 poin dengan capaian kinerja sebesar 94,20% dengan kategori “sangat tinggi”. Walaupun capaian kinerjanya sudah sangat tinggi, namun indeks sistem merit belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan karena masih terdapat beberapa catatan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang harus dipenuhi dari setiap 8 (delapan) aspek penilaian sistem merit oleh Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana dalam Surat KASN Nomor 106/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya pada layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian dan penerapan manajemen talenta.

Dalam rangka untuk mendukung perbaikan sistem merit tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja indeks sistem merit pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyusun peta jabatan yang sudah ditetapkan PPK dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 tahun dengan rincian kebutuhan menurut jenis jabatan;
- b. Mengintegrasikan data kepegawaian dalam SIMPEG dengan data kompetensi dan kinerja serta diperbarui secara berkala;
- c. Menunjukkan dalam profil pegawai di SIMPEG;

- d. Menyusun rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 tahun dengan rincian berdasarkan jenis jabatan;
- e. Menyusun dan menetapkan kebijakan internal terkait pengadaan ASN yang diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan;
- f. Melaksanakan program pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan program Latsar kepada para CPNS sebagaimana diatur dalam PERLAN 1/2021 dan KEPKA LAN 93/2021;
- g. Menyusun dan menetapkan SKJ setiap level jabatan sesuai dengan peta jabatan terbaru;
- h. Melaksanakan pemetaan kompetensi untuk setiap level jabatan secara berkala yang telah dikelola dalam profil pegawai pada sistem informasi;
- i. Menyusun kebijakan internal terkait manajemen talenta serta mekanisme akuisisi talenta yang telah ditetapkan PPK dengan mengacu pada PERMENPAN 3 Tahun 2020;
- j. Membangun sistem informasi untuk mengakomodir pemetaan talenta dan rencana suksesi;
- k. Menyusun analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi seluruh pegawai yang diperbarui secara berkala;
- l. Menyusun analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala;
- m. Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai serta pelaksanaan diklat berdasarkan hasil analisis kesenjangan per individu pegawai yang dikaitkan dengan kebutuhan organisasi;
- n. Melaksanakan program praktik kerja dan/atau pertukaran pegawai secara terjadwal dan dievaluasi;
- o. Menyusun pedoman dan melaksanakan program *coaching* dan mentoring secara terjadwal serta dievaluasi;
- p. Menyusun dan menetapkan rancangan peraturan pola karier yang telah disesuaikan dengan manajemen talenta dan rencana suksesi;

- q. Menetapkan kebijakan internal terkait mekanisme pengisian JPT secara terbuka, serta tata cara promosi dan mutasi, yang disesuaikan dengan manajemen talenta dan rencana suksesi;
- r. Melaksanakan penilaian kinerja berkala sebulan sekali berdasarkan target SKP Bulanan yang disertai dialog kinerja;
- s. Menyusun analisis permasalahan kinerja berdasarkan hasil analisis kesenjangan kinerja individu pegawai dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- t. Menjadikan hasil penilaian kinerja sebagai salah satu aspek utama dalam penetapan *talent pool*;
- u. Memperhitungkan hasil penilaian kinerja berdasarkan realisasi SKP Bulanan sebagai faktor utama dalam pemberian tunjangan kinerja;
- v. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi secara terjadwal;
- w. Mengintegrasikan data penegakan disiplin, kode etik, dan kode perilaku dengan sistem BKN secara dua arah;
- x. Mengintegrasikan data kepegawaian dalam SIMPEG dengan data kinerja, dan pembinaan pegawai;
- y. Mengintegrasikan e-kinerja dengan sistem pengembangan karier pegawai;
- z. Memanfaatkan *assessment centre* untuk memetakan kompetensi seluruh pegawai secara berkala.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah

melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Survey kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik meliputi 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Laporan hasil survei kepuasan masyarakat tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pada tahun 2022, indeks kepuasan masyarakat mendapat predikat “sangat tinggi” karena memiliki capaian kinerja sebesar 103,32% dengan realisasi kinerja sebesar 85,24 poin, mengalami kenaikan sebesar 2,74 poin dari nilai IKM tahun 2021 yang hanya sebesar 82,50 poin. Dari 9 unsur-unsur survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana & prasarana, capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) di 90 Unit Pelayanan Publik (UPP) Pemerintah Kota Balikpapan bervariasi dikarenakan nilai unsur SKM yang terendah serta tertinggi juga berbeda-beda.

Dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) senantiasa melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun perbaikan tersebut meliputi penyusunan dan memperbaharui standar operasional prosedur, perbaikan sarana dan prasana penunjang pelayanan publik, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan IT dan melakukan inovasi pelayanan publik secara terus menerus untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan, inventarisasi keluhan serta harapan masyarakat dan segera lakukan perbaikan. Sedangkan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melalui Bagian Organisasi senantiasa melaksanakan pendampingan dan pembinaan pelayanan publik bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Balikpapan mulai dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga membangun budaya pelayanan prima.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan juga melakukan perubahan drastis pada prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai inovasi layanan yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya adalah Inovasi Pantai Balikpapan yang dapat diakses masyarakat pada alamat <https://capil.balikpapan.go.id/layanan>. Inovasi Pantai Balikpapan berdampak secara signifikan terutama kepada masyarakat Kota Balikpapan yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan karena pelayanan dapat diakses dimana dan kapan saja. Pelayanan *online* telah berhasil meningkatkan kualitas layanan kependudukan yang sebelumnya pada pelayanan *offline* hanya mampu melayani permohonan sebanyak 200-300 dokumen setiap hari dengan jangka waktu pelayanan 3 hari kerja. Setelah beralih ke pelayanan *online* jumlah masyarakat yang dilayani meningkat, dengan rata-rata

menjadi 800-1000 dokumen permohonan setiap harinya dengan jangka waktu penyelesaian dokumen maksimal 1 hari kerja. Pelayanan *online* juga mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan integritas layanan. Masyarakat juga dapat memantau proses pelayanan pada riwayat permohonan di website layanan. Pelayanan online juga mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan integritas layanan untuk mencegah pungutan liar kepada masyarakat.

Inovasi ini juga turut berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi sampah pengunjung dan *paperless* karena dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Surat Pindah dan Akta Pencatatan Sipil tidak dicetak dalam blanko khusus namun dokumen dikirimkan dalam bentuk file dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat. Khusus untuk dokumen yang tidak dikirim melalui riwayat permohonan dan email seperti KTP dan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah melakukan kerjasama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang memiliki kesibukan dan berhalangan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tetap bisa mendapatkan pelayanan prima.

Selain masyarakat yang dapat melihat proses layanan yang diajukan, inovasi Pantai Balikpapan juga menghadirkan monitoring dan evaluasi internal Disdukcapil dalam proses pelayanan. Kepala Dinas dan Pejabat Struktural dapat memantau langsung proses layanan melalui komputer atau *smartphone* untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan apabila terdapat kendala pada proses layanan yang membuat masyarakat bertanya melalui layanan pengaduan atau menghubungi Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, proses

pemberian solusi dapat lebih cepat daripada sebelumnya, yang dahulu memakan waktu lebih dari 1 jam, sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan telah diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan. Di samping itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga telah memiliki Mal Pelayanan Publik, bertempat di gedung DPMPTSP yang telah *disoft-launching* oleh Wali Kota Balikpapan pada Februari 2021 lalu. Pelayanan yang diselenggarakan pada MPP tidak hanya pelayanan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tetapi juga pelayanan dari instansi vertikal dan swasta yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan.

Selain itu, berbagai upaya perbaikan dalam pelayanan publik juga telah dilakukan oleh 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kota Balikpapan seperti perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas petugas pelayanan dengan adanya *front office* pelayanan dan sikap petugas pelayanan yang ramah dan responsif dalam melayani, perbaikan sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan agar dapat memberikan kenyamanan kepada para pengunjung, menyiapkan berbagai sarana pengaduan antara lain adanya ruang pengaduan dengan petugas pelayanan khusus yang melayani pengaduan masyarakat sehingga aduan/ keluhan dapat segera ditindaklanjuti maupun tersedianya kotak saran/ kotak pengaduan, pemanfaatan media sosial kecamatan dan kelurahan, nomor pengaduan dan pengaduan langsung ke pejabat yang berwenang menerima pengaduan dan keluhan masyarakat serta mendorong munculnya inovasi layanan oleh para aparatur kecamatan dan kelurahan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap

yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah Rata-Rata Lama Sekolah/ RLS (*mean years of schooling*), dan Harapan Lama Sekolah/ HLS (*expected years of schooling*). RLS menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan RLS berdasarkan penduduk yang berumur 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Sedangkan HLS mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk usia tertentu dimasa mendatang. HLS dihitung berdasarkan penduduk usia 7 tahun ke atas agar konsisten dengan referensi umur pada program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

Diketahui bahwa RLS Kota Balikpapan tahun 2022 sebesar 10,92 tahun, artinya rata-rata penduduk Kota Balikpapan usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 10 hingga 11 tahun atau setara dengan kelas 1 sampai 2 SMA. Sementara itu, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun Kota Balikpapan tahun 2022 sebesar 14,23 tahun atau setara dengan tingkat Diploma II. Berdasarkan RSL dan HLS tersebut maka dapat diketahui bahwa Indeks Pendidikan Kota Balikpapan sebesar 0,759 poin dengan capaian kinerja sebesar 101,20% dengan predikat “sangat tinggi”.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara

lain pemberian Subsidi Uang Sekolah (SPP) bagi siswa di sekolah swasta (SD dan SMP), melaksanakan pengadaan perlengkapan siswa 3 set seragam sekolah (putih merah/biru, batik, pramuka/ olah raga), yang melibatkan UMKM dalam penyediaan batik Balikpapan, pembangunan ruang kelas baru (RKB) yang terdiri dari 6 RKB SD dan 4 RKB SMP, melaksanakan renovasi sarana dan prasarana sekolah meliputi renovasi ruang guru sebanyak 3 ruang guru, 1 ruang UKS, 2 ruang kelas, 6 ruang laboratorium, 1 ruang tata usaha (TU) sekolah, 2 ruang Kepala Sekolah, 10 toilet sekolah dan 1 ruang ibadah serta melaksanakan pengadaan alat/ media pendidikan seperti pengadaan 3 Paket Chromebook yang masing-masing terdiri dari 15 unit *Chrome Book*, 1 konektor dan 1 proyektor.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memperluas cakupan program akses layanan pendidikan antara lain pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada 2 lokasi yang berbeda dengan memanfaatkan fasilitas umum yang diberikan oleh Pengembang Perumahan serta lahan aset milik Pemerintah Kota Balikpapan dengan progres pelaksanaan dalam tahap lelang dengan skema kontrak *multiyear* dan rencananya akan selesai di tahun 2023. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan bersama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Balikpapan sejak tahun 2017 juga terus melaksanakan pengembangan SDM dengan berupaya merekrut guru PNS/ Non PNS pada Jenjang SD/ SMP dengan kualifikasi pendidikannya yang sesuai baik melalui mekanisme penerimaan CPNS maupun PPPK.

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan faktor yang penting di dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka menciptakan manusia yang sehat, mandiri, cerdas dan produktif serta mewujudkan

kesejahteraan lahir dan batin. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat telah dilakukan pemerintah, diantaranya melalui pemerataan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan kesehatan secara merata, mudah dan murah serta dapat menjangkau masyarakat luas.

Untuk mengetahui kualitas kesehatan masyarakat adalah dengan mengukur Indeks kesehatan yang merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi kesehatan yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat. Indikatornya adalah Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, selama periode 2010 hingga 2022 UHH telah meningkat sebesar 0,88 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,10 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kota Balikpapan adalah 73,9 tahun, dan pada tahun 2022 mencapai 74,78 tahun. Umur Harapan Hidup Kota Balikpapan tahun 2022 sebesar 74,76 menunjukkan bahwa penduduk Balikpapan yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga usia 74 tahun 10 bulan. Sehingga dapat diketahui bahwa Indeks Kesehatan Kota Balikpapan sebesar 0,843 poin dengan capaian kinerja sebesar 100,54% dengan predikat “sangat tinggi”.

Capaian Indeks Kesehatan menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kota Balikpapan secara berkelanjutan pada tahun 2022, keberhasilan tersebut ditinjau dari lamanya usia penduduk kota Balikpapan terhitung sejak lahir. Terkait dengan tingkat capaian indikator sasaran tersebut maka asumsi perilaku hidup sehat masyarakat telah dilaksanakan secara baik.

Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan perangkat daerah terkait guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Balikpapan antara lain penguatan sistem kesehatan melalui pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan pemberian subsidi iuran BPJS bagi PBI dan Peserta Kelas III (PBPU) dan pembangunan/ pengembangan RSIA Sayang Ibu menjadi RSUD di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan, pengadaan obat dan vaksin, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan, melaksanakan koordinasi dengan BKPSDM Kota Balikpapan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan (pendukung) dengan mengusulkan kebutuhan melalui pengisian aplikasi Renbut (Rencana Kebutuhan SDM) maupun Eformasi baik melalui CPNS maupun PPPK.

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan juga melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat melalui optimalisasi KIE Kesehatan, penyelenggaraan promosi kesehatan umum dan gerakan hidup bersih dan sehat melalui institusi kesehatan, sekolah, tempat ibadah, sarana prasarana serta Germas secara berkala dengan melibatkan masyarakat dan seluruh lintas sektor di wilayah tersebut, meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular seperti penggunaan kelambu air yang merupakan implementasi dari inovasi penurunan kasus DBD, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), seluruh puskesmas (27 Puskesmas) dan 9 Rumah Sakit telah menerapkan program *Directly Observed Treatment Shortcourse* (DOTS), melakukan penyisiran kasus TB di rumah sakit maupun klinik swasta secara berkala setiap triwulan, melibatkan peran aktif kader

TB LKNU dalam pemantauan pasien TB yang sedang menjalani pengobatan, melakukan validasi data berkala dengan melibatkan LSM Pendamping Sebaya dan Layanan Pengobatan ARV (PDP), melaksanakan pembinaan regulasi sarana prasarana dan sertifikasi bidang kesehatan seperti sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, fasilitas kesehatan, Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan, dan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. IPLM bertujuan untuk melihat mengidentifikasi permasalahan yang menghambat perkembangan perpustakaan di Kota Balikpapan dan mengetahui kebutuhan informasi seperti apa yang dibutuhkan masyarakat serta mewujudkan perpustakaan menjadi bagian dari kehidupan dan aktivitas masyarakat, sehingga tercapai nilai tambah dalam hal informasi, ilmu pengetahuan dan jasa perpustakaan yang lain dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) tersebut.

Berdasarkan Hasil Perhitungan Mandiri Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan diketahui bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Balikpapan tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 55,64 poin dengan capaian

kinerja sebesar 529,90% atau memperoleh predikat “sangat tinggi”. Namun perlu digaris bawahi bahwa terdapat perbedaan skala nilai antara target dengan realisasi berdasarkan metode perhitungan yang baru sehingga pada akhirnya berpengaruh pada tingginya capaian kinerja.

Adapun hal - hal yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sesuai program/ kegiatan yang telah dilaksanakan:

- a. Pemerataan layanan perpustakaan pada tahun 2022 yang terdapat sebanyak 220, terdiri dari 34 perpustakaan umum, 164 perpustakaan sekolah/madrasah, 9 perpustakaan khusus, dan 13 perpustakaan perguruan tinggi yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Balikpapan;
- b. Ketercukupan koleksi yang terdapat pada perpustakaan di Kota Balikpapan berdasarkan tahun 2022 adalah sebanyak 447.505 buku, dengan komposisi jenis buku, kategori Sains merupakan jenis buku dengan jumlah koleksi terbanyak yakni 65.630 buku atau sebesar 14,6% dari total keseluruhan koleksi, sedangkan jenis buku dengan jumlah koleksi paling sedikit adalah kategori Filsafat dan Psikologi yakni 12.406 buku atau 2,77% dari total keseluruhan koleksi buku;
- c. Ketercukupan tenaga perpustakaan di Kota Balikpapan tahun 2022 adalah sebanyak 470 orang dengan komposisi tenaga teknis merupakan jumlah yang terbanyak yakni 437 orang atau sebesar 92,9%, sedangkan pustakawan yang memiliki kualifikasi ilmu perpustakaan sebanyak 33 orang (7,0%);
- d. Tingkat kunjungan masyarakat per hari dengan rata-rata jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Kota Balikpapan adalah sebanyak 7.325 kunjungan/ hari. Adapun jumlah kunjungan terbanyak adalah di perpustakaan sekolah/madrasah yakni sebanyak 6.118 kunjungan/ hari. Jumlah paling sedikit adalah perpustakaan khusus, yakni sebanyak 10 kunjungan/hari;

- e. Jumlah perpustakaan berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang menunjukkan bahwa perpustakaan ber-SNP (sudah ada, proses perpanjangan, dan dalam proses pengajuan) di Kota Balikpapan adalah sebanyak 83 perpustakaan;
- f. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dengan jumlah kegiatan sosialisasi secara total di Kota Balikpapan adalah sebanyak 364 kegiatan. Sementara jika dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, secara total di Kota Balikpapan sebanyak 8.923 masyarakat pernah mengikuti kegiatan tersebut;
- g. Jumlah anggota perpustakaan dengan Jumlah masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan di Kota Balikpapan adalah sebanyak 126.175 orang. Keanggotaan terbanyak di Perpustakaan sekolah/madrasah yakni 69.537 orang dan keanggotaan tersedikit yaitu Perpustakaan Khusus dengan 66 orang.

Berdasarkan data di atas maka diketahui bahwa Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat dikatakan cukup. Namun perlu ditingkatkan dalam indikator ketercukupan perpustakaan, koleksi, pemerataan layanan, keterlibatan masyarakat maupun tenaga perpustakaan yang masih bisa ditingkatkan, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk melanjutkan program yang meningkatkan literasi masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), antara lain:

- a. Meningkatkan jumlah perpustakaan pada kategori jumlah perpustakaannya masih tergolong rendah dan cakupan masyarakatnya besar;
- b. Meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan pada perpustakaan umum, sekolah, dan perguruan tinggi;
- c. Meningkatkan penyediaan bahan bacaan dalam bentuk digital bagi masyarakat dengan bentuk berbagi koleksi

- digital yang berasal dari Perpustakaan RI maupun yang dimiliki Perpustakaan Kota Balikpapan;
- d. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan terus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan ilmu perpustakaan serta kegiatan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan yang profesional dalam rangka meningkatkan jumlah tenaga perpustakaan yang berkualitas;
 - e. Melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia yang potensial di lingkungan perpustakaan untuk mendukung/ membantu pustakawan dalam memberikan layanan kepada masyarakat;
 - f. Mengadakan berbagai kegiatan di perpustakaan untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan. Adapun kegiatannya seperti lomba, pelatihan, workshop, pameran buku, maupun kegiatan virtual, kunjungan dari sekolah;
 - g. Penambahan koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan/ digemari masyarakat;
 - h. Melaksanakan edukasi terkait SNP, tata cara mendaftarkan perpustakaan, dan informasi tentang manfaat dari terpenuhinya SNP, baik bagi perpustakaan tersebut maupun masyarakat yang dilayaninya;

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Pemuda

Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan indeks yang menilai daya saing kepemudaan dan keolahragaan dari sisi prestasi pemuda non keolahragaan dan keolahragaan dari seluruh pemuda dan atlet yang dibina. Hasil indeks ini adalah perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.

Pada tahun 2022 dapat diketahui bahwa Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,064 poin dengan capaian kinerja sebesar 304,75%

atau berpredikat “sangat tinggi, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas baik bagi pemuda yang berprestasi maupun prestasi yang diperoleh pada tahun 2022.

Dalam pencapaian Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan ditemukan beberapa kendala dan pendukung dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Adapun kendala yang ditemui antara lain belum efektifnya implementasi regulasi kepemudaan di Balikpapan, gerakan pramuka belum mampu menarik minat kaum muda milenial untuk aktif, masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam mendorong percepatan pembangunan Kota Balikpapan serta belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan. Selain itu, dalam bidang keolahragaan masih kurangnya prestasi keolahragaan Kota Balikpapan di event-event Kejuaraan regional Provinsi Kaltim maupun Nasional, kurangnya partisipasi masyarakat Berolahraga Kota Balikpapan serta belum optimalnya pembinaan dan pengembangan juga menjadi kendala yang ditemui di lapangan. Sedangkan beberapa hal yang menjadi pendukung dalam pencapaian indeks ini yaitu tersedianya pemuda yang dapat dikembangkan bakat dan potensinya dalam bidang kepemudaan maupun keolahragaan. Lembaga Pendidikan/ Sekolah dapat dijadikan ujung tombak kegiatan cabang olahraga usia dini dan perkumpulan/ klub olahraga yang akan menjadi tempat atau sarana untuk mendidik atau membina atlet berprestasi serta adanya dukungan perangkat daerah lain/ mitra/ organisasi kemasyarakatan terkait terhadap program kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan. Selain itu, jumlah penduduk usia produktif/ pemuda merupakan potensi/ aset yang dapat dikembangkan menjadi motor penggerak pembangunan Kota Balikpapan. Potensi pemuda/ bibit atlet tersebut dimungkinkan untuk ikut

berpartisipasi dalam pencapaian prestasi disetiap event tingkat wilayah, daerah maupun nasional.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan sehingga Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan dapat tercapai melalui kepemudaan antara lain:

- a. Melaksanakan mendorong komitmen pimpinan dan dukung pegawai melalui peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan kepemudaan guna mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Meningkatkan peran koordinasi lintas sektor dan sinergitas antara Perangkat Daerah, lembaga, instansi, dunia usaha maupun masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kepemudaan dan olahraga Kota Balikpapan;
- c. Meningkatkan kapasitas organisasi dan komunitas pemuda serta partisipasi aktif dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda untuk peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- d. Meningkatkan peran Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa;
- e. Optimalisasi peran pemuda melalui OKP dan Komunitas Pemuda.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui keolahragaan antara lain:

- a. Menyediakan pelatih profesional pada cabang olahraga tertentu;
- b. Memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga (bonus) sebagai bentuk reward dan apresiasi;
- c. Melaksanakan pembibitan atlet olahraga, pemasyarakatan olahraga serta memperkenalkan olahraga masyarakat dan olahraga berprestasi baik melalui kegiatan kompetisi atau pertandingan dalam daerah maupun mengikuti pertandingan di luar daerah;
- d. Menyelenggarakan pelatihan SDM olahraga yang berlisensi dan resmi secara berkelanjutan serta melakukan

- pengiriman SDM Olahraga ke Daerah lain untuk mengikuti pelatihan SDM Olahraga yang berlisensi;
- e. Menggalakkan sosialisasi keolahragaan kepada masyarakat dan mitra olahraga;
 - f. Melengkapi infrastruktur pendukung sarana prasarana olahraga seperti pembangunan lapangan bulu tangkis tahun 2023, rencana pembangunan kolam renang tahun 2024; dan
 - g. Melaksanakan berbagai event-event kejuaraan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta memperkenalkan olah raga baru dan olah raga kemasyarakatan yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat.

8. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Namun, jumlah cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan pemerintah, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya bukanlah indikator penentu kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam rangka menyusun data dan informasi dalam pembangunan kebudayaan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Badan Pusat Statistik meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada 2018. IPK disusun berdasarkan konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO. Konsep tersebut memuat serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. IPK dibuat sebagai instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan sehingga IPK memuat tujuh dimensi.

Salah satu dari 7 (tujuh) dimensi itu adalah dimensi warisan budaya yang menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh

pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya, baik warisan budaya benda dan tak benda, dalam pemajuan kebudayaan. Selain itu dalam ditentukan beberapa indikator komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan seperti persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku seni.

Indeks Warisan Budaya Kota Balikpapan pada Tahun 2022 memperoleh indeks sebesar 0,464 poin dengan capaian sebesar 93,55% atau mendapat predikat “sangat tinggi”. Namun indeks tersebut belum dapat melampau target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,492 poin, sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut. Salah satunya disebabkan karena belum terpenuhinya SDM Kebudayaan dan Kelompok Kebudayaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi sertifikasi baik untuk SDM maupun sertifikasi Sanggar Seni yang ada di Balikpapan.

Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendorong pencapaian Indeks Warisan Budaya, antara lain:

- a. Pengelolaan terhadap pengelola objek pemajuan kebudayaan, objek pemajuan tradisi budaya dan lembaga adat yang aktif di Balikpapan;
- b. Melakukan pembinaan terhadap kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan;
- c. Mengadakan berbagai event dan/atau mengkomodir untuk penampilan pemajuan tradisi budaya kota Balikpapan;
- d. Melakukan registrasi terhadap Lembaga Adat yang ada di Balikpapan;
- e. Mengadakan berbagai festival seni dan/ atau mengkomodir untuk penampilan kelompok sanggar seni kota Balikpapan;
- f. Melakukan pembinaan terhadap pelaku seni di Balikpapan;

- g. Melakukan pembinaan terhadap Lembaga pelaku Sejarah Lokal di Balikpapan;
- h. Optimalisasi pendataan, registrasi dan pemeliharaan Cagar Budaya yang ada di Balikpapan; dan
- i. Memelihara kelestarian Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan cara diantaranya dengan memberikan honorarium kepada Juru Pelihara Cagar Budaya.

9. Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah Kota Balikpapan adalah salah satu Pemerintah Daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (AGR) dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan gender. Anggaran Responsif Gender ini dihitung untuk mengetahui seberapa besar porsi anggaran responsif gender dari seluruh anggaran yang ada pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Diketahui bahwa tahun 2022, Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dapat terealisasi sebesar 23,04% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 6,04% dengan capaian kinerja sebesar 135,53% berpredikat “sangat tinggi”. Capaian Persentase Anggaran Responsif Gender tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan gender secara berkelanjutan pada tahun 2022.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian strategis ini antara lain sudah terdapat komitmen serta regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terkait pembangunan berbasis pengarusutamaan gender. Komitmen Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota No.27 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan regulasi terkait dituangkan dalam Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 900/1129/BPKD Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 dimana pada saat pelaksanaan Asistensi RKA, SKPD menyertakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan berbasis Gender,

Dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) Kegiatan.

Selain itu, pelaksanaan penguatan SDM perencana bagi Perangkat Daerah melalui kegiatan pelatihan penyusunan PPRG secara berkelanjutan dan pendampingan dalam penyusunan ARG bagi Perangkat Daerah juga telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang diikuti dengan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang direview oleh Inspektorat sehingga mendorong Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA menerapkan mekanisme PPRG.

10. Sasaran Strategis 10 :Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas

a. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan infrastruktur secara keseluruhan. Indeks ini berfokus pada penilaian dari berbagai aspek infrastruktur, termasuk jaringan jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan kualitas lingkungan dengan menunjukkan tingkat ketersediaan infrastruktur, kualitas infrastruktur, dan tingkat pemanfaatan infrastruktur. Indeks ini juga mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur dan tingkat pengungkapan yang diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas. Indeks Pembangunan Infrastruktur menjadi alat yang berguna untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah atau negara.

Berdasarkan Hasil Perhitungan Mandiri Daerah, Indeks Pembangunan Infrastruktur Kota Balikpapan tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 77.63 poin dengan capaian kinerja sebesar 99,27% atau memperoleh predikat “sangat tinggi”.

Walaupun capaian kinerjanya sudah sangat tinggi, namun indeks pembangunan infrastruktur belum mampu

melampaui target yang telah ditetapkan karena masih ditemukan kendala di lapangan antara lain pada aspek infrastruktur layanan air minum terdapat kendala terkait keterbatasan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum layak, sedangkan pada aspek infrastruktur drainase masih belum terlaksananya pembangunan bangunan air dengan spesifikasi Pengendali Banjir DAS Ampal (MYC) secara maksimal karena pengendalian banjir DAS Ampal dilaksanakan secara *multiyears* dimana sejak Perubahan APBD TA 2021 hingga Perubahan APBD TA 2023 telah disepakati pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir DAS Ampal sebesar Rp. 150 Miliar yang difokuskan pada saluran sekunder Balikpapan Baru dan saluran sekunder Inhutani.

Namun selain kendala tersebut, tentunya terdapat beberapa pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara kolaborasi guna mendukung meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas, antara lain:

- 1) Pada aspek infrastruktur drainase, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah melaksanakan revisi masterplan drainase Kota Balikpapan dan MK pembangunan bangunan air pengendali banjir DAS Ampal serta melaksanakan pembangunan drainase saluran primer Sepinggian Kelurahan Sepinggian Baru. Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan juga telah melaksanakan rehabilitasi bendali telagasari yang berada di Kelurahan Kecamatan Balikpapan Kota dan normalisasi saluran primer Aji Raden bagian hulu serta saluran primer Selok Api bagian hilir serta saluran primer telindung yang dilakukan swakelola serta karya bakti TNI. Selain itu, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan juga telah menyusun perencanaan pengadaan tanah Bendali II untuk proses rehabilitasi selanjutnya.

- 2) Pada aspek infrastruktur layanan air minum, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan guna meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas, antara lain melaksanakan penyusunan kajian dan penyusunan *Basic Design* jaringan perpipaan SPAM regional Sepaku di Wilayah Kota Balikpapan, melaksanakan supervisi pembangunan jaringan distribusi utama sekunder SPAM Teritip, melaksanakan pembangunan pipa distribusi air minum yang terdapat di beberapa wilayah di Kota Balikpapan (Jl. Perjuangan RT.63 Kel. Batu Ampar, RT.21 Kel. Karang Joang, Jl. Batu Ratna RT.54 Kel. Karang Joang dan Jl. Batu Ratna RT.11 Kel. Karang Joang). Selain itu guna mengatasi keterbatasan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum layak, Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan pemanfaatan *idle capacity* IPTA Teritip I sebesar 40% melalui perluasan jaringan distribusi sekunder dan program pemasangan sambungan rumah 2.000 SR dan terus mendorong inisiasi dan persiapan SPAM Regional Kaltim (Balikpapan – Kukar – PPU) khususnya yang bersumber dari waduk sepaku Semoi serta melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan juga dilaksanakan pembebasan lahan embung Aji Raden seluas 45 ha;
- 3) Pada aspek infrastruktur jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian indikator ini antara lain melaksanakan kegiatan peningkatan jalan lingkungan I s/d XVI (Bankeu), menyusun masterplan jaringan jalan lingkungan, menyusun pra desain jembatan Sumber – Kariangau, melaksanakan survey kondisi jalan, melaksanakan pelebaran jalan taman sari (Lanjutan), melaksanakan perbaikan simpang dan jalan Indrakilla (Kampung Timur), melaksanakan pengadaan tanah untuk Jalan Letjen. Soeprapto, melaksanakan

pembuatan turap/ bronjong (Jalan Proklamasi, Jalan Sangga Buana), melaksanakan peninggian Jalan Tjutjup Suparna depan Pasar Segar, melaksanakan peningkatan jalan (Jalan Tepo, Jalan Proklamasi (Lanjutan DAK 2021), melaksanakan peningkatan jalan, Drainase dan Trotoar di Plaza Kebun Sayur, melaksanakan pemeliharaan 74 Jalan (Jalan RT. 15 dan RT. 35 Kel. Damai - Jalan Praja Mukti III - Jalan Gunung Empat Kel. Margo Mulyo - Jalan RT. 06 Kel. Gunung Samarinda Baru), melaksanakan peningkatan Jembatan Jalan Selili, Peningkatan Jembatan (Pandan Sari, RT 67 Kel. Manggar), melaksanakan perbaikan jalan dan saluran drainase Jalan Inspeksi (Sungai Sepinggan Kelurahan Sepinggan dan Kecamatan Balikpapan Selatan), melaksanakan perbaikan siring, jalan, dan drainase lingkungan (RT.15 dan Siring RT.51 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara), melaksanakan penanganan longsor RT.14 Tamansari Bukit Mutiara (WIKA) Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, melaksanakan perbaikan turap, jalan dan Drainase RT.63 Asrama Bukit Kelurahan Baru Ilir, melaksanakan perbaikan jalan dan gorong-gorong jalan masuk Perum Daksa RT.07 Kelurahan Sepinggan;

- 4) Pada aspek tingkat pelayanan jalan, pengelolaan dan penyediaan transportasi serta layanan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti penerapan secara kontinu Perwali 60 Tahun 2016 tentang jam operasional angkutan alat berat yang ditetapkan akhir tahun 2016, melaksanakan sosialisasi keselamatan angkutan orang dan angkutan barang, pelaksanaan penertiban/operasi pemeriksaan (razia) angkutan orang dan barang, pengujian laik jalan kendaraan angkutan umum dan barang, penanganan pelanggaran *overloading*,

pemeliharaan kendaraan sarana angkutan umum masal dan prasarana pendukungnya, pemeliharaan jaringan listrik penerangan jalan umum, pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan umum, pengadaan alat uji kendaraan (emisi gas buang, ketebalan asap, alat uji visual untuk pengecekan komponen-komponen bawah kendaraan), penyediaan perlengkapan jalan, jalur sepeda dan zona selamat sekolah, penyediaan fasilitas pendukung/ pembangunan halte angkutan, pemeliharaan bangunan gedung terminal type-c batu ampar dan balikpapan permai serta penyediaan fasilitas musholla serta pelaksanaan kolaborasi dengan stakeholder perhubungan. Di samping itu, mengembangkan inovasi teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa, melaksanakan penganggaran kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan melalui APBD Provinsi, APBN dan CSR pihak ketiga seperti penyediaan kamera CCTV dan jaringan di simpang Kampung Timur dan pembangunan APILL di jalan MT. Haryono simpang beler.

b. Persentase Permukiman Layak Huni

Infrastruktur yang terpadu dan berkualitas adalah rangkaian fasilitas dan sistem yang saling terkait dan menyatu dengan baik untuk memberikan dukungan yang optimal bagi kebutuhan masyarakat dan ekonomi suatu negara atau wilayah. Infrastruktur yang terpadu berarti adanya keterkaitan dan keterpaduan antara berbagai jenis infrastruktur, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien. Sedangkan infrastruktur yang berkualitas berarti memenuhi standar dan spesifikasi yang baik, memiliki kapasitas yang cukup, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas, salah satunya diindikasikan oleh persentase permukiman layak huni. Permukiman layak huni adalah

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan penataan sesuai dengan standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat.

Diketahui bahwa persentase permukiman layak huni di Kota Balikpapan tahun 2022 telah mencapai 99,07 % dari target kinerja 99,05% dengan tingkat capaian kinerja 100,02 %. Persentase permukiman layak huni dihasilkan dari pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 52,42 Ha dari luasan kawasan kumuh Kota Balikpapan sebesar 153,3 Ha sesuai Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-326/2020 tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan dan dibandingkan dengan luasan permukiman kota Balikpapan. Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memiliki kewenangan untuk mengurangi kawasan kumuh hanya seluas 5,4 Ha. Luasan tersebut ditangani sebesar 1,41 Ha pada tahun 2022.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan juga berhasil mengupayakan dan mengkoordinasikan penanganan kawasan kumuh dengan KOTAKU dengan pendanaan diluar APBD Kota Balikpapan seluas 51,01 Ha. Komitmen dari Kepala Daerah sangat mendukung percepatan pengurangan luasan kawasan kumuh sehingga permukiman layak huni Kota Balikpapan dapat tercipta secara optimal.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan guna meningkatkan persentase permukiman layak huni antara lain melaksanakan penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan

disusunnya 4 (empat) DED penataan kawasan kumuh Damai, Baru ilir, Karang Jati, Klandasan ilir, melaksanakan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh di RT. 04 Kelurahan Damai, melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh, melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan target 66 unit rumah dan terealisasi peningkatan kualitas RTLH sebanyak 70 unit rumah, dimana 66 peningkatan RTLH bersumber dari dana APBD dan 4 rumah bersumber dari *Corporate Social Responsibilitities* (CSR). Selain itu, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan juga melaksanakan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan pada 86 lokasi perumahan yang dituangkan dalam master data perumahan berbasis *Geographic Information System* (GIS).

11. Sasaran Strategis 11 :Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH adalah gambaran atas hasil pengukuran kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep *Environmental*

Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metodologi evaluasi indikator kualitas lingkungan hidup terbagi empat yaitu hasil dari pemantau kualitas air, sungai dan danau (Indeks Kualitas Air –IKA), hasil pemantauan kualitas udara (Indeks Kualitas Udara – IKU), hasil pemantauan tutupan lahan (Indeks Kualitas Lahan –IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Dapat diketahui bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 sebesar 68,15 poin dan tercapai realisasi sebesar 63,96 poin dengan capaian kinerja 93,85% atau mendapat predikat “sangat tinggi”. Namun indeks tersebut belum dapat melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Perhitungan IKLH berasal dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Secara detail Persentase Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12

Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan

Indikator	2022		Capaian
	Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Air (IKA)	47,32	50	106%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,02	84,29	95%
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65.33	50.32	77%

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang belum dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas lahan (IKL) sehingga berpengaruh pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Indeks Kualitas Udara (IKU) sebagai salah satu parameter perhitungan nilai IKLH mengalami penurunan, dari target yang seharusnya sebesar 89,02 Nilai IKU Tahun 2022 ini adalah 84,29. Penurunan tersebut dianalisa dari peningkatan jumlah kendaraan yang merupakan dampak dari ditetapkannya IKN dan adanya *project* perluasan Kilang Minyak Balikpapan serta adanya kegiatan pembangunan di dekat titik pemasangan alat pemantauan udara (*passive sampler*) di jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Soekarno Hatta km.7 Balikpapan. Dengan parameter yang diukur dan dipantau adalah SO₂ dan NO₂ sehingga nilai parameter tersebut akan dipengaruhi oleh emisi dari kendaraan;
- 2) Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebagai salah satu parameter perhitungan nilai IKLH mengalami penurunan dari target yang seharusnya sebesar 65,33 dan tahun ini hanya mencapai 50,32. Hal ini mengacu hasil verifikasi input data IKL pada sistem IKLH oleh Ditjen PPKL KLHK, dimana pada tahun 2021 data yang diverifikasi oleh KLHK sebesar 18.365,38 Ha. Sedangkan pada tahun 2022 ini, data yang diverifikasi oleh KLHK sebesar 502,404 Ha, atau terdapat 11 data input IKL yang tidak diakui menjadi IKL Kota Balikpapan.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup antara lain:

- 1) Untuk mendukung Indeks Kualitas Air (IKA), telah dilaksanakan pemantauan kualitas air sungai melalui kegiatan Prokasih yang dilakukan di 38 DAS/ Salter dan 106 titik, pemantauan kualitas air sungai minimal 2 kali dalam setahun untuk sungai wajib pantau, pengendalian pencemaran air limbah serta berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk bersinergi mengembangkan kebijakan serta sarana dan prasarana yang mendukung program pengendalian pencemaran air;
- 2) Untuk mendukung Indeks Kualitas Udara (IKU), telah dilaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* dengan jangka waktu pemaparan 2 (dua) minggu yang dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan 4 titik pemantauan untuk perwakilan lokasi permukiman, perkantoran, industri dan transportasi yang mewakili masing-masing triwulan, melakukan monitoring pengawasan berkala dan merencanakan peraturan dalam pengendalian penambahan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan di Kota Balikpapan serta berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, seperti Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk bersinergi mengembangkan kebijakan serta sarana dan prasarana yang mendukung program pengendalian pencemaran udara;
- 3) Untuk mendukung Indeks Kualitas Lahan (IKL), telah dilaksanakan pengelolaan konservasi ruang terbuka hijau/hutan kota, meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi ekosistem kawasan pesisir, meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) melalui

penghijauan dan reboisasi seperti melaksanakan aksi penanaman pohon di kawasan ruang terbuka hijau serta penanaman yang telah dilakukan masyarakat dan swasta baik di sekolah maupun di masing-masing kelurahan hingga CSR Perusahaan, melaksanakan kegiatan CGH (*Clean, Green and Healthy*);

Selain itu, terkait verifikasi input data IKL pada sistem IKLH oleh Ditjen PPKL KLHK yang menyebabkan terdapat 11 data input IKL yang tidak diakui menjadi IKL Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Wali Kota Balikpapan telah menyampaikan Surat Sanggahan Nomor 660/1532/DLH tanggal 27 Desember 2022 perihal Sanggah Hasil Ekspose IKLH - Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2022, terkait dengan hasil verifikasi data dimaksud. Melalui koordinasi sementara dengan tim verifikasi data ITL KLHK disampaikan alasan bahwa data yang tidak terverifikasi tersebut sudah masuk dalam tutupan hutan dan/atau belukar.

b. Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan

Implementasi Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah mengandung ketentuan 3R yakni *Right, Restriction and Responsibility*. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) untuk melakukan simplifikasi regulasi dan perizinan demi mendorong iklim investasi. Pemerintah memberikan kemudahan pada beberapa detail kebijakan Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun, Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah namun tetap memberikan pengawasan dan evaluasi yang ketat.

Berdasarkan Kementerian ATR/BPN dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah ini adalah ketentuan lebih

lanjut dari pasal 136-142 tentang Penguatan Hak Pengelolaan, Pasal 143-145 tentang Satuan Rumah Susun, Pasal 146 tentang Hak Pengelolaan/Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah serta Pasal 147 dan Pasal 175 tentang Penggunaan Dokumen Elektronik. Dalam konteks Hak Pengelolaan, diharapkan negara dapat berperan untuk mengatur lahan demi mengendalikan permasalahan keterbatasan tanah dan ruang. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa lahan dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan peruntukannya, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan lahan yang tidak tepat.

Berdasarkan perhitungan mandiri Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan diketahui bahwa bahwa target persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan pada tahun 2022 sebesar 89% dan tercapai realisasi sebesar 89,74% poin dengan capaian kinerja 101% atau mendapat predikat “sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatur peruntukkan penggunaan lahan secara berkelanjutan.

Pencapaian persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tersedianya informasi pola ruang, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam aplikasi *One Map One Data* yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan pemanfaatan ruang, telah dilaksanakannya layanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan penataan ruang yakni layanan ITR, layanan KRK, layanan ijin tapak (*site plan*) bangunan umum dan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta tersedianya papan informasi di beberapa kawasan Kota Balikpapan sebagai media

informasi kepada masyarakat untuk tertib dalam pemanfaatan ruang.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan serta Perangkat Daerah terkait, antara lain:

- 1) Melakukan penyusunan persetujuan substansi revisi RTRW Kota Balikpapan dan tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan;
- 2) Menyusun dokumen kajian Standarisasi Intensitas Bangunan 2 Kecamatan (Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Selatan);
- 3) Membangun sistem informasi “*One Map One Data*” dan melaksanakan Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Balikpapan memberikan pelayanan PKKPR, layanan Informasi Tata Ruang (ITR), ijin tapak (Site Plan) dan Keterangan Rencana Kota (KRK);
- 4) Mengembangkan dan memperkuat sistem perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat.
- 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan, termasuk pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran pada 6 kecamatan Kota Balikpapan;
- 6) Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang;
- 7) Mendorong pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, termasuk teknologi yang berorientasi pada penghematan lahan, seperti bangunan vertikal dan teknologi pertanian modern.

12. Sasaran Strategis 12 :Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota

a. Indeks Resiko Bencana

Indeks resiko bencana adalah nilai yang menunjukkan tingkat risiko bencana suatu daerah didasarkan atas variabel ancaman, kerentanan dan kapasitas. Indeks resiko bencana mengukur tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap risiko bencana, serta kemungkinan terjadinya bencana di wilayah tersebut. Indeks resiko bencana biasanya mencakup faktor-faktor seperti geografi, topografi, jenis tanah, curah hujan, ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, kepadatan penduduk, dan faktor manusia lainnya. Berdasarkan faktor-faktor ini, Indeks resiko bencana menghasilkan skor resiko yang dapat membantu dalam menentukan prioritas tindakan mitigasi risiko dan alokasi sumber daya.

Indeks resiko bencana dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menentukan langkah-langkah mitigasi dan persiapan untuk mengurangi risiko bencana. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi resiko bencana, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan efektif untuk mengurangi dampak bencana yang potensial terjadi.

Berdasarkan hasil *assessment* atau penilaian yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, indeks resiko bencana Kota Balikpapan pada Tahun 2022 memperoleh indeks sebesar 110 poin dengan capaian sebesar 97,27% atau mendapat predikat “sangat tinggi”. Namun indeks tersebut belum dapat melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 107 poin, sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut. Salah satunya disebabkan karena kurang lengkapnya dokumen dasar kebencanaan yaitu Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (PRB).

Untuk itu, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan melakukan berbagai upaya perbaikan guna mendorong pencapaian indeks resiko bencana. Adapun upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

- 1) Melaksanakan penyusunan dan melengkapi dokumen dasar kebencanaan yaitu Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (PRB);
- 2) Meningkatkan UPTD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha yang berada di kota Balikpapan. sehingga mendapatkan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sebagai Terbaik I Kategori Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Melakukan komunikasi, sosialisasi dan edukasi kebakaran kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana serta peningkatan *respon time* ketika mendapat laporan potensi kebakaran;
- 4) Melaksanakan pembentukan REDKAR dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan peran UPTD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan yang tersebar di setiap kecamatan sangat membantu untuk mencapai *respon time* kebakaran sehingga kejadian kebakaran bisa ditekan;
- 5) Membentuk Kelurahan Tangguh dan SPAB untuk meningkatkan kapasitas dalam upaya penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 6) Melaksanakan kerjasama *pentahelix* yang baik di kota Balikpapan sehingga ini sangat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kebakaran.

b. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Indeks ketentraman dan ketertiban digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban di negara atau wilayah tersebut. Indeks ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan tingkat stabilitas dan keamanan antara negara atau wilayah yang berbeda, serta sebagai acuan untuk menentukan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah. Selain itu, dalam hal ini indeks ketentraman dan ketertiban juga mencakup keamanan dan ketertiban dalam rangka pembangunan demokrasi dan politik di daerah yang dapat memberikan dampak positif pada pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta pencegahan konflik sosial sebagai upaya untuk mencegah terjadinya benturan atau perselisihan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda di masyarakat, yang dapat menimbulkan kekerasan, kerusuhan, dan ketidakstabilan sosial.

Berdasarkan Hasil Perhitungan Mandiri Daerah, Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Kota Balikpapan tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 0.8 poin dengan capaian kinerja sebesar 100% atau memperoleh predikat “sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah mampu mewujudkan dan meningkatkan ketertiban Kota Balikpapan tahun 2022. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan telah dilakukan guna mendukung pencapaian indeks ketentraman dan

ketertiban. Upaya tersebut tidak terlepas dari kolaborasi beberapa Perangkat Daerah terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

Dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong Praja atau yang dikenal dengan Satpol PP telah membentuk Regu SC (*Service Center*) dan URC (*Unit Reaksi Cepat*) yang dikhususkan untuk menangani adanya aduan masyarakat terkait adanya gangguan trantibum dan kedua regu tersebut mampu merespon secara cepat aduan dari masyarakat sehingga masalah dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan efisien. Selain itu, Satpol PP Kota Balikpapan juga membentuk Tim Satgasus yang menangani gangguan trantibum secara khususnya yaitu PMKS (*Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*). Kegiatan rutin juga selalu dilakukan Satpol PP seperti Patroli, Non yustisi, sosialisasi sehingga berkurangnya gangguan trantibum.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan ketentraman terkait pembangunan demokrasi dan politik dan pencegahan konflik sosial di Kota Balikpapan. Dalam hal ini berbagai upaya telah dilakukan seperti meningkatkan partisipasi publik melalui pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog publik, konsultasi, atau forum-forum partisipatif lainnya. Dialog antar kelompok juga dilakukan untuk membantu mengurangi polarisasi dan mencegah terjadinya konflik sosial dengan memfasilitasi dialog antar kelompok atau pertemuan antar kelompok masyarakat yang berbeda. Di samping itu, meningkatkan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya juga dapat membantu mencegah terjadinya konflik sosial melalui program-program pendidikan dan budaya yang mempromosikan keragaman dan toleransi.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Kota Balikpapan agar terwujud keamanan dan stabilitas kota yang diinginkan.

13. Sasaran Strategis 13 :Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan

a. Persentase Pertumbuhan UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian lokal. Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mengacu pada peningkatan ukuran, produktivitas, keuntungan, dan kontribusi ekonomi dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertumbuhan UMKM juga dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah dan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh UMKM serta kemampuan mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi lokal, serta memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait di berbagai negara berupaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan berbagai kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM di masing-masing wilayah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan dan hasil perhitungan mandiri Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan UMKM Kota Balikpapan mencapai realisasi sebesar 29,55% dengan capaian sebesar 941,08% atau

memiliki predikat “sangat tinggi, jauh melebihi dari target yang ditetapkan.

Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi tingginya pertumbuhan UMKM di Kota Balikpapan adalah berakhirnya pandemic covid-19 yang selama 2 (dua) tahun menjadi tantangan bagi UMKM untuk bertahan. Setelah berakhirnya pandemi, konsumsi masyarakat kembali normal dan bahkan meningkat, sehingga UMKM yang mampu memanfaatkan peluang ini akan mengalami pertumbuhan.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional maupun daerah. Selain itu, tersedianya beberapa sarana – sarana destinasi wisata yang turut mendukung pertumbuhan usaha mikro di Kota Balikpapan.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan, antara lain:

- 1) Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan membuat regulasi yang memudahkan proses pengurusan izin usaha untuk usaha mikro serta menyiapkan stimulus / insentif kepada pelaku usaha yang aktif dan tertib administrasi perizinan dan pelaporan;
- 2) Berperan aktif dalam UMKM *Care Center* sebagai wadah fasilitasi UMKM dengan Lembaga keuangan terutama

yang terdampak Covid-19 dalam hal kendala permodalan sekaligus partner dan advisor UMKM dalam menjaga daya saing usaha serta membantu pelaksanaan pendataan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM);

- 3) Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi pelaku UMKM maupun koperasi seperti mengikutsertakan pengurus / pengawas/ anggota koperasi dalam hal diklat perkoperasian baik yang diselenggarakan oleh DKUMKMP Kota Balikpapan, Dinas PERINDAGKOP dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, maupun diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, mensosialisasikan kursus-kursus online, tips-tips, dan webinar yang difasilitasi oleh KEMENKOP dan UKM RI, Bank Indonesia maupun lembaga lainnya yang dapat diakses oleh koperasi di Kota Balikpapan secara gratis dalam rangka meningkatkan produktivitas di era pandemi, mensosialisasikan program pelatihan *e-learning* bagi koperasi dan UMKM Kota Balikpapan melalui edukukm.id (pelatihan berbasis online) yang diinisiasi oleh KEMENKOP dan UKM RI, melaksanakan pelatihan *ecoprint* bagi disabilitas dan pelatihan digitalisasi bagi UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kompetensinya agar dapat mengelola usaha atau bisnis secara efektif dan efisien serta mengubah pengelolaan bisnisnya dari praktik konvensional ke modern beradaptasi (secara digitalisasi). Selain itu, melalui program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) juga telah dilaksanakan pelatihan sistem jaminan produk halal (SJPH), pelaksanaan kegiatan pelatihan halal yang bertujuan untuk mengakomodir pelaku usaha yang ingin mendaftarkan halalnya secara regular, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi CPPOB yang bertujuan untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip penerapan CPPOB

bagi industri kecil menengah, dan memfasilitasi registrasi pangan olahan peserta, serta pelaksanaan kegiatan Sosialisasi HKI bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI bagi produk yang dihasilkan para pelaku industri kecil menengah;

- 4) Memfasilitasi akses pasar melalui promosi dan pemasaran produk UMKM yang didukung oleh APBD Kota Balikpapan dan APBD Provinsi Kalimantan Timur seperti mensosialisasikan Gerakan “Beli Produk UMKM” untuk mempertahankan eksistensi UMKM Kota Balikpapan di tengah pasca pandemi termasuk di media sosial resmi milik DKUMKMP dan mempromosikan daftar berbagai varian produk dan jasa UMKM Kota Balikpapan beserta akun media sosial milik UMKM dengan harapan masyarakat dapat mengakses untuk melakukan pemesanan/ pembelian. Selain itu, melalui program pengembangan UMKM juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan pameran sebagai bentuk promosi terhadap produk UMKM seperti pelaksanaan kegiatan Pameran/ promosi The 22nd Jakarta Handicraft Trade Fair, pelaksanaan kegiatan Pameran/ promosi Gebyar UMKM, Koperasi dan TSJL Expo, pelaksanaan kegiatan Pameran/ promosi Pameran HKG PKK - 50 Tahun, pelaksanaan kegiatan Pameran/ promosi Pameran Indonesia City Expo (ICE) APEKSI 2022, pelaksanaan kegiatan Pameran / promosi Pameran KALTIM EXPO 2022, pelaksanaan kegiatan Pameran/ promosi Pameran KRIYA NUSA 2022, pelaksanaan kegiatan Pameran/ promosi Pameran Pameran Indonesia Ekonomi Kreatif Expo 2022, pelaksanaan kegiatan Pameran/ promosi Pameran Festival Budaya Kemilau Kaltim 2022, pelaksanaan kegiatan Pameran/ promosi Pameran INACRAFT dan pelaksanaan kegiatan Pameran/ promosi GEBYAR UMKM 2022;

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan merupakan penggerak roda produksi perekonomian dalam proses produksi barang dan jasa. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Peningkatan dalam jumlah angkatan kerja, bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada perluasan kesempatan kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

Guna mengukur jumlah pengangguran yang ada suatu wilayah dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dihitung dengan membuat perbandingan antara jumlah pencari kerja yang sedang mempersiapkan usaha dengan jumlah angkatan kerja. TPT merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan pemerintah dari tahun ke tahun. Selain itu, dapat dijadikan acuan untuk program pembukaan lapangan usaha baru. Tingginya angka TPT dapat berdampak negatif pada meningkatnya potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan seperti kriminalitas.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan Agustus 2022 mencapai 6,90 persen (22.749

orang) mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2021 yakni sebesar 8,94 persen (28.613 orang). Dari angka TPT tersebut dapat diartikan bahwa di dalam 100 orang angkatan kerja, terdapat 6-7 orang yang berstatus pengangguran. Dengan kata lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 130,43%, memperoleh predikat “sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan komitmen untuk melaksanakan program ketenagakerjaan.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara lain;

- 1) Meningkatkan komunikasi yang baik antara dinas Ketenagakerjaan dengan perusahaan maupun pencari kerja yang terdapat di kota Balikpapan terkait informasi atau lowongan kebutuhan tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan keterampilan melalui pemberian pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja seperti dengan membangun kerjasama dengan BLK pemerintah dan melakukan program pemagangan kerja serta pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait ketenagakerjaan secara rutin;
- 4) Membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan di kota Balikpapan untuk penyerapan SDM yang telah dilatih;
- 5) Memberikan motivasi kepada lulusan pelatihan untuk mendapatkan kerja dan membangun solidaritas sesama alumni pelatihan;
- 6) Melakukan penyuluhan bimbingan dan jabatan kepada pencari kerja khususnya siswa sekolah menengah kejuruan dan mahasiswa perguruan tinggi yang ada di kota Balikpapan;

- 7) Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja;
- 8) Melaksanakan perluasan kesempatan kerja melalui pelaksanaan *job fair* atau bursa kerja;
- 9) Melaksanakan kerjasama *tripartite* daerah untuk perlindungan tenaga kerja melalui serta melaksanakan pembinaan hubungan industrial perusahaan.

c. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan terhadap keseluruhan penduduk Kota Balikpapan. Garis kemiskinan sendiri merupakan batas nilai rupiah pengeluaran konsumsi (makanan dan non makanan) perkapita perbulan. Untuk Tahun 2022, BPS menetapkan garis kemiskinan kota Balikpapan Rp 680.499,- perkapita perbulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan *baseline* untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin.

Tabel 2.13

Angka Kemiskinan di Kota Balikpapan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp)	Rupiah/ Org/ Bln	545.971	572.108	613.622	657.521	680.499

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	17.008	15.78	17.02	18.53	15.83
Persentase Penduduk Miskin (%) (Po)	%	2,64	2,42	2,57	2,89	2,45
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	-	0,67	0,26	0,38	0,50	0,17
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	0,26	0,06	0,12	0,15	0,02

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, diolah 2022

Dengan nilai garis kemiskinan Balikpapan pada tahun 2022 sebesar Rp. 680.499,-/orang/bulan dapat diartikan jika satu keluarga memiliki empat orang anggota rumah tangga, keluarga tersebut harus memiliki pendapatan minimal Rp. 2.721.996,- (4 orang x Rp. 680.499,-) agar dikatakan tidak miskin. Saat pendapatannya di bawah angka tersebut artinya keempat anggota rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jika dilihat dari tabel di atas, garis kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang juga dipengaruhi oleh inflasi.

Berdasarkan tolak ukur di atas dapat diketahui bahwa capaian tingkat kemiskinan tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 2,45% dengan capaian adalah 98,78% dengan predikat “tinggi”. Walaupun belum melampaui target yang telah ditentukan, tingkat kemiskinan tahun 2022 berhasil diturunkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang mencapai 2,89%, bahkan menduduki menduduki angka kemiskinan terkecil di Kalimantan Timur, sedangkan pada level Nasional menduduki posisi ke-2 terkecil setelah Kota Sawah Lunto (2,28%). Ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.

Namun tentunya dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan juga terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti belum maksimalnya usaha pemberdayaan masyarakat yang melibatkan stakeholder terkait sehingga dapat ikut berkontribusi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat miskin dan terbatasnya tenaga penyuluh untuk melakukan pembinaan kepada PMKS. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:

- 1) Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan/ CSR untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat;
- 2) Bermitra dengan masyarakat dan aktif menggiatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- 3) Peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat melalui pembinaan oleh penyuluh sosial terutama dalam penanganan PMKS;
- 4) Peningkatan kualitas pendataan warga miskin yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial yang dilakukan oleh mitra Dinas Sosial di setiap kelurahan;
- 5) Pelaksanaan PKH di Kota Balikpapan dilaksanakan di 6 kecamatan yang mendorong KPM untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

- 6) Pemberian bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUBE) sebanyak 40 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial berupa pembinaan karakter dan pemberian motivasi untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
- 7) Melakukan pelatihan keterampilan berusaha bagi anggota KUBE untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan yang dimiliki, kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan bisnis usahanya. Nilai tambah dari pelatihan tersebut adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri anggota untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya. Selama pelatihan keterampilan tersebut, mereka didampingi oleh infrastruktur kesejahteraan sosial kota seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial dan Wanita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial.

Selain itu, beberapa program kerja penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait antara lain program bantuan modal usaha ekonomi kecil dan rumah tangga, program Indonesia pintar dan program perlindungan sosial dan lainnya. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga lebih tinggi dibanding dengan kenaikan garis kemiskinan di Kota Balikpapan, di samping itu didukung dengan stabilitas keamanan dan meningkatnya perekonomian kota.

14. Sasaran Strategis 14 :Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah

Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Dalam konteks investasi, nilai realisasi adalah ukuran penting untuk mengevaluasi keberhasilan investasi. Investasi yang menghasilkan nilai realisasi yang positif menunjukkan bahwa investor telah memperoleh keuntungan, sedangkan nilai realisasi yang negatif menunjukkan bahwa investor menderita kerugian. Nilai realisasi investasi ini juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program investasi pemerintah, serta memberikan informasi penting tentang pengelolaan aset publik dan pemanfaatan dana publik. Selain itu, nilai realisasi investasi juga dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang diperoleh dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disampaikan Pelaku Usaha lewat sistem OSS (*Online Single Submission*), nilai realisasi investasi Kota Balikpapan Tahun 2022 mencapai Rp 15.426.499.536.500,- dengan capaian realisasi sebesar 463,26% atau mendapat predikat “sangat tinggi”. Investasi tersebut mampu menyerap 4,369 juta tenaga kerja Indonesia. Realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman modal Dalam Negeri atau PMDN sebesar Rp 14.681.981.500.000,- atau sebesar 95,17%. Sementara realisasi PMA mencapai Rp 744.518.036.500,- atau sebesar 4,83%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian nilai realisasi investasi Kota Balikpapan antara lain:

- a. Makin kondusifnya iklim investasi di Indonesia pada umumnya dan Kota Balikpapan pada khususnya serta terdapat Proyek Strategis Nasional di Kota Balikpapan yaitu Perluasan Kilang Minyak RDMP Pertamina (PMDN);

- b. Efektifitas penginputan data pada LKPM Online sehingga data investasi LKPM PMA / PMDN Swasta nasional dapat terinventarisir dengan baik;
- c. Terlaksananya promosi investasi penanaman modal sehingga dapat mempromosikan potensi usaha yang ada di Kota Balikpapan;
- d. Makin mudahnya pengurusan perizinan berusaha melalui laman <https://oss.go.id/> sehingga mendukung proses kemudahan berinvestasi di Kota Balikpapan.

Selain itu, salah satu faktor yang juga menunjang keberhasilan pencapaian nilai realisasi investasi adalah dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor melalui kemudahan pelayanan perizinan juga. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan telah membentuk dan menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan serta telah memaksimalkan fungsi Virtual Mal Pelayanan Publik (via *zoom meeting*, *video call*, wa dll) untuk pelayanan terhadap pelaku usaha terkait pendampingan perizinan dan non perizinan yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Inovasi Pelayanan “SIAP DITEMPA” (Strategi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi Sistem Pelayanan) juga merupakan inovasi untuk mengintegrasikan seluruh proses layanan yang ada di MPP Kota Balikpapan (dari proses pendaftaran hingga penyerahan produk ke masyarakat).

Untuk itu, guna terus mendukung pencapaian nilai realisasi investasi Kota Balikpapan kedepannya maka Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan beberapa upaya antara lain;

- a. Meningkatkan promosi investasi melalui berbagai media seperti iklan, brosur, atau website resmi serta mengadakan acara seperti seminar atau konferensi untuk

- memperkenalkan potensi investasi yang dimilikinya kepada investor;
- b. Melaksanakan sosialisasi, pembimbingan dan pengawasan ke pelaku usaha dalam pengisian LKPM Online sebagai instrumen data realisasi investasi di Kota Balikpapan;
 - c. Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan;
 - d. Melaksanakan pendampingan OSS serta Pelayanan Jemput Bola langsung untuk melayani perizinan dan non perizinan yang bekerja sama dengan pihak Mal maupun area publik lainnya sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - e. Melakukan kolaborasi dengan PD teknis dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

15. Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkatnya ketahanan pangan mengacu pada upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu negara untuk memproduksi dan memasok makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tujuan utama dari meningkatkan ketahanan pangan adalah untuk mengurangi kelaparan dan malnutrisi, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan berkualitas.

Meningkatkan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki distribusi dan transportasi pangan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi, dan meningkatkan keberlanjutan produksi pangan dengan memperbaiki manajemen sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini juga melibatkan upaya untuk meningkatkan keanekaragaman pangan dengan

memperkenalkan jenis makanan baru yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan lingkungan, serta meningkatkan budaya konsumsi makanan yang beragam.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat ketahanan pangan adalah melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Sementara itu, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah metode penilaian kualitas pola makan yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Skor PPH dapat digunakan sebagai alat untuk memantau pola makan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan pola makan yang lebih sehat. Skor PPH juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk menentukan program dan kebijakan terkait kesehatan masyarakat dan gizi.

Berdasarkan perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan diketahui bahwa pada tahun 2022, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) memiliki realisasi sebesar 86,1% dengan capaian realisasi sebesar 98,97% atau mendapat predikat “sangat tinggi”. Namun skor tersebut belum dapat melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87 poin, sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Beberapa hal yang menjadi penyebab belum tercapainya skor pola pangan harapan Kota Balikpapan tahun 2022 disebabkan oleh kurangnya jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi, konsumsi jenis sayur dan buah-buahan yang dikonsumsi oleh masyarakat lebih beragam tetapi kuantitasnya sedikit. Hal ini juga disebabkan hambatan yang cukup besar dengan terjadinya pandemi Covid-19, keterbatasan kemampuan daya beli masyarakat, keterbatasan pengetahuan tentang pangan dan gizi, cenderung penurunan

konsumsi yang bersumber pangan lokal karena pengaruh pangan siap saji dan budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan baik dari penguatan cadangan pangan, meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan aman maupun meningkatkan produksi sumber daya pangan yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penguatan cadangan pangan melalui stabilisasi harga melalui pasar murah dan Penambahan anggaran pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) serta menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan distribusi cadangan pangan;
- b. Meningkatkan keanekaragaman pangan melalui koordinasi dengan melibatkan beberapa stakeholder dari beberapa Perangkat Daerah lain yang menangani ketersediaan 9 bahan kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain), serta meningkatkan budaya konsumsi makanan yang beragam dan menumbuhkan minat masyarakat untuk menanam sayuran di pekarangan rumah / Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
- c. Meningkatkan produksi Sumber Daya Pangan dengan cara membangkitkan kembali bertanam padi (mengaktifkan kembali lahan sawah tidur) serta terus menerus mengadakan sosialisasi dan pendekatan kepada petani untuk tetap menanam tanaman pangan, memperbanyak demplot tanaman buah lokal seperti nanas, pisang dan pepaya mini Balikpapan (miba), melaksanakan intensifikasi tanaman perkebunan, sosialisasi dan pembinaan kepada petani perkebunan serta perlu menumbuhkan semangat petani untuk tetap berusaha dengan memelihara

tanamannya karena hasil produksi dari tanaman tersebut tetap menguntungkan. Selain ini, meningkatkan produksi sumber daya pangan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan populasi sapi dan ayam yang ada di peternak, baik melalui dana secara swadaya, dukungan pemerintah (APBD dan APBN) dan atau pihak ketiga, mengurangi ketergantungan pakan dari luar (impor), meningkatkan sarana dan prasarana budidaya baik berupa pembangunan sumur, perbaikan saluran dan kanal di kawasan budidaya ikan, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pembudidaya ikan agar dapat menghasilkan komoditas yang berkualitas dan memfasilitasi kemitraan usaha dengan industri pengolahan hasil perikanan khususnya rumput laut. Upaya meningkatkan capaian produksi perikanan tangkap dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan usaha nelayan dengan fasilitasi kredit lunak melalui perbankan serta diseminasi terkait alat tangkap yang diizinkan dan ramah lingkungan

16. Sasaran Strategis 16 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional

Kunjungan wisata adalah banyaknya jumlah kunjungan wisata yang dilakukan. Kunjungan wisatawan bisa dilakukan secara domestik atau internasional, tergantung dari asal negara wisatawan tersebut. Kunjungan wisatawan membawa dampak ekonomi yang besar bagi suatu destinasi wisata, karena turut berkontribusi pada penghasilan pendapatan dan lapangan kerja di sektor pariwisata.

Untuk mengukur kunjungan wisata yang dilakukan maka dapat dilihat dari angka kunjungan wisata. Angka kunjungan wisatawan adalah jumlah orang yang mengunjungi suatu destinasi wisata dalam periode waktu tertentu. Angka ini biasanya dihitung dalam skala harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Angka Kunjungan Wisatawan menjadi indikator penting dalam industri pariwisata karena dapat mengukur

tingkat keberhasilan suatu destinasi wisata dalam menarik pengunjung dan memberikan kontribusi ekonomi bagi wilayah tersebut. Selain itu, data angka kunjungan wisatawan dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan dan perencanaan pariwisata di suatu daerah.

Menurut perhitungan mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 11.704 orang dan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 1.717.696 orang, sehingga total angka kunjungan wisata di Kota Balikpapan tahun 2022 adalah 1.729.400 orang atau dengan kata lain memiliki capaian kinerja sebesar 120.07% atau mendapat predikat “sangat tinggi”.

Salah satu faktor yang mendukung pencapaian angka kunjungan wisatawan karena pada tahun 2022 pandemi telah berakhir dan perekonomian mulai membaik, sehingga masyarakat mulai beraktifitas seperti semula termasuk melakukan kegiatan wisata dan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN dan menjadi magnet daya tarik wisata. Selain itu, tersedianya teknologi yang dapat membuka akses promosi potensi kepariwisataan Kota Balikpapan dan letak Kota Balikpapan sebagai daerah perlintasan yang memiliki bandara udara Internasional dan Pelabuhan sehingga strategis sebagai Kota Transit bagi kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan juga merupakan penyebab tercapainya target angka kunjungan wisata.

Namun demikian tentunya juga masih ditemukan beberapa kendala dalam pencapaian angka kunjungan wisata. Kendala tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk terus berupaya guna meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain belum berkembangnya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan Kota Balikpapan yang mampu menarik minat pengunjung wisata setidaknya dari

berbagai daerah di sekeliling Kota Balikpapan, belum adanya event seni dan budaya unik yang mampu menjadi magnet wisata Kota Balikpapan, masih adanya situs-situs cagar budaya yang belum digali untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan masih rendahnya kesadaran warga kota dalam menciptakan kota ramah wisata yang dapat menarik minat kunjungan wisata.

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan serta Perangkat Daerah terkait, antara lain:

- a. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi;
- b. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
- c. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan;
- d. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata;
- e. Mengikuti kegiatan pameran/ kegiatan pemasaran pariwisata baik didalam dan luar negeri;
- f. Melaksanakan event-event pariwisata yang menarik;

17. Sasaran Strategis 17 :Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif adalah dua hal yang saling terkait dalam industri kreatif. Ekonomi kreatif mencakup berbagai sektor industri kreatif, seperti seni, desain, film, musik, penerbitan, dan sebagainya. Sementara itu, pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan

ekonomi kreatif seperti seniman, desainer, musisi, penulis, dan sebagainya.

Kedua hal tersebut saling mempengaruhi dalam industri kreatif. Pertumbuhan ekonomi kreatif sangat tergantung pada kreativitas dan inovasi dari pelaku ekonomi kreatif dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan menarik perhatian konsumen. Sebaliknya, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif juga sangat tergantung pada kondisi industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan. Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan, seperti peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam hal ini, pemerintah dan pelaku industri memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk insentif, pendanaan, pelatihan, dan infrastruktur untuk memperkuat kemampuan dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing industri kreatif secara keseluruhan. Sedangkan pelaku industri dapat berperan dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan inovatif, serta memasarkannya dengan cara yang tepat agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Berdasarkan perhitungan mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa pelaku ekonomi kreatif tahun 2022 mencapai 334 orang dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 260 orang. Dengan kata lain pada tahun 2022 pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Balikpapan telah bertambah sebanyak 74 orang, sehingga diperoleh persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif mencapai 28,46% dengan capaian kinerja sebesar 1.293,64% mendapat predikat “sangat tinggi”.

Salah satu penyebab tingginya realisasi pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif dikarenakan pada tahun 2022

kegiatan perekonomian mulai membaik pasca pandemi covid-19 dan bertahap pelaku ekonomi kreatif mulai bangkit serta menggerakkan perekonomian. Banyak pelaku ekonomi kreatif menemukan cara untuk terus berinovasi dan berkembang dalam situasi yang sulit sehingga saat ini pelaku ekonomi kreatif menjadi lebih kuat, lebih mudah beradaptasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif secara keseluruhan.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata yang berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait guna meningkatkan pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif, antara lain:

- a. Melaksanakan pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif yang ada di Kota Balikpapan sehingga dapat digunakan oleh pelaku ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaku ekonomi kreatif serta menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan sektor bisnis lainnya;
- c. Melaksanakan pembentukan komunitas dan organisasi yang mendukung industri kreatif, seperti asosiasi, forum, atau kelompok diskusi, untuk saling bertukar pengalaman dan meningkatkan visibilitas industri kreatif.
- d. Meningkatkan akses pasar dan promosi melalui pameran, festival, konferensi, atau platform digital yang khusus untuk industri kreatif.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif, memperkuat ekosistem industri kreatif, serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

18. Sasaran Strategis 18 :Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan sektor unggulan daerah adalah pertumbuhan yang terjadi pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dan keunggulan komparatif di suatu daerah. Sebuah daerah biasanya memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda, tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor-faktor lainnya. Pertumbuhan sektor unggulan daerah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena sektor unggulan memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu sektor unggulan daerah yang dapat ditemukan di Kota Balikpapan adalah sektor perdagangan. Pertumbuhan sektor unggulan daerah dan sektor perdagangan ini saling mempengaruhi dan saling terkait dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengukur pertumbuhan sektor perdagangan dapat dilakukan dengan melihat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan mengacu pada nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam suatu wilayah atau negara pada periode waktu tertentu. Sektor perdagangan sendiri mencakup berbagai macam kegiatan perdagangan seperti perdagangan grosir, perdagangan eceran, perdagangan otomotif, dan sebagainya. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang tinggi dapat menunjukkan adanya peningkatan dalam aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. PDRB sektor perdagangan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah terkait perdagangan dan pengembangan sektor perdagangan. Dengan memantau kinerja PDRB sektor perdagangan, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan

menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan.

Untuk menghitung nilai PDRB sektor perdagangan, perlu dilakukan pengumpulan data mengenai nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam wilayah atau negara tertentu pada periode waktu tertentu. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga ekonomi, dan organisasi perdagangan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan diketahui persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan terealisasi sebesar 5,29%, yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 151,14% dan mendapat predikat “sangat tinggi”.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk meningkatkan persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, antara lain:

- a. Meningkatkan akses pasar melalui perluasan jaringan distribusi dan penjualan produk, baik melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan, transportasi, dan logistik, maupun melalui pengembangan jaringan perdagangan *online* dan *e-commerce*;
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan di sektor perdagangan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperkenalkan teknologi baru, dan meningkatkan kualitas manajemen usaha;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perdagangan melalui pemberian pelatihan dan pendidikan baik untuk pengusaha maupun tenaga kerja sehingga mampu memenuhi tuntutan pasar dan meningkatkan kinerja sektor perdagangan;
- d. Mengembangkan kerjasama antara sektor perdagangan dengan sektor-sektor lain sehingga dapat meningkatkan

sinergi dan membuka peluang baru bagi sektor perdagangan, seperti kerjasama antara sektor perdagangan dengan sektor pariwisata, perikanan, atau pertanian;

2.3.2 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Selama tahun 2022, Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 53 penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14

Nama dan Bentuk Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima	Bentuk Penghargaan
1	Camat Terbaik Sekalimantan Timur	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Camat Balikpapan Barat. M. Arif Fadilah. S.STP. M.Si	Piagam
2	Panji Keberhasilan Bidang Daya Saing Daerah	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DPMPTSP	Bendera Panji. Tropi. Piagam
3	Panji Keberhasilan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bendera Panji. Tropi. Piagam
4	Panji Keberhasilan Bidang Keolahragaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DPOP	Bendera Panji. Tropi. Piagam
5	Panji Keberhasilan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DKUMKMP	Bendera Panji. Tropi. Piagam

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima	Bentuk Penghargaan
6	Panji Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DLH	Bendera Panji. Tropi. Piagam
7	Panji Keberhasilan Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bendera Panji. Tropi. Piagam
8	Panji Keberhasilan Bidang Pelayanan Publik Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Bendera Panji. Tropi. Piagam
9	Panji Keberhasilan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DPMPSTP	Bendera Panji. Tropi. Piagam
10	Panji Keberhasilan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	BKAD	Bendera Panji. Tropi. Piagam
11	Panji Keberhasilan Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terintegrasi di Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	BKPSDM	Bendera Panji. Tropi. Piagam
12	Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	BPBD	Bendera Panji. Tropi. Piagam
13	Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DISDUKCAPIL	Bendera Panji. Tropi. Piagam

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima	Bentuk Penghargaan
	dan Catatan Sipil				
14	Panji Keberhasilan Bidang Sektor Industri	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DISDAG	Bendera Panji. Tropi. Piagam
15	Panji Keberhasilan Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	TP-PKK	Bendera Panji. Tropi. Piagam
16	Panji Keberhasilan Bidang Trantibun Umum. Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum dan Linmas) Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bendera Panji. Tropi. Piagam
17	Terbaik II Bidang Kepemudaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DPOP	Tropi dan Piagam
18	Terbaik II Bidang Kesejahteraan Sosial	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Bagian Kesra Sekretariat Daerah dan DINSOS	Tropi dan Piagam
19	Terbaik II Bidang Ketenagakerjaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DISNAKER	Tropi dan Piagam
20	Terbaik II Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Kelurahan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Tropi dan Piagam
21	Terbaik II Bidang Sektor Perdagangan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DISDAG	Tropi dan Piagam
22	Terbaik II Bidang <i>Smart City</i> Kabupaten/Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi	BAPPEDA LITBANG dan DISKOMINFO	Tropi dan Piagam

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima	Bentuk Penghargaan
			Kalimantan Timur		
23	Terbaik III Bidang Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DEKRANASDA (TP-PKK)	Tropi dan Piagam
24	Terbaik III Bidang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten/Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DISKOMINFO	Tropi dan Piagam
25	Terbaik III Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DP3AKB	Tropi dan Piagam
26	Terbaik III Bidang Pembangunan Kesehatan Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DINSKES	Tropi dan Piagam
27	Terbaik III Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	DP3AKB	Tropi dan Piagam
28	Terbaik III Bidang Pencegahan Korupsi (PK) Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Inspektorat	Tropi dan Piagam
29	Penghargaan Atas Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 Kepada Pemerintah Daerah	Nasional	Kementerian Investasi BKPM RI	Pemerintah Kota Balikpapan	Tropi dan Piagam
30	Predikat A Pelayanan Prima dari Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	Predikat A

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima	Bentuk Penghargaan
31	<i>Human Initiative Award</i> Kategori Mitra Kolaborasi Pemerintah Lokal (Kategori Pemerintah Daerah Terbaik Versi Human Initiative)		<i>Human Initiative</i>	Pemerintah Kota Balikpapan	
32	Predikat Kota Terbaik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Kota Balikpapan	Piala
33	Nirwasita Tantra Bagi Kepala Daerah Tahun 2021	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Kota Balikpapan	
34	Anugerah Tanda Mata Atas Partispasi dan Kontribusi Dalam Pengembangan dan Kebijakan Positif Bagi Pendidikan Agama Islam di Sekolah	Nasional	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI	Walikota Balikpapan	Piagam
35	Juara 2 Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2021	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Piagam dan Plakat
36	Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Se-Provinsi Kalimantan Timur	Nasional	BPK-RI	Pemerintah Kota Balikpapan	Piagam

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima	Bentuk Penghargaan
37	Terbaik 1 Kategori Ketahanan Pangan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Kota Balikpapan	Piagam
38	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	9 Sekolah di Balikpapan - SDN 009 Balikpapan Timur - SDN 015 Balikpapan Tengah - SDIT Al Auliya 1 Balikpapan Timur - SD Tunas Budi Luhur Balikpapan Timur - SMP Wiyata Mandala Balikpapan - SMPN 23 Balikpapan - SMP Muhammadiyah 2 Balikpapan - SMA IT Al Auliya Balikpapan - SMAN 6 Balikpapan	Piagam
39	Peringkat 3 <i>Green Leadership</i> Nirwasita Tantra Kriteria Kepala Daerah Kategori Kota Besar	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Kota Balikpapan	Plakat
40	Peringkat 2 Nirwasita Tantra Untuk Pemerintahan Daerah Kategori Kota Besar	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Kota Balikpapan	Plakat
41	Peringkat 2 Penghargaan Nirwasita Tantra Kategori DPRD Tingkat Kota Besar	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Kota Balikpapan	Plakat

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima	Bentuk Penghargaan
42	Peringkat Nindya Sebagai Kota Menuju Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPPA)	Pemerintah Kota Balikpapan	Plakat
43	Penghargaan BKN Award Kategori Special Mention Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN	Nasional	Badan Kepegawaian Negara	Pemerintah Kota Balikpapan	Piagam
44	Penghargaan Dalam Bidang Pembina Olahraga Berprestasi	Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pemerintah Kota Balikpapan	Piagam
45	Peringkat 8 Nasional Terkait Penilaian Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelayanan Berusaha	Nasional	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Piagam
46	Upakarya Wanua Nugraha	Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Wali Kota Balikpapan	
47	Penghargaan IHIA-VI 2022	Nasional	<i>Indonesia Healthcare Forum</i>	Kelurahan Mekar Sari	
48	Penghargaan Siddhakarya	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Wali Kota Balikpapan	Piagam
49	Kota Peduli HAM 2022	Nasional	KEMENKUMHAM	Pemerintah Kota Balikpapan	Piagam
50	Anugerah Meritokrasi ASN Tahun 2022 Kategori Baik	Nasional	Komisi ASN	Pemerintah Kota Balikpapan	Piagam
51	Terbaik Ketiga Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kota/Kabupaten	Provinsi	Komisi Informasi Publik Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan	Plakat dan Piagam
52	Kota Terbaik Wilayah Tengah Atas Kinerja Investasi Bahari	Nasional	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI	Pemerintah Kota Balikpapan	Piagam

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima	Bentuk Penghargaan
53	Anugerah Revolusi Mental Kategori Kabupaten/Kota Kawasan Timur	Nasional	KEMENKO PKM	Kota Balikpapan	Trofi

Sumber data: Bagian Organisasi, diolah 2022

Adapun beberapa dokumentasi Kegiatan Penerimaan Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2022 sebagai berikut ini:



Tabel 2.15

Beberapa Dokumentasi Penerimaan Penghargaan

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
1		Camat Terbaik Sekalimantan Timur	Program pemberdayaan masyarakat terutama pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Balikpapan Barat membawa Camat Balikpapan Barat Muhammad Arief Fadhillah sebagai Camat Berprestasi Terbaik Se Kaltim. Atas prestasi yang diperoleh yaitu Camat Terbaik I, Muhammad Arief Fadhillah mendapat piagam penghargaan dan hadiah 20 gram emas yang diserahkan Gubernur Kaltim di peringatan HUT ke-65 Provinsi Kalimantan Timur di Halaman Kantor Gubernur Kaltim.

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
2		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="762 297 1067 387">1. Panji Keberhasilan Bidang Daya Saing Daerah <li data-bbox="762 398 1067 521">2. Panji Keberhasilan Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia <li data-bbox="762 533 1067 633">3. Panji Keberhasilan Bidang Keolahragaan <li data-bbox="762 645 1067 757">4. Panji Keberhasilan Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah <li data-bbox="762 768 1067 857">5. Panji Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup 	<p data-bbox="1091 297 1348 723">Kota Balikpapan menjadi Kota penerima panji-panji keberhasilan terbanyak dalam Upacara Peringatan HUT Ke-65 Provinsi Kalimantan Timur. Dari total 27 perolehan Balikpapan, 15 diantaranya peringkat pertama, 6 peringkat kedua, dan 6 peringkat ketiga.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="762 875 1067 1048">6. Panji Keberhasilan Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) <li data-bbox="762 1059 1067 1182">7. Panji Keberhasilan Bidang Pelayanan Publik Kategori Kota <li data-bbox="762 1193 1067 1283">8. Panji Keberhasilan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu <li data-bbox="762 1294 1067 1384">9. Panji Keberhasilan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah <li data-bbox="762 1395 1067 1653">10. Panji Keberhasilan Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terintegrasi Di Provinsi Kalimantan Timur <li data-bbox="762 1664 1067 1809">11. Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggara Penanggulangan Bencana Daerah <li data-bbox="762 1821 1067 1989">12. Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil 	



No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
		13. Panji Keberhasilan Bidang Sektor Industri	
		14. Panji Keberhasilan Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi Kategori Kota	
		15. Panji Keberhasilan Bidang Trantibun Umum. Ketentraman Masyarakat Dan Perlingungan Masyarakat (Trantibum Dan Linmas) Kategori Kota	
		16. Terbaik II Bidang Kepemudaan	
		17. Terbaik II Bidang Kesejahteraan Sosial	
		18. Terbaik II Bidang Ketenagakerjaan	
		19. Terbaik II Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Kelurahan	
		20. Terbaik II Bidang Sektor Perdagangan	
		21. Terbaik II Bidang <i>Smart City</i> Kabupaten/Kota	
		22. Terbaik III Bidang Dewan Kerajinan Nasional Daerah	
		23. Terbaik III Bidang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten/Kota	
		24. Terbaik III Bidang Pembangunan Keluarga. Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kategori Kota	

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
		25. Terbaik III Bidang Pembangunan Kesehatan Kategori Kota 26. Terbaik III Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 27. Terbaik III Bidang Pencegahan Korupsi (PK) Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota	
3		Penghargaan Atas Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 Kepada Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Balikpapan menerima penghargaan atas capaian realisasi investasi tahun 2021 dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Kota Balikpapan terpilih pada peringkat kedelapan dari 10 Kabupaten Kota yang mencapai capaian realisasi investasi tertinggi seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4		Predikat A Pelayanan Prima Dari Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Sejak tahun 2017 s.d 2020 DPMPTSP konsisten meraih A-kategori sangat baik, dan pada tahun 2021 DPMPTSP berhasil meraih PELAYANAN PRIMA dengan nilai A

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
5		Predikat Kota Terbaik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>Pemerintah Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinobatkan sebagai daerah terbaik dalam perencanaan pembangunan daerah selama 2021. Penghargaan diberikan oleh Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor pada saat Musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim 2023.</p>
6		Nirwasita Tantra Bagi Kepala Daerah Tahun 2021	<p>Kota Balikpapan menerima Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2021 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Kota Balikpapan meraih 3 penghargaan yaitu Peringkat III Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra untuk Kepala Daerah dan Peringkat II Penghargaan Nirwasita Tantra untuk Pemerintahan Daerah Kategori Kota Besar yang diterima langsung oleh Bapak Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas'ud, S.E., M.E serta Peringkat II Penghargaan Nirwasita Tantra untuk Ketua DPRD yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan Bapak Abdulloh, S.Sos di Auditorium Dr. Ir. Soejarwo, Gedung Mangala Wanabakti, Jakarta. Penghargaan Nirwasita Tantra diberikan dalam</p>

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
			rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang merupakan suatu penghargaan bagi Kepala Daerah yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai metodologi pembangunan berkelanjutan, guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di setiap daerahnya.
7		Juara 2 Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2021	Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bagian Hukum kembali menerima Penghargaan dari Provinsi Kalimantan Timur sebagai Juara ke-2 Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Penataan Dokumentasi Hukum Daerah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2021
8		Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Se-Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Kota Balikpapan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Opini WTP ini adalah kesembilan kalinya yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
9		Terbaik 1 Kategori Ketahanan Pangan	Kota Balikpapan menerima penghargaan Terbaik ke-1 dalam Kategori Ketahanan Pangan dari Gubernur Kalimantan Timur. Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Ahli

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
			Ketahanan Pangan Provinsi Kaltim
10		<p>9 Sekolah Di Balikpapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDN 009 Balikpapan Timur - SDN 015 Balikpapan Tengah - SDIT Al Auliya 1 Balikpapan Timur - SD Tunas Budi Luhur Balikpapan Timur - SMP Wiyata Mandala Balikpapan - SMPN 23 Balikpapan - SMP Muhammadiyah 2 Balikpapan - SMA IT Al Auliya Balikpapan - SMAN 6 Balikpapan 	<p>Peringatan Hari Lingkungan Sedunia (HLH) Jatuh setiap Tanggal 5 Juni, Pada Tahun 2022</p> <p>Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) yang diselenggarakan DLH Provinsi Kalimantan Timur diselenggarakan pada Tanggal 6 Juni 2022 di Samarinda. Salah satu rangkaian acara HLH ini adalah penyerahan penghargaan dan apresiasi kepada sekolah, perkantoran swasta dan perorangan yang telah komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui Program Proper (Program Penilaian Peringatan Kinerja Perusahaan) dalam pengelolaan lingkungan hidup, penghargaan Adiwiyata dan Kalpataru Tingkat Provinsi. Adapun penerima penghargaan lingkungan dari Balikpapan. Untuk tokoh Kalpataru Tingkat Provinsi penerima penghargaan dari Provinsi Kaltim adalah Herry Wijaya dan Widodo dengan kategori Perintis lingkungan. Local hero Herry Wijaya juga memperoleh apresiasi dari provinsi Kaltim. Terdapat 9 sekolah penerima Penghargaan dan Apresiasi Adiwiyata Tingkat Provinsi berdasarkan tim</p>

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
			<p>penilai Adiwiyata Provinsi Kaltim 2022. Sementara perusahaan yang berhasil memperoleh Proper sebanyak 21 perusahaan industri dan jasa. Terdiri peringkat hijau sberjumlah 11 perusahaan, peringkat biru sebanyak 9 perusahaan, dan peringkat merah sebanyak 1 perusahaan. Dari hasil tersebut terdapat peningkatan hasil proper tahun 2020-2021 ke 2022. Di mana peringkat hijau sebanyak 4 perusahaan, peringkat biru sebanyak 14 perusahaan dan peringkat merah 2 perusahaan.</p>
11		Peringkat Nindya Sebagai Kota Menuju Kota Layak Anak (Kla) Tahun 2022	<p>Kota Balikpapan kembali mendapat predikat Nindya sebagai Kota Menuju Kota Layak Anak (KLA). Balikpapan berhasil mempertahankan predikat yang telah dicapainya sejak tahun 2019. Dari 24 indikator KLA, sudah banyak yang bisa dipenuhi Kota Balikpapan kendati beberapa hal masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan.</p>
12		Penghargaan Dalam Bidang Pembina Olahraga Berprestasi	<p>Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menerima penghargaan sebagai pembina olah raga berprestasi dari Menteri Pemuda dan Olah Raga Zainudin Amali. Pemberian penghargaan ini dilakukan di malam puncak pelaksanaan</p>

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
			peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-39 disaksikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Stadion Batakan, Kota Balikpapan
13		Peringkat 8 Nasional Terkait Penilaian Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Pemerintah Kota Balikpapan berhasil masuk dalam 8 besar sebagai Nomine Terbaik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) Tahun 2022 di tingkat Nasional berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian Investasi/BKPM.
14		Upakarya Wanua Nugraha	Kota Balikpapan berhasil memboyong tiga penghargaan dalam kegiatan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) tahun 2022. Penghargaan pertama yang diterima yakni Upakarya Wanua Nugraha. Ini merupakan penghargaan yang diberikan atas keberhasilan melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan, sehingga berhasil meraih juara lomba desa dan kelurahan di ajang tingkat nasional. Penganugerahan Upakarya Wanua Nugraha merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2015,

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
			<p>tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Indonesia. Atas dasar tersebut, Kemendagri menyelenggarakan lomba desa dan kelurahan tingkat regional, Temu Karya Nasional serta Pindeskel kategori penilaian lomba bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga regional. Dalam Pindeskel tahun 2022, Balikpapan juga memperoleh juara pertama lomba desa dan kelurahan tingkat regional III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi) yang diraih oleh Kelurahan Sumber Rejo. Selain itu Balikpapan juga menjadi juara pertama lomba desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2022 yang juga diraih kelurahan Sumber Rejo.</p>
15		Penghargaan IHIA-VI 2022	<p>Pemerintah Kota Balikpapan menerima penghargaan Inovation Healthcare Awards kategori Mutu Pelayanan Kesehatan. Setiap tahunnya Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk menilai inovasi-inovasi yang dilakukan kabupaten/kota. Inovasi ini terdiri dari beberapa kategori. Contohnya kategori terkait pelaksanaan germas, PSC (Public</p>

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
			Service Center), atau inovasi mutu.
14		Penghargaan Siddhakarya	Penganugerahan Produktivitas Siddhakarya adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada perusahaan dan UMKM yang berhasil meningkatkan produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut sebagai upaya memotivasi kepada pengusaha agar melakukan berbagai upaya peningkatan produktivitas sampai mencapai <i>standar of excellence in quality</i> .
15		Kota Peduli HAM 2022	Kota Balikpapan kembali menerima penghargaan sebagai kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Kota Balikpapan mulai mengikuti penilaian ini sejak tahun 2015 dan selama beberapa kali telah memperoleh penghargaan serupa. Pemerintah Kota Balikpapan selalu berupaya untuk memperbaiki kinerja dalam upaya memenuhi hak asasi manusia. Terdapat 3 indikator yang menjadi penilaian utama yaitu indikator struktur, indikator proses dan indikator hasil. Untuk indikator struktur yang menjadi faktor pendukungnya adalah produk hukum daerah yang dimiliki sebagai

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
			<p>upaya. Sementara indikator proses berupa upaya teknis pelaksanaan HAM, seperti program, aksi, kegiatan, penganggaran, sarana dan prasarana maupun intervensi lainnya. Terakhir, indikator hasil, yaitu dampak dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat. Kriteria penilaian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dengan mempedomani Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 yaitu tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang meliputi sepuluh kriteria. Sepuluh kriteria ini adalah hak sipil dan politik yang terdiri dari, hak atas bantuan hukum; hak atas informasi; hak turut serta dalam pemerintahan; hak atas keberagaman dan pluralisme; dan hak atas kependudukan. Kemudian hak ekonomi, sosial dan budaya yang terdiri dari, Hak atas kesehatan; hak atas pendidikan; hak atas pekerjaan; hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak; dan Hak perempuan dan anak</p>

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
16		Anugerah Meritokrasi ASN Tahun 2022 Kategori Baik	<p>Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam penghargaan itu, Kota Balikpapan berhasil memperoleh predikat “Baik”. Penghargaan meritokrasi ini harapannya akan mengakselerasi tercapainya transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Balikpapan yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi.</p>
17		Terbaik Ketiga Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kota/Kabupaten	<p>Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Pemkot Balikpapan mendapatkan predikat menuju informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.</p> <p>Penghargaan ini diberikan berdasarkan monitoring kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik.</p>
18		Anugerah Revolusi Mental Kategori Kabupaten/Kota Kawasan Timur	<p>Kota Balikpapan menerima penghargaan Anugerah Revolusi Mental (ARM) tahun 2022 kategori Pemerintah Kota/Kabupaten Kawasan Timur Indonesia.</p>

No	Dokumentasi Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
			<p>Penghargaan diberikan kepada pihak-pihak yang mencetak sumber daya unggul. Serta pihak yang bergotong royong mewujudkan perilaku berintegritas. Penghargaan dibagi dalam lima kategori. Pertama adalah Kategori Pemerintah Provinsi, kategori kedua adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, ketiga adalah Lembaga Mitra GNRM. Keempat adalah kategori Tokoh dan Lembaga dan kelima Kategori Kedermawanan Sosial.</p>

Sumber data: Bagian Organisasi, diolah 2022



BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah atau desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif serta berkewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Balikpapan tidak mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.



BAB IV PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa SPM Bidang Pendidikan meliputi:

a. Pendidikan Usian Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian

Target pencapaian SPM Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan pemerintah No.2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Target pencapaian SPM Kabupaten/Kota Urusan Pendidikan

Indikator	Elemen Data		Target
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan anak usia dini	100%

Indikator	Elemen Data		Target
		Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	
Pendidikan Dasar	Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah dasar	100%
		Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun	
	Persentase anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah menengah pertama	100%
		Jumlah anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	
Pendidikan kesetaraan	Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan kesetaraan dasar dan menengah pertama	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan kesetaraan dasar dan menengah	100%
		Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pelayanan Dasar SPM Urusan Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2022 tergambar pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi pencapaian SPM Bidang pendidikan Tahun 2022

No	Indikator kinerja / jenis layanan spm	Indikator pencapaian / output			Total pencapaian
	Kategori indeks pencapaian spm				58.04 %
1 .	Pendidikan dasar usia dini				
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	
	• jumlah yang harus dilayani :	26,064	14,329	11,735	55%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)				
		Jumlah mutu barang / jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang / jasa yang tersedia	Jumlah mutu barang / jasa yang belum tersedia	Persentase capaian mutu 100%
	Buku gambar	26,064	14,329	11,735	54.98 %
	Alat mewarnai	26,064	14,329	11,735	54.98 %
	Penyediaan biaya personil peserta didik	26,064	14,329	11,735	54.98 %
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi s1/d-iv	383	249	134	65.01 %
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi s1/d-iv	1,176	508	668	43.20 %
2 .	Pendidikan dasar				88.57 %

No	Indikator kinerja / jenis layanan spm	Indikator pencapaian / output			Total pencapaian
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	70.57 %
	• jumlah yang harus dilayani :	119,909	105,782	14,127	88%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)				17.99 %
		Jumlah mutu barang / jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang / jasa yang tersedia	Jumlah mutu barang / jasa yang belum tersedia	89.97 %
	Buku teks pelajaran	119,909	105,782	14,127	88.22 %
	Perlengkapan belajar	119,909	105,782	14,127	88.22 %
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi s1/d-iv	260	251	9	96.54 %
	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi sma/ sederajat	641	501	140	78.16 %
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3,845	3,497	348	90.95 %
	Penyediaan biaya personil peserta didik	119,909	105,782	14,127	88.22 %
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi s1/d-iv	4,319	4,099	220	94.91 %
	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	310	293	17	94.52 %
3 .	Pendidikan kesetaraan				30.65 %
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	18.37 %

No	Indikator kinerja / jenis layanan spm	Indikator pencapaian / output			Total pencapaian
	• jumlah yang harus dilayani :	15,341	3,523	11,818	23%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)				12.28 %
		Jumlah mutu barang / jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang / jasa yang tersedia	Jumlah mutu barang / jasa yang belum tersedia	61.40 %
		-1	-2	-3	
	Modul belajar	15,341	3,523	11,818	22.96 %
	Jumlah rombongan belajar di pusat kegiatan belajar masyarakat (pkbm)	166	166	0	100.00 %
	Penyediaan biaya personil peserta didik	15,341	3,523	11,818	22.96 %
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi s1/d-iv	146	146	0	100.00 %
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi s1/d-iv	19	14	5	73.68 %
	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi sma/ sederajat	40	34	6	85.00 %
	Perlengkapan belajar	15,341	3,523	11,818	22.96 %
	Pkbm terakreditasi minimal c	22	14	8	63.64 %

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2022 Kota Balikpapan Sebagai berikut:

Tabel 4.3

Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
KOTA BALIKPAPAN					126,274,425,300	97,904,367,234	77.53 %
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				4,995,000,000	4,777,051,300	95.64 %
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD			0	0	0.00 %
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan			1,080,000,000	948,826,300	87.85 %
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	60,000,000	55,840,000	93.07 %
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	510,000,000	446,493,150	87.55 %
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	510,000,000	446,493,150	87.55 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,080,000,000	948,826,300	87.85 %
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)			0	0	0.00 %
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K20220131031456			3,915,000,000	3,828,225,000	97.78 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	3,915,000,000	3,828,225,000	97.78 %
	JUMLAH INDIKATOR				3,915,000,000	3,828,225,000	97.78 %
	JUMLAH PROGRAM				4,995,000,000	4,777,051,300	95.64 %
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				110,590,675,300	84,605,098,758	76.50 %
		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			68,866,186,300	48,874,092,608	70.97 %
	5	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	420,000,000	349,775,000	83.28 %
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	68,446,186,300	48,524,317,608	70.89 %
	JUMLAH INDIKATOR				68,866,186,300	48,874,092,608	70.97 %
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			13,332,000,000	10,464,563,920	78.49 %
	6	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	6,666,000,000	5,232,281,960	78.49 %
		2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	6,666,000,000	5,232,281,960	78.49 %
	JUMLAH INDIKATOR				13,332,000,000	10,464,563,920	78.49 %
	7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			8,458,739,000	8,345,782,908	98.66 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	7,465,000,000	7,396,836,893	99.09 %
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	993,739,000	948,946,015	95.49 %
JUMLAH INDIKATOR					8,458,739,000	8,345,782,908	98.66 %
8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)				6,500,000,000	5,182,069,985	79.72 %
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		Pendidik dan tenaga kependidikan	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Guru	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
	5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah		Kegiatan	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah		Kegiatan	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan			1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	JUMLAH INDIKATOR				6,500,000,000	5,182,069,985	79.72 %
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			13,433,750,000	11,738,589,337	87.38 %
9	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan		Pendidik dan tenaga kependidikan	13,433,750,000	11,738,589,337	87.38 %
	JUMLAH INDIKATOR				13,433,750,000	11,738,589,337	87.38 %
	JUMLAH PROGRAM				110,590,675,300	84,605,098,758	76.50 %
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN				10,688,750,000	8,522,217,176	79.73 %
10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)				0	0	0.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)				1,588,750,000	1,267,319,197	79.77 %
	2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru		Kegiatan	1,588,750,000	1,267,319,197	79.77 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,588,750,000	1,267,319,197	79.77 %
12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)				0	0	0.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)				7,800,000,000	6,218,483,982	79.72 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
		JUMLAH INDIKATOR			7,800,000,000	6,218,483,982	79.72 %
		Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
	14	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
		JUMLAH INDIKATOR			1,300,000,000	1,036,413,997	79.72 %
		JUMLAH PROGRAM			10,688,750,000	8,522,217,176	79.73 %

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil untuk Penerapan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

Nama Jabatan	Eselon	Jumlah	Gol/Pangkat				Jumlah	Diklat Struktural				Jumlah
			I	II	III	IV		PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
STRUKTURAL												
Kepala Dinas	II/b	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1
Sekretaris	III/a	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
Kepala Bagian/ Bidang	III/b	5	-	-	1	4	5	-	-	5	-	5
Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi	IV/a	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
Jafung Penyetaraan	IV/a	14	-	-	-	14	14	-	-	-	12	12
JUMLAH		22	0	0	2	20	22	0	1	6	13	20
Pelaksana Disdik	-	34	-	18	16	-	34	-	-	-	-	-
Penjaga SD	-	6	1	4	1	-	6	-	-	-	-	-
JUMLAH		40	1	22	17	0	40	0	0	0	0	0
TOTAL STRUKTURAL		62	1	22	19	20	62	0	1	6	13	20
FUNGSIONAL												
Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK	-	36	-	-	1	35	36	-	-	-	-	-
Guru TK	-	11	-	-	7	4	11	-	-	-	-	-
Guru SD	-	735	-	2	456	277	735	-	-	-	-	-
Guru SMP	-	567	-	-	320	247	567	-	-	-	-	-
Pamong (UPTD SKB)	-	11	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-
TOTAL		1360	0	2	794	564	1360	0	0	0	0	0

4.1.6 Permasalahan dan Solusi.

Tabel 4.5

Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Uraian	Permasalahan					Solusi
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	
1	Pengelolaan Paud, Pengelolaan Pendidikan Sd, Pengelolaan Pendidikan Smp, Dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Spm Bidang Pendidikan Di Balikpapan Secara Garis Besar Dikelola Oleh Disdik Dan Kemenag Balikpapan, Dan Yang Menjadi Kendala Adalah Pengumpulan Data Yang Dikelola Oleh Kemenag. • Khusus Untuk Data Pendukung Yaitu Jumlah Penduduk Dikelola Oleh Disdukcapil, Dan Data Tidak Bisa Upgrade Karena Harus Menunggu Rekon Dengan Kemendagri Dan Ini Cukup Memakan Waktu Yang Lama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghitungan Kebutuhan Berkaitan Erat Dengan Validitas Data, Sehingga Kendala Secara Garis Besar Sama Dengan Poin Pengumpulan Data Di Samping 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Perbedaan Jadwal Yang Signifikan Antara Tahapan Perencanaan Dan Penganggaran Dengan Tahun Ajaran Di Sekolah (Tidak In Line), Ini Menyebabkan Data-Data Yang Dibutuhkan Dalam Penyusunan Kerja Tidak Valid/Tidak Upgrade. • Komitmen Anggota Dprd Dalam Mengaspirasikan Pokir Belum Sepenuhnya Dapat Menuntaskan Permasalahan2 Spm Bidang Pendidikan Secara Efektif Dan Efisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan Komitmen Pimpinan Agar Pelaksanaan Spm Sebagai Prioritas Utama Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Teknis Tidak Ada Kendala Yg Fatal, Hanya Saja Perlu Lebih Ditingkatkan Kerja Sama Antar Pihak Dalam Menyampaikan Laporan Tepat Waktu Yang Dituntut Oleh Kemendagri Lewat E-Spm 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan Kerja Sama Dengan Pihak Kemenag. Dan Disdukcapil Balikpapan Dalam Penyediaan Data-Data Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Spm. • Mengusulkan Kepada Tapd Kota Balikpapan Untuk Lebih Mengarahkan Aspirasi Pokir Dprd Dalam Penuntasan Permasalahan Spm Khususnya Bidang Pendidikan. • Penyatuan Komitmen Semua Lini Dalam Pelaksanaan Spm • Meningkatkan Koordinasi Internal Dalam Penyusunan Laporan Spm

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berikut adalah jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019:

Tabel 4.6

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Standar Pelayanan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir Bayi	bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Standar Pelayanan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Sesuai standar pelayanan kesehatan tuberkolosis	orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

4.2.2 Target Pencapaian

Penerima Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Target Capaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Setiap Warga Negara penderita hipertensi yang mendaplayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

4.2.3 Realisasi

Pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel. 4.8

Realisasi Pencapaian Spm Bidang Urusan Kesehatan

Tabel. 4.8
Realisasi Pencapaian Spm Bidang Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
Kategori Indeks Pencapaian Spm					90.81 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				98.74 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.91 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	10,974	10,825	149	99%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				19.83 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	99.15 %
	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10,974	10,825	149	98.64 %
	Tablet Tambah Darah	987,66	974,25	13,41	98.64 %
	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan Hb, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	10,974	10,825	149	98.64 %
	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	10,974	10,825	149	98.64 %
	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	10,974	10,825	149	98.64 %
	Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	54	54	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Bidan	108	108	0	100.00 %
	Perawat	135	135	0	100.00 %
	Jumlah	1,031,853	1,017,847	14,006	793.20 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				96.54 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.92 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	10,475	10,072	403	96%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				19.62 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	98.08 %
	Formulir Partograf	10,475	10,072	403	96.15 %
	Kartu Ibu (Rekam Medis)	10,475	10,072	403	96.15 %
	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	10,475	10,072	403	96.15 %
	Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan	54	54	0	100.00 %
	Bidan	108	108	0	100.00 %
	Perawat	135	135	0	100.00 %
	Jumlah	31,722	30,513	1,209	588.45 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	9,976	9,976	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
	Vaksin Hepatitis B0	9,976	9,976	0	100.00 %
	Vitamin K1 Injeksi	9,976	9,976	0	100.00 %
	Salep/Tetes Mata Antibiotik	9,976	9,976	0	100.00 %
	Formulir Bayi Baru Lahir	9,976	9,976	0	100.00 %
	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	9,976	9,976	0	100.00 %
	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	9,976	9,976	0	100.00 %
	Dokter/Dokter Spesialis Anak	54	54	0	100.00 %
	Bidan	108	108	0	100.00 %
	Perawat	135	135	0	100.00 %
	Jumlah	60,153	60,153	0	900.00 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita				98.28 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.33 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	49,334	48,918	416	99%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				18.95 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	
					94.75 %
	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (Kpsp) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	49,334	48,918	416	99.16 %
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (Ddtk)	49,334	48,918	416	99.16 %
	Buku Kartu Ibu Dan Anak (Kia)	49,334	48,918	416	99.16 %
	Vitamin A Biru	6,94	6,94	0	100.00 %
	Vitamin A Merah	39,724	39,724	0	100.00 %
	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Dpt -Hb -Hib, Campak, Rubella	49,334	48,918	416	99.16 %
	Vaksin Imunisasi Dasar: Hbo, Bcg, Polio, Ipv, Dpt -Hb -Hib, Campak, Rubella	49,334	49,334	0	100.00 %
	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (Bhp)	345,338	84,939	260,399	24.60 %
	Peralatan Anafilaktik	27	27	0	100.00 %
	Bidan	108	108	0	100.00 %
	Dokter	54	54	0	100.00 %
	Perawat	135	135	0	100.00 %
	Ahli Gizi	27	27	0	100.00 %
	Guru Paud	1	1	0	100.00 %
	Kader Kesehatan	8,45	8,45	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Jumlah	647,474	385,411	262,063	1,421.24 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	56,791	56,791	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
	Buku Raport Kesehatanku	56,791	56,791	0	100.00 %
	Buku Pemantauan Kesehatan	56,791	56,791	0	100.00 %
	Kuesioner Skrining Kesehatan	56,791	56,791	0	100.00 %
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	45,432	45,432	0	100.00 %
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	56,791	56,791	0	100.00 %
	Dokter/Dokter Gigi	54	54	0	100.00 %
	Bidan	108	108	0	100.00 %
	Perawat	135	135	0	100.00 %
	Ahli Gizi	27	27	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	0	100.00 %
	Guru	1	1	0	100.00 %
	Kader Kesehatan	8,45	8,45	0	100.00 %
	Jumlah	281,403	281,403	0	1,200.00 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				81.38 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	61.38 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	440,139	337,682	102,457	77%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	27	27	0	100.00 %
	Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, Kit Iva Tes	41	41	0	100.00 %
	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem	108	108	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Informasi Penyakit Tidak Menular (Siptm)				
	Dokter	27	27	0	100.00 %
	Bidan	27	27	0	100.00 %
	Perawat	27	27	0	100.00 %
	Ahli Gizi	27	27	0	100.00 %
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	27	27	0	100.00 %
	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	27	27	0	100.00 %
	Jumlah	338	338	0	900.00 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				66.61 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	48.37 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	61,672	37,288	24,384	60%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				18.24 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	91.21 %
	Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	61,672	61,672	0	100.00 %
	Instrumen Geriatric Depression Scale (Gds), Intrumen Abbreviated Mental Test (Amt) Dan Instrumen Activity Daily	61,672	37,288	24,384	60.46 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Living (Adl) Dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3g)				
	Buku Kesehatan Lansia	61,672	37,288	24,384	60.46 %
	Dokter	54	54	0	100.00 %
	Bidan	108	108	0	100.00 %
	Perawat	135	135	0	100.00 %
	Ahli Gizi	27	27	0	100.00 %
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	0	100.00 %
	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	102	102	0	100.00 %
	Jumlah	185,474	136,706	48,768	820.92 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				80.51 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	60.51 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	175,805	132,97	42,835	76%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
	Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	27	27	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Tensimeter	27	27	0	100.00 %
	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (Siptm)	108	108	0	100.00 %
	Dokter	27	27	0	100.00 %
	Bidan	27	27	0	100.00 %
	Perawat	27	27	0	100.00 %
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	27	27	0	100.00 %
	Jumlah	270	270	0	700.00 %
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	17,263	17,263	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	17,263	17,263	0	100.00 %
	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (Siptm)	108	108	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	27	27	0	100.00 %
	Dokter	27	27	0	100.00 %
	Bidan	27	27	0	100.00 %
	Perawat	27	27	0	100.00 %
	Ahli Gizi	27	27	0	100.00 %
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	27	27	0	100.00 %
	Jumlah	17,533	17,533	0	800.00 %
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat				88.75 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	68.75 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	711	611	100	86%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (Ppdgj Iii) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	27	27	0	100.00 %
	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	54	54	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	27	27	0	100.00 %
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	27	27	0	100.00 %
	Dokter Dan/Atau Perawat Terlatih Jiwa Dan/Atau Tenaga Kesehatan Lainnya	54	54	0	100.00 %
	Jumlah	189	189	0	500.00 %
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				88.43 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	68.89 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	14,354	12,361	1,993	86%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				19.53 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	97.67 %
	Media Kie (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	3,9	3,9	0	100.00 %
	Reagen Zn Tb	140	140	0	100.00 %
	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	83,94	81,79	2,15	97.44 %
	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu	14,354	12,361	1,993	86.12 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering				
	Catridge Tes Cepat Molekuler	14,354	12,361	1,993	86.12 %
	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	10,339	10,339	0	100.00 %
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	117	117	0	100.00 %
	Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	45	45	0	100.00 %
	Perawat	39	39	0	100.00 %
	Analisis Teknik Laboratorium Medik (Atlm)	37	37	0	100.00 %
	Penata Rontgen	10	10	0	100.00 %
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	27	27	0	100.00 %
	Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai	34	34	0	100.00 %
	Jumlah	127,336	121,2	6,136	1,269.68 %
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				90.52 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	70.75 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	17,736	15,686	2,05	88%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				19.77 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	98.84 %
	Media Kie (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	33	33	0	100.00 %
	Tes Cepat Hiv (Rdt) Pertama	17,736	15,686	2,05	88.44 %
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai	17,736	17,736	0	100.00 %
	Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor Ktp/Nik	33	33	0	100.00 %
	Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	38	38	0	100.00 %
	Perawat	33	33	0	100.00 %
	Bidan	33	33	0	100.00 %
	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (Atlm)	33	33	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	33	33	0	100.00 %
	Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	27	27	0	100.00 %
	Jumlah	35,735	33,685	2,05	988.44

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan antara lain:

Tabel 4.9

Anggaran Pembiayaan Program/Kegiatan SPM Kesehatan Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
Kota Balikpapan				6,591,689,150	5,371,883,100	81.49 %
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				6,591,689,150	5,371,883,100	81.49 %
1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K20220131032750			6,591,689,150	5,371,883,100	81.49 %
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,156,881,800	940,612,280	81.31 %

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	418,958,000	224,190,800	53.51 %
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	269,000,000	255,626,700	95.03 %
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	994,294,250	852,386,332	85.73 %
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	797,452,900	686,665,994	86.11 %
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	671,898,350	525,480,716	78.21 %
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	768,440,350	674,815,220	87.82 %
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	155,000,000	109,898,140	70.90 %
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang	150,000,000	117,296,895	78.20 %

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		Penderita Diabetes Melitus				
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	159,485,000	102,850,150	64.49 %
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	529,252,400	418,508,077	79.08 %
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	Orang	521,026,100	463,551,796	88.97 %
Jumlah Indikator				6,591,689,150	5,371,883,100	81.49 %
Jumlah Program				6,591,689,150	5,371,883,100	81.49

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil untuk pencapaian SPM urusan Bidang kesehatan tahun 2022 tergambar pada tabel sebagai berikut;

Tabel 4.10

Dukungan Personil SPM urusan Kesehatan.

No	Uraian	Nama Pejabat
1	Kepala Dinas	dr.Andi Sri Julyarti, M.Kes
2	Sekretaris Dinas	Dra. Hasnah Haerani, Apt
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	dr. Elisabeth Rassi
4	Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	drg. Ahmad Jais, MH, MARS
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	drg. Ahmad Jais, MH, MARS
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	drg. Wuryansari
7	UPT Puskesmas Teritip	dr. Ummy Sartika Almady
8	UPT Puskesmas Lamaru	drg. Rudi Raharjo
9	UPT Puskesmas Manggar Baru	dr. Karunia Nente
10	UPT Puskesmas Manggar	drg. Ida Kurniati
11	UPT Puskesmas Sepinggan	drg. Sulastri
12	UPT Puskesmas Damai	drg. Sekar Dianing Indrati
13	UPT Puskesmas Gunung Bahagia	Sulaiman, SKM
14	UPT Puskesmas Klandasan Ilir	drg. Sri Mulyati
15	UPT Puskesmas Telaga Sari	dr. Rusna Azizah Aziz
16	UPT Puskesmas Prapatan	dr. Tien Fatimatuzahra
17	UPT Puskesmas Mekar Sari	drg. Lily Anggraini
18	UPT Puskesmas Gunung Sari Ilir	drg. Titing Widarwati Ananda
19	UPT Puskesmas Gunung Sari Ulu	drg. Niken Giri Wardhani
20	UPT Puskesmas Karang Rejo	drg. Faridah
21	UPT Puskesmas Sumber Rejo	drg Ida Higyawati
22	UPT Puskesmas Karang Jati	dr. Niken Dayu Anggraini
23	UPT Puskesmas Muara Rapak	Fahmy Rosadi
24	UPT Puskesmas Gunung Samarinda	drg. Sulis Kartiningrum
25	UPT Puskesmas Batu Ampar	drg. Nurlin Handaruni
26	UPT Puskesmas Graha Indah	dr. Cristiana Dessy Nugraheni
27	UPT Puskesmas Karang Joang	dr. Agus Jiwani
28	UPT Puskesmas Baru Ilir	dr. Erika N. Sembiring
29	UPT Puskesmas Margasari	dr. Susliani Pancawinarsih
30	UPT Puskesmas Baru Tengah	drg. Rulida Osma Marisyah
31	UPT Puskesmas Margo Mulyo	dr. Dekrita Ria Hanani

No	Uraian	Nama Pejabat
32	UPT Puskesmas Baru Ulu	dr. Castro James Kalengkongan
33	UPT Puskesmas Kariangau	dr. Mira Firdayanti

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam memberikan pelayanan SPM Urusan Kesehatan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga pencapaian SPM masih belum Maksimal. Permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk Realisasi Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yaitu sebanyak 10.027 dimana realisasi melebihi target sasaran, sehingga capaiannya 100,51 %;
- b. Untuk Realisasi Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar yaitu sebanyak 70.684 dimana realisasi melebihi target sasaran, sehingga capaiannya 124,46%;
- c. Untuk Realisasi Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus yaitu sebanyak 22.233 dimana realisasi melebihi target sasaran, sehingga capaiannya 128,79%. Tetapi pada aplikasi E-SPM tidak bisa memasukkan capaian yang lebih dari 100%.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan terdiri dari :

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target Pencapaian

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

a. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten/Kota}} \times 100$$

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk Atau Tangki Septik}}{\text{Jumlah Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDS Dengan Kepadatan Penduduk Pada Wil. Terbangun < 25 jiwa/Ha}} \times 100$$

Adapun jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Capaian SPM Pekerjaan Umum di Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah tergambar pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian Spm				53.72 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari				93.33 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.19 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	718,423	711,14	7,283	99%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				14.15 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	70.73 %
	Kuantitas (Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter/Orang/Hari)	718,423	711,14	7,283	98.99 %
	Kualitas Air (Keruh, Berwarna, Berasa, Berbusa, Berbau)	718,423	610,188	108,235	84.93 %
	Jaringan Perpipaan	718,423	600,835	117,588	83.63 %
	Jaringan Bukan Perpipaan	718,423	110,305	608,118	15.35 %
	Jumlah	2,873,692	2,032,468	841,224	282.90 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				14.11 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.19 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	718,423	502,969	215454	15%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				2.18 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	
		-1	-2	-3	10.90 %
	Kuantitas Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	718,423	502,969	215,454	14.91 %
	Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik	718,423	502,969	215,454	14.91 %
	Sub-Sistem Pengolahan Setempat	718,423	495,314	223,109	13.97 %
	Sub-Sistem Pengangkutan	718,423	81,815	636,608	10.34 %
	Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (Iplt)	718,423	81,815	636,608	10.34 %
	Pengolahan Lumpur Tinja (Ipal)	718,423	7,655	710,768	0.94 %
	Jumlah	4,310,538	1,672,537	2,638,001	65.41

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk SPM urusan pekerjaan umum tergambar pada tabel sebagai berikut;

Tabel 4.13

Alokasi Anggaran SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
Kota Balikpapan				13,145,194,850	11,887,289,822	90.43 %
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				9,651,985,700	8,587,851,499	88.97 %
1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota K20220131033558			9,651,985,700	8,587,851,499	88.97 %
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Spam	Dokumen	578,394,850	545,176,500	94.26 %

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan Spam	Dokumen	300,000,000	295,025,790	98.34 %
	7	Perluasan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	Sr	8,773,590,850	7,747,649,209	88.31 %
Jumlah Indikator				9,651,985,700	8,587,851,499	88.97 %
Jumlah Program				9,651,985,700	8,587,851,499	88.97 %
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				3,493,209,150	3,299,438,323	94.45 %
2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota K20220131034234			3,493,209,150	3,299,438,323	94.45 %
	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen	82,085,300	80,662,035	98.27 %
	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	439,839,850	346,387,551	78.75 %
	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang	2,971,284,000	2,872,388,737	96.67 %
Jumlah Indikator				3,493,209,150	3,299,438,323	94.45 %
Jumlah Program				3,493,209,150	3,299,438,323	94.45 %

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil SPM pekerjaan umum pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari Dan untuk bidang urusan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota personil atau pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut;

Tabel 4.14

Dukungan Personil SPM urusan Pekerjaan Umum.

No	Uraian	Nama Pejabat
1	Plt. Kepala Dinas DPU	Rafiuddin
2	Kepala Bidang PLP DPU	Nurlaili
3	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Bolly K. Wardhana
4	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Dian Anggrainy Yuliana
5	Pengadminstrasi Umum	Edy Ependi
6	Pengadminstrasi Umum	Nurul Hafiza
7	PT. Metaforma Consultans	Sofyan Munawar
8	PT. Metaforma Consultans	Deny Triadi
9	Perumda Tirta Manuntung	Ganden Aditera Ismed

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- a) Tidak bisa mendapatkan data BNBA dari Disdukcapil karena belum mendapat akses dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjendukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI;
- b) Perhitungan jumlah rumah tangga masih belum ada data master sebagai dasar perhitungan awal jumlah jiwa;
- c) Belum dianggarkan kajian SPM Air Limbah (direncanakan dianggarkan tahun 2023);
- d) Masih diinput dengan data dasar yang sudah ada saja (belum mencakup seluruh masyarakat yang ada di Kota Balikpapan).

b. Solusi

Dilakukan pendataan secara menyeluruh kepada masyarakat berdasarkan *by name by adres*.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

4.1.1 jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar bidang perumahan rakyat merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni

dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Maka jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan terdiri dari;

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.2 Target Pencapaian

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Perumahan Rakyat secara bertahap sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan.

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana. Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100$$

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100$$

Jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4.15

Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

Tabel 4.16

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kota Balikpapan Tahun 2022

Kab/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah KOTA/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah KOTA/Kota		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kota Balikpapan	Nihil	Nihil	100,00 %	Nihil	Nihil	100,00%

Untuk indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kota Balikpapan Capaian Nihil dikarenakan Tidak terjadi bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah juga Nihil Karena Tidak adanya program Pemerintah Daerah terkait dengan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat antara lain:

Tabel 4.17

Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	Kota Balikpapan				1,300,000,000	938,565,119	80.47 %
1		Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K20220131034637		1,000,000,000	912,197,051	91.22 %	
1	Program Pengembangan Perumahan			1,000,000,000	912,197,051	91.22 %	
		1	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	300,000,000	265,420,250	88.47 %
		2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	100,000,000	94,912,770	94.91 %
		3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen	100,000,000	95,433,800	94.05 %
		5	Pendataan Dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	95,433,800	95.43 %
		6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus	Dokumen	400,000,000	362,376,431	90.59 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	Jumlah Indikator				1,000,000,000	912,197,051	91.22 %
2		Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K20220131034753		0	0	0.00 %	
	Jumlah Program				1,000,000,000	912,197,051	91.22 %
Kegiatan Lainnya							
2	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya						
		1.	Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		150,000,000	13,184,034	8.79 %
		3.	Pembentukan Dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping Dan Fasilitator		100,000,000	13,184,034	13.18 %
		4.	Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana		50,000,000	0	0%

4.1.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat didinas Perumahan dan kawasan permukiman Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 4.18

Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator Pelayanan	Dukungan Personil 2022			
		Pns	Non Pns	Unit	Total
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3	1	Bid. Perumahan dan Sub. Bag. Program	4 personil
2	Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	3	1	Bid. Perumahan dan Sub. Bag. Program	4 personil
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	3	1	Bid. Perumahan dan Sub. Bag. Program	4 personil

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Belum tersedianya data acuan sebagai dasar pembangunan rumah Kegiatan, dan baru diadakan pada TA. 2022, dengan Penyediaan APBD Kota.

- 1) Belum samanya Pemahaman tentang implementasi SPM Urusan Perumahan Rakyat;
- 2) Penyusunan data terkait Penerapan SPM baru dilaksanakan tahun 2022;
- 3) Pendataan mengenai jumlah rumah yang berada didaerah raean bencana dan lokasi yang berpotensi terkena program relokasi pemerintah daerah Kab/Kota baru dilaksanakan di tahun 2022, sehingga terkdendala dalam menentukan target penyediaan dan rehabilitasu rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/Kota;
- 4) Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk Menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.

4.5 Urusan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

4.5.1 jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Di Kota Balikpapan pengampu SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Sedangkan pengampu SPM Sub Urusan Kebakaran dan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

4.5.2 Target Pencapaian

Tabel 4.19

Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas oleh Daerah.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pelayanan SPM Bidang ketentraman dan ketertiban Umum kota Balikpapan Tahun 2022 sebagai berikut:

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum sebagai berikut;

Tabel 4.20

Realisasi Pelayanan SPM ketentraman dan ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian Spm Trantibum	Tuntas Paripurna			100.00 %
1 .	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)				100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	3,78	3,78	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil	1	1	0	100.00 %
	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Pelayanan Pengobatan	1	1	0	100.00 %
	Standar Operasional Prosedur Satpol Pp	20	20	0	100.00 %
	Standar Sarana Prasarana Satpol Pp	250	250	0	100.00 %
	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol Pp Dan Anggota Perlindungan Masyarakat	172	172	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	72	72	0	100.0

b). Pelayanan Kebencanaan sebagai berikut;

Tabel 4.21

Realisasi Pelayanan SPM Urusan Kebencanaan Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
Kategori Indeks Pencapaian Spm Kebencanaan		Tuntas Madya			82.72 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)				72.68 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	56.26 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	5	3,516	1484	70.32 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				16.43 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	82.13 %
	Pemetaan Terhadap Lokasi/Daerah Rawan Bencana Melalui Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	5	3,516	1484	70.32 %
	Identifikasi Dan Pemetaan Terhadap Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana	5	3,516	1484	70.32 %
	Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana	250	250	0	100.00 %
	Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi Dan Papan Informasi Publik Per Jenis Bencana	150	150	0	100.00 %
	Identifikasi Warga Yang Berpotensi Menjadi Korban Bencana	5	3,5	1500	70.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)				75.49 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	56.26 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	5	3,516	1484	70.32 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				19.23 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	96.16 %
	Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	25	25	0	100.00 %
	Peningkatan Kapasitas Personil/Sumber Daya Manusia (Sdm)	325	300	25	92.31 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)				100.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	1,433	1,433	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5	5	0	100.00 %
	Pendataan Terhadap Warga Yang Terkena/Menjadi Korban Bencana	1,433	1,433	0	100.00 %
	Melakukan Respon Cepat Klb Dan Respon Cepat Darurat Bencana	2	2	0	100.00 %
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (Klb) Penyakit Klb/Wabah Zoonosis Prioritas	2	2	0	100.00 %
	Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	100	100	0	100.0

c). Pelayanan Sub Urusan Damkar sebagai berikut;

Tabel 4.22

Realisasi Pelayanan SPM Sub Urusan Damkar kota Balikpapan Tahun 2022.

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
Kategori Indeks Pencapaian Spm Damkar		Tuntas Madya			83.54 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)				83.54 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.71 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	56	46	10	82.14 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				17.83 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	89.15 %
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak Diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba Di Lokasi	56	46	10	82.14 %
	Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan Dan Evakuasi	56	46	10	82.14 %
	Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Penyelamatan Dan Evakuasi	60	60	0	100.00 %
	Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan/Sumber Daya Manusia	325	300	25	92.31

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pelayanan SPM Bidang ketentraman dan ketertiban Umum kota Balikpapan Tahun 2022 sebagai berikut;

Tabel 4.23

Alokasi Anggaran Pelayanan SPM Bidang ketentraman dan ketertiban Umum kota Balikpapan Tahun 2022

Progr am	Kegia tan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
Kota Balikpapan				12,390,121,500	11,809,930,041	95.32 %
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)				3,282,994,500	3,009,507,700	91.67 %
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,169,002,300	2,903,495,200	91.62 %

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	Kasus	324,600,000	300,499,500	92.58 %
	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kasus	2,398,444,100	2,170,795,700	90.51 %
	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Dokumen	396,000,000	385,000,000	97.22 %
	5	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	49,958,200	47,200,000	94.48 %
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota			99,992,200	92,328,500	92.34 %
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	30,000,000	27,995,500	93.32 %
	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	69,992,200	64,333,000	91.91 %
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kabupaten/Kota			14,000,000	13,684,000	97.74 %
	1	Pengembangan Kapasitas Dan Karier Ppns	Laporan	14,000,000	13,684,000	97.74 %
Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)				1,472,265,000	1,434,201,760	97.41 %
4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			350,000,000	329,783,416	94.22 %
	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	350,000,000	329,783,416	94.22 %

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	0	0	0%
5	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			640,000,000	624,175,694	97.53 %
	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	200,000,000	197,796,333	98.90 %
	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit	150,000,000	146,854,780	97.90 %
	5	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Dokumen	80,000,000	76,213,684	95.27 %
	7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		100,000,000	98,799,551	98.80 %
	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	10,000,000	9,675,400	96.75 %
	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	100,000,000	94,835,946	94.84 %
6	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana			232,265,000	230,682,650	99.32 %
	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	9,375,000	9,281,250	99.00 %
	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	5,000,000	3,960,000	79.20 %
	3	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	100,000,000	99,792,000	99.79 %
	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	99,440,000	99,255,200	99.81 %
	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Dokumen	18,450,000	18,394,200	99.70 %

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			250,000,000	249,560,000	99.82 %
	5	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	250,000,000	249,560,000	99.82 %
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)				7,634,862,000	7,366,220,581	96.48 %
8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota			6,853,987,000	6,618,412,700	96.56 %
	1	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4,967,000,000	4,740,566,483	95.44 %
	2	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	300,000,000	298,386,000	99.46 %
	3	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	Laporan	100,000,000	99,900,350	99.90 %
	4	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50,000,000	49,984,000	99.97 %
	5	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Unit	50,000,000	49,117,500	98.24 %
	6	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	1,167,987,000	1,163,304,913	99.60 %
	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen	200,000,000	198,192,914	99.10 %
	9	Penyelenggaraan Kerja Sama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang	19,000,000	18,960,540	99.79 %

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			50,000,000	37,398,825	74.80 %
	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	50,000,000	37,398,825	74.80 %
11	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			281,000,000	264,771,206	94.22 %
	1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Orang	81,000,000	79,306,462	97.91 %
	2	Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		100,000,000	85,604,704	85.60 %
	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Dokumen	100,000,000	99,860,040	99.86 %
12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			449,875,000	445,637,850	99.06 %
	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Penimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	150,000,000	149,886,000	99.92 %
	2	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Dan Evakuasi	Dokumen	50,000,000	49,395,000	98.79 %
	3	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Dan Evakuasi	Unit	49,875,000	49,838,250	99.93 %
	4	Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Dan Evakuasi	Laporan	200,000,000	196,518,600	98.26

4.5.5 Dukungan Personil

Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah 225 orang yang terdiri dari PNS 157 Orang, structural 12 orang dan banpol 56 orang dan BPBD 300 orang yang terdiri pegawai PNS dan Non PNS .

Tabel. 2.24

Dukungan Personil Untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang
kebencanaan dan Damkar

No	Nama Jabatan	Gol/Pangkat				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Satuan				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Kepala Bagian/ Bidang				3	3
4	Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi			20		20
5	Staf	9	104	24		137
6	NABAN/BANPOL					138

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kota Balikpapan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 2) Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- 3) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.

- 4) Data selalu berubah karena tidak semua penduduk yang tinggal dikawasan rawan bencana ber KTP Balikpapan dari segi lokasi bencana bisa mengalami perubahan setiap tahun.
- 5) Data kejadian bencana setiap tahun sulit diprediksi;
- 6) Pendataan lokasi bencana dan jumlah penduduk tidak dilakukan setiap tahun sehingga ada selisih data;
- 7) Alokasi anggaran yang tersedia tidak mampu untuk menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat rutin setiap tahun untuk semua orang yang berada dilokasi rawan bencana;

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti:
- 2) Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti:
- 3) Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti:
- 4) Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti:
- 5) Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian

Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran.

Tabel. 4.25

Target Pencapaian SPM Urusan Sosial oleh Daerah.

Tabel. 4.25

Target Pencapaian SPM Urusan Sosial oleh Daerah.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	Setiap Tahun

4.6.3 Realisasi

Realisasi Pelayanan SPM Bidang Sosial kota Balikpapan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.26

Realisasi Pelayanan SPM Bidang Sosial kota Balikpapan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian Spm	Tuntas Madya	84.43 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti				48.08 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	33.06 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	1,084	448	636	41%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	75.07 %
1	Layanan Data Dan Pengaduan	1	1	0	100.00 %
2	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	5	2	3	40.00 %
3	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100.00 %
4	Penyediaan Permakanan	35	32	3	91.43 %
5	Penyediaan Sandang	5	3	2	60.00 %
6	Penyediaan Alat Bantu	1,084	448	636	41.33 %
7	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	0	100.00 %
8	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	126	126	0	100.00 %
9	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	126	126	0	100.00 %
10	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	12	7	5	58.33 %
11	Akses Ke Layanan Pendidikan	4	2	2	50.00 %
12	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4	3	1	75.00 %
13	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4	2	2	50.00 %
14	Layanan Rujukan	10	6	4	60.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
15	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru Dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	Jumlah	1,419	761	658	1,126.09 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti				94.52 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	24	24	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	75.07 %
1	Layanan Data Dan Pengaduan	24	21	3	87.50 %
2	Penyediaan Permakanan	24	24	0	100.00 %
3	Penyediaan Sandang	10	7	3	70.00 %
4	Penyediaan Alat Bantu	1	1	0	100.00 %
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	5	1	4	20.00 %
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	24	24	0	100.00 %
7	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	24	24	0	100.00 %
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	24	5	19	20.83 %
9	Akses Ke Layanan Pendidikan	8	8	0	100.00 %
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12	12	0	100.00 %
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8	5	3	62.50 %
12	Layanan Rujukan	12	1	11	8.33 %
13	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	10	2	8	20.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
14	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100.00 %
15	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru Dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	Jumlah	188	137	51	1,089.16 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti				92.95 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	94	94	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	12.95 %
1	Layanan Data Dan Pengaduan	94	39	55	41.49 %
2	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	30	27	3	90.00 %
3	Penyediaan Permakanan	94	94	0	100.00 %
4	Penyediaan Sandang	94	34	60	36.17 %
5	Penyediaan Alat Bantu	1	1	0	100.00 %
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	10	9	1	90.00 %
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	94	94	0	100.00 %
8	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	94	53	41	56.38 %
9	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	94	10	84	10.64 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
10	Akses Ke Layanan Pendidikan	1	1	0	100.00 %
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	94	32	62	34.04 %
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	94	5	89	5.32 %
13	Layanan Rujukan	94	7	87	7.45 %
14	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru Dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
15	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100.00 %
	Jumlah	890	408	482	971.49 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti				95.67 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	8	8	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				15.67 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	
1	Layanan Data Dan Pengaduan	1	1	0	100.00 %
2	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	8	3	5	37.50 %
3	Penyediaan Permakanan	8	8	0	100.00 %
4	Penyediaan Sandang	8	8	0	100.00 %
5	Penyediaan Alat Bantu	1	1	0	100.00 %
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	8	8	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	8	8	0	100.00 %
8	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan Dan Pengemis Terlantar	8	8	0	100.00 %
9	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	8	3	5	37.50 %
10	Akses Ke Layanan Pendidikan	1	1	0	100.00 %
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8	5	3	62.50 %
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8	2	6	25.00 %
13	Layanan Rujukan	8	1	7	12.50 %
14	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru Dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
15	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100.00 %
	Jumlah	85	59	26	1,175.00 %
5 .	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				90.93 %
		Ya Terjadi Bencana			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	12	12	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				10.93 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	
					54.66 %
1	Penyediaan Permakanan	12	12	0	100.00 %
2	Penyediaan Sandang	407	382	25	93.86 %
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	57	36	21	63.16 %
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	50	1	49	2.00 %
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	7	1	6	14.29 %
	Jumlah	12,521	12,42	101	273.31

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM urusan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2022 tergambar dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 4. 27

Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
Kota Balikpapan				1,958,236,395	995,920,263	50.86 %
Program Rehabilitasi Sosial				1,958,236,395	995,920,263	50.86 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial			763,636,495	581,647,263	76.17 %
	1	Penyediaan Permakanan	Orang	470,999,00	323,661,942	68.72 %
	2	Penyediaan Sandang	Orang	159,999,820	129,620,199	81.01 %
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Orang	93,000,000	90,726,750	97.56 %
	12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen	39,637,675	37,638,372	94.96 %
Jumlah Indikator				763,636,495	581,647,263	76.17 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota			1,194,599,900	414,273,000	34.68 %

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	1	Penyediaan Makanan	Orang	588,000,000	414,273,000	70.45 %
	2	Penyediaan Sandang	Orang	306,600,000		0%
	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	200,000,000		0%
	4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	50,000,000		0%
	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	49,999,900		0%

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kota Balikpapan adalah Tahun 2022 adalah 21 orang sebagai berikut:

Tabel 4.28

Dukungan Personil SPM Urusan Sosial

No	Uraian	Dukungan Personil
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1
4	Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1
5	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	1
6	Subkoordinator Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Dan Lanjut Usia	1
7	Subkoordinator Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Tindak Kekerasan	1
8	Subkoordinator Perlindungan Korban Bencana	1
9	Perencana	1
10	Pekerja Sosial	6
11	Penyuluh Sosial	4
12	Administrasi Khusus	2

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kota Balikpapan berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih terbatas dan belum maksimal, data yang diolah sampai saat ini hanya sebatas data PMKS yang dilayani;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang representatif di Rumah Penampungan sementara dan gudang logistik yang dimiliki Dinas Sosial Kota Balikpapan sehingga pelayanan belum maksimal;
- c. Kurang tersedianya SDM yang memiliki kemampuan melakukan pendampingan terhadap PMKS, tenaga ahli untuk memberikan layanan dukungan psikososial korban bencana, serta petugas operasional di Rumah Penampungan sementara Dinas Sosial Kota Balikpapan;
- d. Adanya klien yang tidak punya keluarga / terlantar sehingga menjadi penghuni tetap di Rumah Penampungan Sementara.
- e. Kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan untuk mendirikan rumah penampungan yang memiliki standar pelayanan minimal maksimal selama 7 (tujuh) hari, sedangkan kapasitas panti sosial milik Pemerintah Provinsi sebagai layanan rujukan memiliki kapasitas daya tampung yang terbatas. Keterbatasan sumber dana untuk biaya pelayanan dan penanganan SPM.



BAB V

PENUTUP

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dalam rangka wujud pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap tugas pokok, kewenangan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan. Selain daripada itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya good governance.

Dalam Perspektif yang lebih luas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik yang selanjutnya akan disusun dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 yang akan dipublikasikan secara luas melalui website Pemerintah Kota Balikpapan, selain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan menginputan Sistem Informasi Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (E-LPPD) Tahun 2022 Kota Balikpapan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Terima kasih.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela.



LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

Lampiran 1
Indikator Kinerja Luaran

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	365	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	155	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	155	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1179	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1179	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang	508	Disdikbud Kota Balikpapan
		Memiliki ijazah diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		
		Jumlah kepala sekolah PAUD(Negeri dan Swasta)yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	0	Disdikbud Kota Balikpapan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	159	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah peserta didik SD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	71784	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah peserta didik jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	33998	Disdikbud Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
		Jumlah peserta didik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	52475	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah peserta didik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	22209	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	6018	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	2999	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	2943	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1369	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	647	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	429	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	316	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	207	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	1040	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	620	Disdikbud Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
		Jumlah kepala sekola pada jenjang SD Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	147	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kepala sekola pada jenjang SMP Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala	33	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	239	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	74	Disdikbud Kota Balikpapan
	Tingkat partisipasi warga negara Usia 13-15 tshun ysng berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah SD dan SMP Negeri Yang Terakreditasi	159	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah peserta didik SD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	71.784	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah peserta didik jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	33.998	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah peserta didik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	52.475	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah peserta didik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	22.209	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	6.018	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	2.999	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	2.943	Disdikbud Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
		Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1.369	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	647	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	429	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	316	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	207	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	1.040	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	620	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kepala sekola pada jenjang SD Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	147	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kepala sekola pada jenjang SMP Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala	33	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	239	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	74	Disdikbud Kota Balikpapan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum	Jumlah satuan pendidikan Kesetaraan terkakreditasi (Negeri dan Swasta)	13	Disdikbud Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
	menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima Perlengkapan dasar dari pemerintah daerah	1.972	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.972	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	811	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	146	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diploma IV (D IV) atau sarjana S.1	95	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang SD yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 Sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah kepala sekolah pada satuan kependidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1	16	Disdikbud Kota Balikpapan
KESEHATAN	Rasio Daya tampung Rumah sakit rujukan	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	14	Dinkes Kota Balikpapan
	Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Jumlah RS yang dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Dinkes Kota Balikpapan
	Presentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.017.550	Dinkes Kota Balikpapan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Antenatal	297	Dinkes Kota Balikpapan
	Presentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3.216	Dinkes Kota Balikpapan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	297	Dinkes Kota Balikpapan
Presentase Bayi baru lahir mendapatkan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	59.856	Dinkes Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	297	Dinkes Kota Balikpapan
	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	106.547	Dinkes Kota Balikpapan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	324	Dinkes Kota Balikpapan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	170.589	Dinkes Kota Balikpapan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar (7-15) sesuai standar	356	Dinkes Kota Balikpapan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	337.815	Dinkes Kota Balikpapan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	135	Dinkes Kota Balikpapan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	74.630	Dinkes Kota Balikpapan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	356	Dinkes Kota Balikpapan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	108	Dinkes Kota Balikpapan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	108	Dinkes Kota Balikpapan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17.398	Dinkes Kota Balikpapan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	135	Dinkes Kota Balikpapan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	135	Dinkes Kota Balikpapan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	54	Dinkes Kota Balikpapan
	Persentase orang terduga TBC	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	116.850	Dinkes Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
	mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		158	Dinkes Kota Balikpapan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		31.802	Dinkes Kota Balikpapan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		170	Dinkes Kota Balikpapan
PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kab/Kota (ha)		6.788	DPU Kota Balikpapan
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m)		184.460	DPU Kota Balikpapan
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/kota (ha)		458.42	DPU Kota Balikpapan
		Panjang pantai dikawasan permukiman yang rawan abrasi,erosi,akresi di WS kewenangan Kab/kota (m)		11618.31	DPU Kota Balikpapan
		Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD air WS kewenangan Kab/kota		N/A	DPU Kota Balikpapan
		Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD air kewenangan Kab/kota		Reviu Master Palan Drainase Kota Balikpapan Tahun 2022	DPU Kota Balikpapan
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota.		Panjang penahan abrasi 300 m ditanjung kelor, Panjang saluran drainase dalam kondidi baik 4.14.402 .808 m	DPU Kota Balikpapan
		Rasio luas Daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		Presentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)
		Panjang jaringan irigasi primer (m)		3397	DPU Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Presentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)	32.53	DPU Kota Balikpapan
			Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	3659	DPU Kota Balikpapan
		Presentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)	N/A	DPU Kota Balikpapan
			Panjang jaringan irigasi tersier (m)	N/A	DPU Kota Balikpapan
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kab/kota	Pemenuhan dokume RISPAM kab/kota		Dokumen disusun tahun 2021 tapi belum ditetapkan	DPU Kota Balikpapan
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kab/kota		N/A	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah BUMD dan atau UPTD kab/kota penyelenggaraan SPAM		PTMB Tirta Manuntung	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		N/A	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain		N/A	DPU Kota Balikpapan
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		90 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		269 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		359 Rumah terlayani	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		14.823 Rumah terlayani	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		14.823 Rumah terlayani	DPU Kota Balikpapan
Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		6.559 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan		
Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		286 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan		
Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		286 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan		

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T Akses aman		5.205 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		286 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		14823 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan	
		Kinerja penyediaan Prasarana pengangkutan lumpur tinja		14823 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		5.208 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan	
		Kinerja Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		14283 Rumah Terlayani	DPU Kota Balikpapan	
	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku		6	DPMPT Kota Balikpapan
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		125	DPMPT Kota Balikpapan	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Perda nomor 3 Tahun 2016	DPU Kota Balikpapan	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		SK Walikota Balikpapan No.188.45-414/2022	DPU Kota Balikpapan	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		N/A	DPU Kota Balikpapan	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		N/A	DPU Kota Balikpapan	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		273 gedung	DPU Kota Balikpapan	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		273 gedung	DPU Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	501.18 SK Wlikota 188.45-415/2016	DPU Kota Balikpapan
		Panjang jalan yang dibangun	Tidak ada pekerjaan pembangunan jalan	DPU Kota Balikpapan
		Panjang jembatan yg dibangun	Pekerjaan pembangunan jembatan	DPU Kota Balikpapan
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	179 jalan	DPU Kota Balikpapan
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	3 jembatan	DPU Kota Balikpapan
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	223 jalan	DPU Kota Balikpapan
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	Pekerjaan Rehabilitasi jembatan	DPU Kota Balikpapan
		Panjang jalan yang dipelihara	35 jalan	DPU Kota Balikpapan
		Panjang jembatan yang dipelihara	N/A	DPU Kota Balikpapan
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	660	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	112	DPU Kota Balikpapan
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	ADA	DPU Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	ADA	DPU Kota Balikpapan
Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		TIDAK ADA	DPU Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	TIDAK ADA	DPU Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	TIDAK ADA	DPU Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah	ADA tanggal pelaksanaan 4-6 desember 2022 di hotel grand Tjokro, Balikpapan	DPU Kota Balikpapan
		Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada Sertifikasi Tenaga Ahli dan sertifikasi tenaga terampil	DPU Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada Sertifikasi Tenaga Ahli dan sertifikasi tenaga terampil	DPU Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Sosialisasi UU Perizinan Berbasis Resiko di hotel Grand Tjokro peserta 75 Badan Usaha	DPU Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	N/A	DPU Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	75 Badan Usaha	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah pengawasan terkait	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	N/A	DPU Kota Balikpapan
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	N/A	DPU Kota Balikpapan
		PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
Jumlah rumah yang terkena bencana alam	206 Unit			Disperkim Kota Balikpapan
Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	114 RT, 206 KK 223 Jiwa			Disperkim Kota Balikpapan
Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak terdapat kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana			Disperkim Kota Balikpapan
Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak terdapat kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana			Disperkim Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak terdapat kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	9 lokasi Rusunawa	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	N/A	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	8 Lokasi	Disperkim Kota Balikpapan
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	N/A	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	N/A tidak ada kegiatan fasilitasi ganti hak atas tanah berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan	3 KK Kelurahan Baru Ulu,	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	N/A tidak ada kegiatan Rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	74 KK tersebar di 23 Kelurahan	Disperkim Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	N/A tidak terdapat kegiatan pengadaan tanah relokasi tahun 2022	Disperkim Kota Balikpapan	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	26.11	Disperkim Kota Balikpapan	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	70	Disperkim Kota Balikpapan	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	12.82 Ha	Disperkim Kota Balikpapan	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah rumah di kab/kota	202.539 Unit	Disperkim Kota Balikpapan	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	70	Disperkim Kota Balikpapan	
		Jumlah rumah tidak layak huni	517 data hasil survey disperkim TA 2021	Disperkim Kota Balikpapan	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	N/A	Disperkim Kota Balikpapan	
		Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	243.852 KK	Disperkim Kota Balikpapan
			Jumlah Total Unit rumah	202.539 Unit	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah rumah pembangunan baru	251 Unit	Disperkim Kota Balikpapan	
	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	251 unit			

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	115.049 sambungan	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	202.539	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	N/A	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	37 Perumahan	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	202.539	Disperkim Kota Balikpapan
		Umlah pengembang yang tersertifikasi	N/A	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	N/A	Disperkim Kota Balikpapan
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	51 Pengembang	Disperkim Kota Balikpapan
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	3780	SATPOL PP Kota Balikpapan
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	132	SATPOL PP Kota Balikpapan
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	37	SATPOL PP Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		4	SATPOL PP Kota Balikpapan
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		6	SATPOL PP Kota Balikpapan
		Tersedianya sarana prasarana minimal		469	SATPOL PP Kota Balikpapan
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/lega	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100%	BPBD Kota Balikpapan
			Jumlah satuan dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	1 dokumen KRB	BPBD Kota Balikpapan
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk dikawasan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	688	BPBD Kota Balikpapan
			Seluruh penduduk dikawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0%	BPBD Kota Balikpapan
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	DILAKSANAKAN TAHUN 2023	BPBD Kota Balikpapan
			Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		BPBD Kota Balikpapan
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	TAHUN 2017	BPBD Kota Balikpapan
			Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan	2	BPBD Kota Balikpapan
		Persentase jumlah aparatur dan warga	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	3516	BPBD Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
		negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparaturnya dengan warga negara dikawasan rawan bencana	5000	BPBD Kota Balikpapan	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	3516	BPBD Kota Balikpapan	
			Jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	5000	BPBD Kota Balikpapan	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	611	BPBD Kota Balikpapan	
			Jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	5000	BPBD Kota Balikpapan	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	611	BPBD Kota Balikpapan	
			Jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	5000	BPBD Kota Balikpapan	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	0	BPBD Kota Balikpapan
				Jumlah seluruh penetapan status KLB	0	BPBD Kota Balikpapan
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	0	BPBD Kota Balikpapan
	Jumlah seluruh penetapan status darurat			0	BPBD Kota Balikpapan	
	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	0	BPBD Kota Balikpapan	
			Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	0	BPBD Kota Balikpapan	
	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong		Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	0	BPBD Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
	Presentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	0	BPBD Kota Balikpapan
		Jumlah dan jenis layanan		12	BPBD Kota Balikpapan
		Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			
		Tersedianya pos sektor damkar yang		8	BPBD Kota Balikpapan
		Dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			
		Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) dikantor kecamatan		6	BPBD Kota Balikpapan
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		8	BPBD Kota Balikpapan
		Jumlah dan jenis sarana prasarana		50	BPBD Kota Balikpapan
		Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		300	BPBD Kota Balikpapan
		Jumlah relawan kebakaran di bawah		106	BPBD Kota Balikpapan
		Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			
		Jumlah peningkatan kapasitas		300	BPBD Kota Balikpapan
		Aparatur pemadam kebakaran			
SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		269 Layanan	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		996	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		87	Dinas Sosial Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data	
	di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1236	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Lanjut usia	240	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Penyandang Disabilitas Terlantar	206	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Anak terlantar	27	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	RPSA	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			RPLUT	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Asrama Penyandang Disabilitas	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) PMKS	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	PMKS Anak	26	Dinas Sosial Kota Balikpapan
Lanjut usia dan gepeng	181		Dinas Sosial Kota Balikpapan		

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
			Penyandang Disabilitas	5	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	PMKS Anak	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Lanjut usia	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Penyandang Disabilitas	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Gepeng	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			RPSA	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) PMKS	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Asrama Penyandang Disabilitas	2	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	RPSA	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			RPLUT	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Asrama Penyandang Disabilitas	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
			Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) PMKS	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		PMKS Anak	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Lanjut usia	6	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Penyandang Disabilitas	2	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			PMKS Tuna Sosial	1	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		0
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		40	Dinas Sosial Kota Balikpapan
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		PMKS Anak	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Lanjut usia terlantar	45	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Penyandang Disabilitas	3	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			Gepeng	22	Dinas Sosial Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	216	Dinas Sosial Kota Balikpapan
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	PMKS Anak	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Lanjut usia terlantar	3	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Penyandang Disabilitas	4	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		PMKS Tuna Sosial	3	Dinas Sosial Kota Balikpapan
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	PMKS Anak	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Lanjut usia terlantar	45	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Penyandang Disabilitas	175	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		PMKS Tuna Sosial	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	PMKS Anak	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Lanjut usia terlantar	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
		Penyandang Disabilitas	45	Dinas Sosial Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anakterlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		PMKS Tuna Sosial	22	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
			PMKS Anak	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
			Lanjut usia terlantar	5	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
			Penyandang Disabilitas	8	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
			PMKS Tuna Sosial gepeng	3	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		PMKS Anak	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan
				Lanjut usia terlantar	9	Dinas Sosial Kota Balikpapan
				Penyandang Disabilitas	174	Dinas Sosial Kota Balikpapan
			PMKS Tuna Sosial	0	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		469	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		469	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		469	Dinas Sosial Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		469	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		469	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		40	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota		Ada dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kota	Disnaker Kota Balikpapan	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi indikator	6	Disnaker Kota Balikpapan	
			Target indikator realisasi	6	Disnaker Kota Balikpapan	
			Realisasi	6	Disnaker Kota Balikpapan	
	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		40	Disnaker Kota Balikpapan		
	Persentase tenaga kerja berertifikat kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PKB kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahunnya (n)		6	Disnaker Kota Balikpapan
			Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun (n)		5	Disnaker Kota Balikpapan
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2022		130	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2022		136	Disnaker Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2022	14	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2022	82	Disnaker Kota Balikpapan
		Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2022	12	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah seluruh LPK pada tahun 2022	55	Disnaker Kota Balikpapan
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2022	57	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah LPK yang terdata pada tahun 2022	57	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah penganggur yang dilatih		82	Disnaker Kota Balikpapan
		Sudah cukup jelas			
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pada tahun 2022	82	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah orang yang dilatih pada tahun 2022	82	Disnaker Kota Balikpapan
		Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2022	53	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah lulusan pada tahun 2022	82	Disnaker Kota Balikpapan
		Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan berseertifikat kompetensi pada tahun 2022	12	Disnaker Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
			Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2022	70	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih	N/A	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah CPMI Terdaftar	N/A	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	N/A	Disnaker Kota Balikpapan	
	Tingkat produktifitas tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas pada tahun 2022	69	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah perusahaan pada tahun 2022	69	Disnaker Kota Balikpapan
		Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi	N/A	Disnaker Kota Balikpapan
			Pertumbuhan modal	N/A	Disnaker Kota Balikpapan
			Pertumbuhan tenaga kerja	N/A	Disnaker Kota Balikpapan
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2022	57 perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	159 Perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan
		Persentase perusahaan yang telah memiliki	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2022	159 Perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	153 Perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		162 Perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	32 Perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP/PKB)	57 Perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	67 Perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	5688 Perusahaan	Kewenangan disnakertrans provinsi
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	39 Perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah perusahaan pada tahun 2022	67 Perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah mogok kerja		46	PT. OSSIANA SAKTU EKAMAJU
		Jumlah penutupan perusahaan		N/A	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah perselisihan kepentingan		2 Perusahaan	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		N/A	Disnaker Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data	
		Jumlah perselisihan PHK	37	Disnaker Kota Balikpapan	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	154	Disnaker Kota Balikpapan	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	29	Disnaker Kota Balikpapan	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	Disnaker Kota Balikpapan	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama	29	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah kasus perselisihan	39	Disnaker Kota Balikpapan
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	197	Disnaker Kota Balikpapan
			Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3743	Disnaker Kota Balikpapan
	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		27	Disnaker Kota Balikpapan	
	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		Belum ada tenaga kerja khusus terdaftar di disnaker Kota Balikpapan	Disnaker Kota Balikpapan	
	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		8	Disnaker Kota Balikpapan	
	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		Belum ada perusahaan yang	Disnaker Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
			membuat ijin LPTKS	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	174	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Belum menggunakan aplikasi Siap Kerja	Disnaker Kota Balikpapan
	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	Kegiatan sosialisasi CPMI/CTKI belum dilaksanakan	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah CPMI	8	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah CTKI	Tidak ada	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Disnaker Kota Balikpapan
	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah faslitas yang dipulangkan	Belum ada PMI yang difasilitasi kepulangannya karena belum ada yang lapor	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah PMI yang pulang	Belum ada perusahaan pekerja migran	Disnaker Kota Balikpapan
	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah PMI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	N/A	Disnaker Kota Balikpapan
		Jumlah TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	N/A	Disnaker Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
			Jumlah PMI	N/A	Disnaker Kota Balikpapan	
			Jumlah TKI	N/A	Disnaker Kota Balikpapan	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	N/A	Disnaker Kota Balikpapan	
			Jumlah PMI atau TKI purna dan keluarganya	N/A	Disnaker Kota Balikpapan	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		1	Disnaker Kota Balikpapan	
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		36		
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		67	DP3AKB Kota Balikpapan	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		2	DP3AKB Kota Balikpapan	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		9	DP3AKB Kota Balikpapan	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani		60	DP3AKB Kota Balikpapan
			Jumlah korban kekerasan anak ditingkat kota		60	DP3AKB Kota Balikpapan
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		10	DP3AKB Kota Balikpapan	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		5	DP3AKB Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPI (per 10.000 penduduk perempuan)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	60 UPPKA	DP3AKB Kota Balikpapan
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	100	DP3AKB Kota Balikpapan
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 Himpunan Wanita Karya 97 orang	DP3AKB Kota Balikpapan
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	43	DP3AKB Kota Balikpapan
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3	DP3AKB Kota Balikpapan
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	DP3AKB Kota Balikpapan
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	74
Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	74		DP3AKB Kota Balikpapan	
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Belum ada insfrakstruktur penyimpanan CPPD	DP3 Kota Balikpapan
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Belum ada perda tentang penyelenggaraan cadangan pangan	DP3 Kota Balikpapan
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Belum asda regulasi	DP3 Kota Balikpapan
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Sosialisasi pangan lokal	DP3 Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
				(B2SA) lomba (B2SA)	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		Ada dalam bentuk Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA Tahun 2022)	DP3 Kota Balikpapan
		Tertanganinya kerawanan pangan		Tidak	DP3 Kota Balikpapan
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		Tidak tersalurkan	DP3 Kota Balikpapan
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		Ada (Uji sampel PSAT) sosialisasi Keamanan Pangan	DP3 Kota Balikpapan
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan		DPMPT Kota Balikpapan
			Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)		DPMPT Kota Balikpapan
			Jumlah permohonan izin lokasi dalam satu tahun		DPMPT Kota Balikpapan
		SK Bupati/W ali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	N/A karena kegiatan ladreform /reformas agraria belum dilaksanakan di kota Balikpapan	DPMPT Kota Balikpapan
		Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	N/A karena kegiatan ladreform /reformas agraria belum	DPMPT Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
				dilaksanakan di kota balikpapan	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum absentee	N/A	DPPR Kota Balikpapan
			Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	N/A	DPPR Kota Balikpapan
		Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui	218	DPPR Kota Balikpapan
			Jumlah izin membuka tanah yang ditolak	0	DPPR Kota Balikpapan
			Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	218	DPPR Kota Balikpapan
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	1	DPPR Kota Balikpapan
			Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	1	DPPR Kota Balikpapan
LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	A. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)		50	DLH Kota Balikpapan
		B. Indeks tutupan hutan (ITH)		84,29	DLH Kota Balikpapan
		C. Indeks Tutupan Hutan (ITH)		50,32	DLH Kota Balikpapan
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah		0.238641958	DLH Kota Balikpapan
		2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah		1.871.014.222	DLH Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
		3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan		0.25	DLH Kota Balikpapan	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kot	Izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemkot	72	DLH Kota Balikpapan	
			Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kota	16	DLH Kota Balikpapan	
			Izin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kota	12	DLH Kota Balikpapan	
			Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	100	DLH Kota Balikpapan	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada	12	DLH Kota Balikpapan	
			Jumlah izin kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan diterbitkan oleh PEMDA kota	16	DLH Kota Balikpapan	
			Izin PPLH yang izin lingkungan diterbitkan oleh PEMDA kota	72	DLH Kota Balikpapan	
			Jumlah PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA kota	100	DLH Kota Balikpapan	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di	Jumlah MHA yang diakui			DLH Kota Balikpapan
		Daerah kabupaten/ kota				
		Masyarakat	Jumlah usulan MHA			DLH Kota Balikpapan
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA Yang mendapatkan pelatihan			DLH Kota Balikpapan
			Jumlah MHA yang ada			DLH Kota Balikpapan
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana			DLH Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat		DLH Kota Balikpapan
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan msyarakat yangditangani	38	DLH Kota Balikpapan
			Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	38	DLH Kota Balikpapan
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kependudukan dan catatn sipil	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah Akta perkawinan yang di terbitkan	412	Disdukcapil Kota Balikpapan
			Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	412	Disdukcapil Kota Balikpapan
		Penerbitan akta Perceraian	Jumlah Akta Perceraian yang di terbitkan	54	Disdukcapil Kota Balikpapan
			Peristiwa perceraian yang dilaporkan	54	Disdukcapil Kota Balikpapan
		Penerbitan akta Kematian	Jumlah Akta Kematian yang di terbitkan	4842	Disdukcapil Kota Balikpapan
			Peristiwa Kematian yang dilaporkan	4842	Disdukcapil Kota Balikpapan
		Penyajian data kependudukan	Jumlah Penyajian data kependudukan Sekala Kota dalam 1 tahun	3	Disdukcapil Kota Balikpapan
			2 tahun	3	Disdukcapil Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Tidak Ada Desa Mandiri Dikota Balikpapan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tidak Ada Desa Mandiri Dikota Balikpapan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Tidak Ada Desa Mandiri Dikota Balikpapan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada Desa Mandiri Dikota Balikpapan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Tidak Ada Desa Mandiri Dikota Balikpapan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tidak Ada Desa Mandiri Dikota Balikpapan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Tidak Ada Desa Mandiri Dikota Balikpapan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada Desa Mandiri Dikota Balikpapan	Bagian Pemerintahan Sekretariat

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data	
				Daerah Kota Balikpapan	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	GDPK Kota Balikpapan Tahun 2015	DP3AKB Kota Balikpapan	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Jumlah perempuan Usia 25-49 Tahun yang sudah menikah	N/A	DP3AKB Kota Balikpapan
			Jumlah perempuan usia 25-49 tahun	N/A	DP3AKB Kota Balikpapan
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 1519)	Angka kelahiran kelompok usia 15-19 tahun	N/A	DP3AKB Kota Balikpapan
			Jumlah penduduk perempuan usia 15-19 tahun	N/A	DP3AKB Kota Balikpapan
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK(avokasi dan KIE)	3400	DP3AKB Kota Balikpapan
			Jumlah sasaran masyarakat program (KKBPK dan KIE)	3830	DP3AKB Kota Balikpapan
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	TP PKK, Persit Kartika Candra Kirana, DWP Kota Balikpapan, IBI, IDI/ POGI Cabang PERSAGI, OPD terkait(Bapedda, Kecamatan, Kelurahan, Dinas Kesehatan, Kominfo)	DP3AKB Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mcpr)	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	68	DP3AKB Kota Balikpapan
			Jumlah faskes	68	DP3AKB Kota Balikpapan
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif	52731	DP3AKB Kota Balikpapan
			Jumlah PUS	90589	DP3AKB Kota Balikpapan
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPk yang efektif	34	DP3AKB Kota Balikpapan
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi caramodern	3323	DP3AKB Kota Balikpapan
	Jumlah sasaran peserta KB pasca peralihan		68	DP3AKB Kota Balikpapan	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		52,12%	DP3AKB Kota Balikpapan
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	39096	DP3AKB Kota Balikpapan
			Jumlah keluarga PBI	76791	DP3AKB Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
URUSAN PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia	2	Dishub Kota Balikpapan
		Jumlah fasilitas penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan		10	Dishub Kota Balikpapan
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji pertahun	14342	Dishub Kota Balikpapan
			Jumlah kendaraan wajib uji	22377	Dishub Kota Balikpapan
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penerapan tarif lintas penyeberangan	10	Dishub Kota Balikpapan
			Jumlah lintas penyeberangan dalam kota	11	Dishub Kota Balikpapan
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kota	2538	Dishub Kota Balikpapan
			Target kebutuhan perlengkapan jalan kota	15643	Dishub Kota Balikpapan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang salin terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	34	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah perangkat daerah	34	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh dinas kominfo	34	Diskominfo Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
		yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah	34	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		N/A	Diskominfo Kota Balikpapan	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah kegiatan event perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi [enyelenggara negara sesuai dengan PM kominfo No.5/2015			N/A	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai dengan standar		91	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah perangkat daerah		34	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		34	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah perangkat daerah		34	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan Publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		117	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah layanan		117	Diskominfo Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan SPBE (layanan Publik dan layanan adminitrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat eletronik	33	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah layanan	33	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sisitem eletronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	105	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah sistem eletronik	105	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dngan sitem penghubung layanan pemerintah	7	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah layana publik dan layanan adminstrasi	7	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat dan pemerintah	34	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah perangkat daerah	34	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data dipusat	34	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah perangkat daerah	34	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	34	Diskominfo Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
		sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah	34	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	57	Diskominfo Kota Balikpapan	
			Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	57	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	7	Diskominfo Kota Balikpapan	
			Jumlah perangkat daerah	34	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengeola TIK yang tersrtifikasi kompetensi dibawah pengolaan dinas kominfo	0	Diskominfo Kota Balikpapan	
			Jumlah ASN pengeola TIK	0	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	1. Dokumen Master	3	Diskominfo Kota Balikpapan	
			2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK	3	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah komunitas masyarakat atau mitras strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dab kebijakan pemerintah	1	Diskominfo Kota Balikpapan
				Komunitas masyarakat atau itra komunikasi pemerintah provinsi	1	Diskominfo Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	852	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	852	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP	0 belum dilaksanakan penyusunan strategi komunikasi	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik		
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Jumlah Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam Koperasi pada tahun yang di laporkan	0	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Usaha Simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	0	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor Kas Usaha Simpan Pinjam pada tahun yang dilaporkan	1	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam pada Tahun yang dilaporkan.	0	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi	87	DKUMKMP Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah Koperasi yang ada	582	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatannya	12	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Ada	25	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Koperasi yang ada	582	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian	125	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Anggota Koperasi yang ada	18820	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	1	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Koperasi yang Ada	582	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak perlu diisi	0	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah di terbitkan sertifikat NIK	7	DKUMKMP Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
		(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang ada	582	DKUMKMP Kota Balikpapan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pembiayaan	0	DKUMKMP Kota Balikpapan	
			Jumlah Koperasi yang ada	582	DKUMKMP Kota Balikpapan	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang di berikan dukungan Fasilitas Pemasaran	3	DKUMKMP Kota Balikpapan	
			Jumlah Koperasi yang ada	582	DKUMKMP Kota Balikpapan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	80	DKUMKMP Kota Balikpapan	
			Jumlah Koperasi yang ada	582	DKUMKMP Kota Balikpapan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	6	DKUMKMP Kota Balikpapan	
			Jumlah koperasi yang ada	582	DKUMKMP Kota Balikpapan	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru	8570	DKUMKMP Kota Balikpapan
				Jumlah Wirausaha yang ada	55624	DKUMKMP Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah Usaha Mikro yang diinput ke dalam sistem data Online (ODS)	59535	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Usaha Mikro yang ada	60959	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	31	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Usaha Mikro Yang ada	60959	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	414	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Usaha mikro yang belum memiliki standar	60933	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	205	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Usaha Mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	60742	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	296	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah Usaha Mikro yang ada	60959	DKUMKMP Kota Balikpapan
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah Usaha Mikro yang di berikan pendampingan kelembagaan dan usaha	30	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah usaha mikro yang ada	60959	DKUMKMP Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		18	DPMPT Kota Balikpapan
	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Proses pengesahan oleh DPRD	DPMPT Kota Balikpapan
	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Proses pengesahan oleh DPRD	DPMPT Kota Balikpapan
	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	2	DPMPT Kota Balikpapan
	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	3	DPMPT Kota Balikpapan
	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	3	DPMPT Kota Balikpapan
	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	7785	DPMPT Kota Balikpapan
	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	5262	DPMPT Kota Balikpapan
	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	9.945.095.111.500	DPMPT Kota Balikpapan
	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	16	DPMPT Kota Balikpapan
	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	388	DPMPT Kota Balikpapan
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	22	DPMPT Kota Balikpapan
IDIKATOR KUNCI URUSAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	285	DPOP Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG	kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	DPOP Kota Balikpapan	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	87	DPOP Kota Balikpapan	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	25	DPOP Kota Balikpapan	
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan ² pendidikan	26	DPOP Kota Balikpapan	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	7	DPOP Kota Balikpapan	
INDIKATOR KUNCI URUSAN STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daera	Tersedianya buku profil daerah	Buku Balikpapan dalam angka tahun 2022	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	7	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	38	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	21	Diskominfo Kota Balikpapan	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metode kegiatan statistik sektoral	22	Diskominfo Kota Balikpapan
			Jumlah kegiatan statistik sektoral	45	Diskominfo Kota Balikpapan
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	7	Diskominfo Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data		
			Jumlah indikator statistik sektoral	45	Diskominfo Kota Balikpapan		
PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	0	Diskominfo Kota Balikpapan		
			Jumlah kegiatan strategis yang ada	0	Diskominfo Kota Balikpapan		
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat eletronik atau aplikasi penyandian	33	Diskominfo Kota Balikpapan		
			Jumlah SE yang ada	117	Diskominfo Kota Balikpapan		
		Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jmlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dngan resiko kategori rendah	20	Diskominfo Kota Balikpapan		
			Jumlah SE yang ada	117	Diskominfo Kota Balikpapan		
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan	0	Diskominfo Kota Balikpapan		
			Jumlah titik pada HKS	0	Diskominfo Kota Balikpapan		
		INDIKATOR KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi,	Jumlah objek PK yang diinventaris	174	Disdikbud Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		pengamanan pemeliharaan,	Jumlah objek PK yang diamankan	22	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah objek PK yang dipelihara	7	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah objek PK yang diselamatkan	7	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah objek PK yang dipublikasikan	62	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK disebarluaskan	62	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah objek PK dikaji	0	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah objek PK dikayakan keberagamannya	0	Disdikbud Kota Balikpapan
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	64	Disdikbud Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi	0	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah sdm disertifikasi	4	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah lembaga distandarisasi	8	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola	50	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0	Disdikbud Kota Balikpapan
	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan	147	Disdikbud Kota Balikpapan	
		Jumlah CB dihapuskan	18	Disdikbud Kota Balikpapan	
	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB diselamatkan	1	Disdikbud Kota Balikpapan	
		Jumlah CB diamankan	101	Disdikbud Kota Balikpapan	
		Jumlah CB dizonasi	0	Disdikbud Kota Balikpapan	
		Jumlah CB dipelihara	0	Disdikbud Kota Balikpapan	
		Jumlah CB dipugar	51	Disdikbud Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	Disdikbud Kota Balikpapan
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB diteliti	5	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah CB direvitalisasi	3	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah CB diadaptasi	0	Disdikbud Kota Balikpapan
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	10	Disdikbud Kota Balikpapan
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum dikelola	2	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah koleksi museum diamankan	0	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah koleksi museum dikembangkan	0	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah koleksi museum dimanfaatkan	0	Disdikbud Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0	Disdikbud Kota Balikpapan
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	Disdikbud Kota Balikpapan
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	1	Disdikbud Kota Balikpapan
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	10	Disdikbud Kota Balikpapan
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	10	Disdikbud Kota Balikpapan
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB	25	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah sdm Museum	0	Disdikbud Kota Balikpapan
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya CB	10	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya Museum	10	Disdikbud Kota Balikpapan
			Jumlah sarana dan prasarana CB	10	Disdikbud Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana Museum	3	Disdikbud Kota Balikpapan
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Disdikbud Kota Balikpapan
INDIKATOR KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan diwilayahnya (dalam eksamplar)	4,36	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	58,533	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan diberbagai perpustakaan diwilayahnya	0,003087	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan esuai standar nasional perpustakaan	28%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	8923	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		154	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
INDIKATOR KUNCI URUSAN KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan -	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang dibuatkan daftar arsip	1290	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
			Jumlah seluruh arsip aktif	1290	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	61	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
			Jumlah seluruh arsip inaktif	124	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
			Jumlah seluruh arsipstatis	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	10	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
					Kota Balikpapan
			Jumlah seluruh arsip dinamis	54	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
			Jumlah arsip statis pemerintah kota	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Belum dilaksanakan NSPK Pemusnahan arsip merujuk pada peraturan kepala ANRI 25/2012 Tentang pedoman pemusnahan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		NSPK Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK merujuk pada peraturan kepala ANRI 23/2015 Tentang Perlindungan dan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)	Isian Data	Sumber data
			penyelamatan arsip dari bencana	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK Penyelamatan arsip penggabungan atau pembubaran perangkat daerah merujuk pada peraturan kepala ANRI 46/2015 tentang penyelamatan arsip Penyelamatan arsip penggabungan atau pembubaran lembaga negara atau perangkat daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK Autentifikasi arsip statis Merujuk pada peraturan ANRI 20/2022 Tentang pedoman	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
				Autentifikasi arsip eletronik	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan		NSPK Pencarian arsip statis merujuk paa peraturan kepala ANRI 18/2012 Tentang pedoman pembuatan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA)	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Kota Balikpapan
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		NSPK Perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada peraturan kepala ANRI 28/2011 Tengan pedoman akses dan layanan arsip statis	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Kota Balikpapan
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	N/A	DP3 Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	2	DP3 Kota Balikpapan
			Jumlah seluruh TPI yang ada diwilayah kota	2	DP3 Kota Balikpapan
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	N/A	DP3 Kota Balikpapan
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	N/A	DP3 Kota Balikpapan
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahu	180 orang	DP3 Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
INDIKATOR KUNCI URUSAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	68	DPOP Kota Balikpapan
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	28	DPOP Kota Balikpapan
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub	303	DPOP Kota Balikpapan
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		11704	DPOP Kota Balikpapan
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri yang terlaksana di dalam negeri		11	DPOP Kota Balikpapan
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota		0	DPOP Kota Balikpapan
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	11	DPOP Kota Balikpapan
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	100	DPOP Kota Balikpapan
			Jumlah tenaga kerja pariwisata	1212	DPOP Kota Balikpapan
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	168	DPOP Kota Balikpapan
			Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	150	DPOP Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	73	DPOP Kota Balikpapan	
INDIKATOR KINERJA URUSAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Power Thresher multiguna	DP3 Kota Balikpapan	
		Prasaran pertanian yang digunakan		N/A	DP3 Kota Balikpapan	
		Jumlah prasarana pertanian yang digunakan				
		Penerbitan izin usaha pertanian		N/A	DP3 Kota Balikpapan	
		Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian				
		Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan		N/A	DP3 Kota Balikpapan
			Jumlah prasarana yang dibangun		N/A	DP3 Kota Balikpapan
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usaha yang difasilitasi		N/A	DP3 Kota Balikpapan
			Jumlah usulan usaha pertanian			DP3 Kota Balikpapan
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi		
Luas area terkena bencana					DP3 Kota Balikpapan	
URUSAN KEHUTANAN	KEHUTANAN	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	TIDAK ADA TAHURA DUKOTA BALIKPAPAN	DLH Kota Balikpapan	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	TIDAK ADA TAHURA DUKOTA BALIKPAPAN	DLH Kota Balikpapan	

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	TIDAK ADA TAHURA DUKOTA BALIKPAPAN	DLH Kota Balikpapan
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	TIDAK ADA TAHURA DUKOTA BALIKPAPAN	DLH Kota Balikpapan
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Kota Balikpapan tidak memiliki sumber ESDM	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
		1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota			
PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			Disdag Kota Balikpapan
		A. Pusat perbelanjaan	Jumah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan kurang dari 5 hari kerja	Tidak melaksanakan penerbitan izin karena merupakan kewenangan DPMPT	Disdag Kota Balikpapan
			Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	Tidak melaksanakan penerbitan izin karena merupakan kewenangan DPMPT	Disdag Kota Balikpapan
B. Toko swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang ditebitkan kurang dari 5 hari kerja	Tidak melaksanakan penerbitan izin karena	Disdag Kota Balikpapan		

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
				merupakan kewenangan DPMPT	
			Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	Tidak melaksanakan penerbitan izin karena merupakan kewenangan DPMPT	Disdag Kota Balikpapan
		Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG kurang dri 5hari kerja	Tidak melaksanakan penerbitan izin karena merupakan kewenangan DPMPT	Disdag Kota Balikpapan
			Jumlah permohonan penerbitan TDG	Tidak melaksanakan penerbitan izin karena merupakan kewenangan DPMPT	Disdag Kota Balikpapan
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	Tidak melaksanakan penerbitan izin karena merupakan kewenangan DPMPT	Disdag Kota Balikpapan
			Jumlah gudang yang ada dikota	Tidak melaksanakan penerbitan izin karena merupakan kewenangan DPMPT	Disdag Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :			Tidak melaksanakan penerbitan izin karena merupakan kewenangan DPMP
		A. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah SPTW untuk penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit kurang dari 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara legkap dan benar	N/A	Disdag Kota Balikpapan
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	N/A	Disdag Kota Balikpapan
		B. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah SPTW untuk penerima lanjutan Waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit kurang dari 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara legkap dan benar	N/A	Disdag Kota Balikpapan
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	N/A	Disdag Kota Balikpapan
		C. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah SPTW untuk penerima lanjutan Waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit kurang dari 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara legkap dan benar	N/A	Disdag Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data	
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	N/A	Disdag Kota Balikpapan	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bhan berbahaya dan pengawasan distrubusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat kota	N/A	Disdag Kota Balikpapan	
			Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	N/A	Disdag Kota Balikpapan	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit kecil dari 1 hari kerja (1x24 jam)	345	Disdag Kota Balikpapan	
			Jumlah permohonan penertiban skayang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	345	Disdag Kota Balikpapan	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	70.83	Disdag Kota Balikpapan	
			A = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)	0.025	Disdag Kota Balikpapan	
			B = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	0.46	Disdag Kota Balikpapan	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan poko		Disdag Kota Balikpapan	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	13	Disdag Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
			A = Jumlah pupuk yang disalurkan	13	Disdag Kota Balikpapan
			B = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)	0.9	Disdag Kota Balikpapan
			C = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	6.325.086	Disdag Kota Balikpapan
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang tahun berjalan	4500	Disdag Kota Balikpapan
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota	3103	Disdag Kota Balikpapan
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	N/A	Disdag Kota Balikpapan
			Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	N/A	Disdag Kota Balikpapan
	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0	DKUMKMP Kota Balikpapan
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK -		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK	50% naskah akademik dan draft raperda telah tersusun	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Tahapan :		DKUMKMP Kota Balikpapan
			A) Tersusunnya naskah akademik (30%)		DKUMKMP Kota Balikpapan
			B) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)		DKUMKMP Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
			C) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)		DKUMKMP Kota Balikpapan
			D) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)		DKUMKMP Kota Balikpapan
			E) Penetapan Perda RPIK (10%)		DKUMKMP Kota Balikpapan
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	51	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	42	DKUMKMP Kota Balikpapan
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		DKUMKMP Kota Balikpapan
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam sinas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaankawasan industri di Kab Kota siinas	22	DKUMKMP Kota Balikpapan
			Total poulasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaaan kawaan industri di kota	954	DKUMKMP Kota Balikpapan

Urusan	IKK outcome	Indikator Kinerja Kunci (Luaran)		Isian Data	Sumber data
		perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota			
INDIKATOR KINERJA KUNCI TRANSMIGRASI		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		Kota Balikpapan tidak memiliki trasnmigrasi	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Kota Balikpapan tidak memiliki trasnmigrasi	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina		Kota Balikpapan tidak memiliki trasnmigrasi	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-101/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH,
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, perlu membentuk tim penyusun LPPD, LKPj dan RLPPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun LPPD, LKPj, dan RLPPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun LPPD, LKPj, dan RLPPD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
- Tim Pembina;
 - Tim Penyusun Kota;
 - Tim Penyusun Perangkat Daerah; dan
 - Tim Reviu.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, mempunyai tugas:
- menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD;
 - melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan perangkat daerah dalam penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD; dan
 - melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan perangkat daerah dalam menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas LPPD dan rekomendasi DPRD atas LKPj Kepala Daerah Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Tim Kota sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas:
- membuat perencanaan kegiatan penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD setiap tahun anggaran;
 - menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi/teknis yang diperlukan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal lainnya;
 - mengonsolidasikan elemen data kinerja masing-masing perangkat daerah sesuai dengan elemen data indikator kinerja kunci yang diminta dalam LPPD;
 - melaksanakan koordinasi kegiatan penghimpunan bahan penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD dari seluruh perangkat daerah penyelenggara urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum, realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sesuai materi LPPD, termasuk dengan instansi vertikal terkait;
 - melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi data laporan penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum, realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penerapan

dan pencapaian standar pelayanan minimal dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dari masing-masing perangkat daerah;

- f. melakukan penyusunan data capaian kinerja yang meliputi:
 1. penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum;
 2. realisasi urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum;
 3. tugas pembantuan;
 4. tugas umum pemerintahan;
 5. penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal; dan
 6. akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
 - g. melakukan penyusunan materi LPPD berpedoman pada format dan sistematika laporan LPPD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunannya;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Tim Reviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas dokumen LPPD.
 - i. melakukan finalisasi dokumen LPPD berdasarkan hasil reviu oleh Tim Reviu yang telah diselesaikan dan menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur;
 - j. memberikan penjelasan akuntabilitas dan transparansi materi LPPD kepada semua pihak yang memerlukan penjelasan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota terkait perencanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD Kota Balikpapan.
- KELIMA : Tim Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan buku LPPD kepada Pemerintah Pusat dan Buku LKPj Kepala Daerah kepada DPRD Kota Balikpapan;
 - b. menyiapkan dokumen/data penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum, realisasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang telah dilaksanakan perangkat daerah;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan elemen data keuangan dan capaian kinerja berikut dokumen/data pendukung indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan format/blangko daftar isian dan indikator kinerja kunci LPPD dari masing-masing perangkat daerah;
 - d. memberikan penjelasan akuntabilitas dan transparansi dokumen/data sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal diperlukan sinkronisasi dan verifikasi dokumen/data oleh Tim Penyusun Kota, Tim Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Evaluasi LPPD tingkat kota.

- KEENAM** : Tim Reviu sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam bentuk Reviu yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD; dan
 - c. memberikan hasil reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah Inspektorat dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Februari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 188.45-101/2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAH DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN
 RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
 DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA
 DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. UNSUR TIM PEMBINA:		
1	Wali Kota Balikpapan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kota Balikpapan	Ketua
3	Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Wakil Ketua I
4	Kepala Bappeda Litbang	Wakil Ketua II
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
B. UNSUR TIM PENYUSUN KOTA:		
1	Kepala Bappeda Litbang	Anggota
2	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Analisis Kebijakan dan Staf pada Bagian Pemerintahan	Anggota
C. UNSUR TIM PENYUSUN PERANGKAT DAERAH:		
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
2	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
4	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
5	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6	Kepala Satpol PP	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial	Anggota

8	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Anggota
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
15	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Anggota
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
17	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota
18	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
19	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
20	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota
21	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
22	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
23	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
24	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
25	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
D. UNSUR TIM REVIU:		
JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM
Inspektur Kota Balikpapan		Verifikator





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KUBANGUN, KUJAGA, DAN KUBELA